

**MENUJU DEMOKRASI
TANPA KEKERASAN**

**MENUJU DEMOKRASI
TANPA KEKERASAN**
Kerangka Konseptual Untuk Pembebasan

Gene Sharp

Kata Pengantar
Abdurrahman Wahid
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno



PUSTAKA SINAR HARAPAN
Jakarta, 1997

Perpustakaan Nasional: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Sharp, Gene

Menuju demokrasi tanpa kekerasan, kerangka konseptual untuk pembebasan oleh Gene Sharp; diterjemahkan oleh Sugeng Bahagijo, –Cet.1 – Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
xx, 108 hlm.; 21 cm.

Judul asli : *From Dictatorship to Democracy A Conceptual Framework for Liberation*

ISBN 979-416-432-1

1. Demokrasi

I. Judul

II. Bahagijo, Sugeng

321.9

MENUJU DEMOKRASI TANPA KEKERASAN
Kerangka Konseptual Untuk Pembebasan

Gene Sharp

97/POL/02

Judul asli : *From Dictatorship to Democracy A Conceptual Framework for Liberation*

© Gene Sharp, 1993

Albert Einstein Institute, 1430 Massachusetts
Avenue Cambridge, Massachusetts 02138 USA, Fax USA +617 - 7954

Hak terjemahan Indonesia pada Gene Sharp

Penerjemah : Sugeng Bahagijo

Rancangan Sampul : Sammy A. Toelle

Penata Letak : Paul Senadi

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, anggota Ikapi
bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID) dan Lembaga Tjoet Nyak Dien Yogyakarta (RUMPUN)
Jakarta

Cetakan Pertama, 1997

Dicetak oleh PT Penebar Swadaya

KATA PENGANTAR

TITIK TOLAK DEMOKRASI DAN SIKAP MENOLAK KEKERASAN

Kediktatoran selamanya bersifat militeristik, walaupun baju yang digunakan tidak selalu disebut demikian. Kediktatoran Salazar di Portugal jelas-jelas bersendikan cara-cara militer untuk mengokohkan dan mempertahankan kekuasaan, walaupun para pelaku dalam pelaksanaan kekuasaan adalah orang-orang sipil. Hitler pun adalah seorang sipil, tetapi pasukan-pasukan SS dan unit-unit Gestapo yang mendukungnya jelas-jelas bersifat militeristik. Contoh ini dapat diperpanjang dengan sederetan nama-nama para penguasa dengan kekuatan mutlak yang tidak pernah memegang jabatan militer apapun.

Bila kita amati ciri-ciri utama dari setiap kediktatoran, yang timbul adalah gambaran dari pemerintahan yang tidak memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk berbeda pendapat secara luas dan menetap dengan sang penguasa. Langkanya kelonggaran dan sikap memberi peluang kepada perbedaan pendapat itulah yang menjadi faktor tetap yang menyamakan semua sistem pemerintahan diktatorial. Apapun klaim yang diajukannya tentang keabsahan pendapat, sikap

atau keputusan yang diambil sebagai telah cukup mewakili jumlah terbesar warga masyarakat, pada kenyataannya justru pengingkaran terhadap kehendak rakyatlah yang terjadi.

Dengan demikian, apapun klaim yang diajukan tentang penentuan sikap ataupun pengambilan keputusan dalam proses yang pada dasarnya mengingkari hak orang banyak itu, keabsahan sikap atau keputusan itu sendiri tidak pernah dapat diuji secara terbuka, melainkan dicapai melalui proses yang sangat tertutup. Pengingkaran kehendak orang banyak melalui pengajuan klaim yang palsu merupakan sebuah proses yang bersambung terus-menerus dari satu sikap atau keputusan ke sikap atau keputusan berikutnya sambung-bersambung secara akumulatif dalam garis yang sangat panjang, yang dengan sendirinya merupakan tumpukan kesewenangan yang tidak bisa tegak tanpa ditopang oleh kekuatan militer. Birokrasi pemerintahan yang masih memilih sikap tenggang terhadap kehendak orang banyak jelas tidak akan mampu melakukan hal itu, karena sikap seperti itu akan membawa kepada penerimaan kebenaran yang obyektif yang datang dari mayoritas warga masyarakat. Sikap terus-menerus untuk menerima rangkaian kebenaran-kebenaran obyektif dari rakyat akan berarti hukuman mati bagi sebuah sistem pemerintahan diktatorial, karena ia akan membuktikan kepalsuan berbagai klaim yang diajukan oleh sang penguasa.

Karena itulah, hakikat dari kediktatoran adalah penolakan terhadap pluralitas pandangan atau keragaman pandangan dan pendapat. Masyarakat yang memperkenankan perbedaan pendapat dan menerima keragaman sikap sebagai sesuatu yang wajar pada hakikatnya mengajukan penolakan terhadap sistem pemerintahan diktatorial. Karenanya, sistem yang seperti itu akan selalu mengajukan keharusan bersikap sama dan bersatu pendapat bagi seluruh warga masyarakat, sebagai sebuah kebenaran subyektif yang

harus dipertahankan mati-matian. Dengan demikian ciri militeristik dari pemerintahan diktatorial tidak mungkin dihindarkan. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya tidak ada bedanya antara kediktatoran militer dan pemerintahan represif lainnya. Kediktatoran selalu bersifat militeristik, dan pemerintahan militeristik akan selalu mengacu kepada kediktatoran, apapun baju yang dikenakannya dan klaim yang diajukannya.

Pada hakikatnya, pertentangan abadi antara rangkaian kebenaran obyektif yang diajukan rakyat pada suatu masa dan kebenaran subyektif yang tunggal yang diajukan oleh pemerintahan diktatorial tidak dapat dilelai, sehingga dalam perspektif kesejarahan akan tampak sia-sia saja semua upaya *incremental* atau bertahap untuk menegakkan demokrasi. Inilah yang membuat sikap dasar mereka yang menggunakan pendekatan radikal atau penolakan terhadap cara-cara evolusioner sepanjang jalannya sejarah. Tetapi, sejarah jugalah yang mengajarkan kita kenyataan yang paling pahit : tidak pernah ada pemerintahan diktatorial dapat ditumbangkan oleh militansi yang tidak menggunakan kekerasan sebagai senjata yang sah untuk melakukan perubahan dengan menggulingkan pemerintahan yang ada. Yang terjadi bukanlah penahanan perjuangan dalam garis linear yang menunjukkan proses yang bertahap, melainkan pemekaran perlawanan berwajah tunggal, yang tadinya meliputi kawasan teritorial yang kecil dan kemudian berangsur-angsur melebarkan sayap ke seluruh negeri. Yang terjadi bukanlah perubahan gradual dalam banyaknya pendapat yang dikemukakan dan beragamnya sikap yang diperlihatkan, yang berarti peluang berbeda pandangan dan sikap, melainkan pemekaran lingkup sikap atau pandangan tunggal yang diajukan. Contoh terbaik dari keadaan demikian adalah penumbangan kediktatoran Koumintang di bawah Chiang Kaishek di daratan Cina oleh pemerintahan tandingan Kungcang di bawah Mao Zedong, yang pada hakikatnya adalah perpindahan dari satu ke lain sistem pemerintahan diktatorial.

Dengan demikian harus diakui bahwa penggunaan kekerasan dalam menggantikan sebuah sistem pemerintahan diktatorial tidaklah berarti tegaknya sebuah pemerintahan yang demokratis sebagai penggantinya. Dengan kata lain, sebuah pemerintahan yang demokratis barulah akan dapat ditegakkan oleh upaya yang menggunakan kekerasan. Se jauh apapun sikap radikal dan militansi yang dikembangkan dalam menegakkan sebuah pemerintahan demokratis, ciri pokok dari kiprahnya adalah penggunaan cara-cara yang menentang kekerasan. Gerakan buruh atau protes massa atau blokade kelompok-kelompok besar yang menurunkan para pengikut mereka ke jalan-jalan untuk melumpuhkan pemerintahan diktatorial dan menggantikannya dengan sistem yang demokratis, pada dasarnya harus bertumpuh pada sikap menolak penggunaan kekuasaan. Memburuknya keadaan, dalam eskalasi yang bisa terputus-putus ataupun yang mengalir tidak berkeputusan, bagi sang diktator akan berarti paksaan untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi dapat memaksakan kehendak kepada orang banyak. Ini terjadi terhadap diri Presiden Marcos di Filipina. Di hadapan *People's Powers* dan oleh para diktator Amerika Latin dalam rangkaian peristiwa sekitar dua sampai satu dasawarsa yang lalu.

Menjadi nyata dari kenyataan-kenyataan di atas, bahwa transisi dari kekuasaan diktatorial ke pemerintahan yang demokratis, apabila terjadi tanpa campur tangan kekuasaan dari luar (seperti terjadi atas Jerman dan Jepang), haruslah bersifat tanpa kekerasan dan berintikan kegigihan dan keuletan untuk menciptakan dan mengembangkan pluralitas pandangan dan keragaman pemikiran-pemikiran. Dengan kata lain, perjuangan menegakkan masyarakat pluralistik tanpa menggunakan kekerasan dan bertumpu pada ketabahan untuk menegakkan pandangan yang obyektif dan dengan sendirinya pluralistik terhadap kebenaran, adalah

satu-satunya jalan untuk menegakkan demokrasi. Baik mereka yang menggunakan pendekatan akomodatif terhadap sistem tidak demokratis yang ada, maupun mereka yang menolak bekerja sama dengan sistem itu secara konsisten, ternyata bermuara pada penolakan terhadap sikap hidup monolitik dan menambakan sikap hidup yang pluralistik. Bukankah justru pada titik inilah kebebasan yang didambakan oleh semua pejuang demokrasi bermula?

Abdurrahman Wahid



KATA PENGANTAR

Apakah pemerintah diktator harus diterima begitu saja, atau masyarakat dapat membebaskan diri dari padanya? Dan kalau dapat, lalu caranya bagaimana? Itulah pertanyaan yang dibahas oleh Gene Sharp dalam buku ini yang mau menyediakan "sebuah kerangka konseptual untuk pembebasan."

Dalam buku kecil ini Sharp langsung mengenai masalahnya. Ia tidak membuang-buang waktu dengan pelbagai pertimbangan normatif, definisi-definisi dan lain sebagainya, melainkan langsung memperlihatkan, dengan menguraikan cara-cara kongkret, bagaimana sebuah masyarakat dapat membebaskan diri dari kediktatoran

Buku kecil ini sangat praktis dan berguna kalau kita mau mendapat suatu pandangan yang nyata tentang perjuangan pembebasan melawan rezim-rezim diktatoris. Bagi saya yang paling menarik adalah dua tesis dasar buku ini: Pertama : Memakai kekerasan bukan cara efektif untuk menggulingkan pemerintahan diktatoris. Kedua, Sebuah kediktatoran pun tergantung dari "ketaatan, kerjasama dan kesediaan masyarakat untuk tunduk" dan oleh karena itu, apabila masyarakat menarik kembali sikap-sikap itu, pemerintahan diktatoris akan jatuh.

Untuk para romantisi revolusi pernyataan pertama barangkali mengecewakan. Akan tetapi argumentasi Sharp meyakinkan, dan makin cepat diyakini oleh mereka yang mau memperjuangkan kemerdekaan, makin besar kemungkinan mereka akan berhasil. Sharp memberikan dua argumen melawan penggunaan kekerasan. Yang pertama, pemakaian kekerasan justru merupakan keunggulan diktator: ialah yang menguasai polisi, tentara dan pasukan keamanan lain. Jadi memakai kekerasan berarti memilih medan perjuangan yang justru menguntungkan lawan. Kedua, sebuah perjuangan revolusioner dengan kekerasan jarang menguntungkan rakyat tertindas. Di lain pihak, andaikata revolusi berhasil, kemungkinan besar bahwa akan didirikan rezim yang terus memakai kekerasan untuk memperjuangkan tujuan-tujuannya, jadi diktator lama hanya diganti dengan diktator baru. Saya menerima argumentasi Sharp ini. Suatu perjuangan melawan rezim diktatoris harus memakai cara-cara non-kekerasan, cara-cara damai.

Tetapi yang lebih penting sebenarnya ulasan Sharp yang memperlihatkan bahwa sekuat-kuatnya sebuah rezim diktatorial, ia tidak dapat bertahan, apabila bagian terbesar masyarakat menarik kerjasamanya (seperti diuraikan dengan bagus dalam kisah "si tuan monyet"). Sharp lalu juga memperlihatkan bagaimana langkah-langkah perjuangan non-kekerasan itu, manakah cara-cara yang tersedia, dan bahwa sangat diperlukan sebuah strategi besar.

Rasanya bagi semua yang merasa risau dengan tendensi-tendensi diktatorial di banyak negara di dunia dewasa ini buku ini bisa menjadi bantuan yang nyata. Dengan menghindari pendekatan ideologis dan moralistik, dibuka wawasan bahwa pembebasan merupakan suatu kemungkinan nyata yang tentu membutuhkan nafas panjang. Itulah kekuatan buku itu, itulah sebabnya baik kalau para demokrat semua aliran membacanya.

Tetapi itu pula kelemahannya. Kerangka Sharp adalah sangat sederhana: sebuah rezim diktatorial yang menindas rakyatnya. Lalu diperlihatkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan sebuah perjuangan pembebasan yang realistik. Akan tetapi, sejauh mana kerangka Sharp itu relevan dan realistik ?

Memang, jelas ada rezim-rezim diktatorial seperti itu. Kebanyakan rezim komunis misalnya. Atau rezim para kolonel Yunani akhir tahun 60-an. Atau Jenderal Pinochet di Chili. Barangkali para jenderal di Birma dan Nigeria. Tetapi bagaimana halnya Aljazair? Situasi di negara itu sudah tidak sesederhana itu. Atau beberapa rezim di bekas negara-negara komunis. Atau otoritarianisme di Asia ? Bahkan bekas rezim Apartheid di Afrika Selatan dulu tidak sesederhana ini.

Soalnya, di kebanyakan negara yang kurang demokratis atau tidak demokratis, terutama di dunia ketiga, situasi jauh lebih ruwet. Rezim yang berkuasa umumnya justru bukan suatu diktator yang asal menindas masyarakat, melainkan sering mempunyai dukungan cukup kuat karena berhasil mengatasi masalah-masalah masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, mengakhiri kekacauan berkepanjangan . Atau berhasil mengatasi kelaparan dan memulai pembangunan ekonomis yang hasilnya dirasakan banyak orang. Atau mengembalikan masyarakat ke dalam situasi aman dan percaya diri. Bisa saja rezim-rezim itu juga mempunyai satu dua sudut diktatoris, tetapi tidak jarang masyarakat bersedia menerimanya karena segi keuntungan kepemimpinan otoriter lebih besar. Tidak jarang juga dukungan masyarakat sendiri cukup *complicated*. Bisa ada dukungan primordial, misalnya karena loyalitas kesukuan, etnis atau agama, berdasarkan perasaan takut terhadap golongan lain dalam masyarakat dan sebagainya. Bisa saja bahwa pemerintahan otoriter itu justru cukup berhasil mengatasi masalah-masalah primordial

dan oleh karena itu sebagian masyarakat mendukungnya (Marsekal Tito di Yugoslavia misalnya cukup berhasil, meskipun sayang tidak lestari).

Oleh karena itu, kemungkinan penerapan buku bagus ini cukup terbatas pula. Di banyak negara di Asia, misalnya situasi tidak sesederhana itu. "Rakyat atau masyarakat berhadapan dengan diktator" situasi simplistik itu cukup jarang dapat diverifikasikan. Dan dalam situasi yang kompleks banyak dari nasihat-nasihat praktis kelihatan tidak kena sasarannya.

Toh dalam situasi pemerintahan otoriter - mayoritas besar pemerintahan di dunia ketiga - suatu keuntungan juga dapat ditarik dari buku ini. Daripada "melawan rezim" dan lain-lain simplifikasi lebih baik diperjuangkan opsi dan sasaran politis yang kongkret dan nyata, seperti misalnya perluasan kebebasan pers, pembentukan partai politik, peningkatan jaminan hukum dan lain sebagainya. Konsentrasi pada sasaran nyata - yang sering masuk akal secara politis dan ekonomis pun dan oleh karena itu juga mempunyai kans untuk semakin didukung dalam masyarakat yang bersangkutan - jauh lebih efektif daripada sikap-sikap prinsipil seperti "melawan rezim" dan sebagainya.

Yang jelas dapat disimpulkan dari buku Sharp ini: Suatu perjuangan dengan cara non-kekerasan, sabar, rasional demi pencapaian sasaran-sasaran demokratis memiliki kemungkinan cukup besar untuk berhasil juga berhadapan dengan sebuah rezim yang tampak sangat otoriter.

Franz Magnis-Suseno, SJ

PRAKATA

Selama bertahun-tahun saya mempunyai satu keprihatinan besar tentang bagaimana mencegah dan menghentikan kediktatoran. Keprihatinan tersebut lahir sebagian karena saya percaya bahwa manusia tidak pantas untuk dikuasai dan dihancurkan rezim macam demikian. Keyakinan itu semakin diperteguh lagi oleh berbagai bahan bacaan: tentang mulianya harkat manusia, tentang akar dari kediktatoran (dari mulai pemikiran Aristoteles hingga para analis totalitarianisme), serta sejarah kediktatoran (khususnya sistem dari Nazi dan Stalin).

Tahun demi tahun saya berkesempatan mengenal orang-orang yang pernah hidup dan mengalami penderitaan di bawah rezim Nazi, termasuk mereka yang lolos dari kamp konsentrasi. Di Norwegia saya berjumpa dengan orang-orang yang pernah menentang pemerintahan fasis dan mampu bertahan juga mendengar cerita tentang mereka yang terbunuh. Pernah pula saya berbincang dengan seorang Yahudi yang lari dari cengkeraman Nazi dan menemui orang-orang yang pernah menyelamatkan para pelarian itu.

Pemahaman saya tentang teror di berbagai negeri komunis lebih banyak bersumber pada buku daripada melalui hubungan-hubungan pribadi. Teror yang terjadi di sana bagi

saya terasa getir, karena rezim kediktatoran itu menyebutkan tentang pembebasan dari penindasan dan penghisapan.

Wajah kediktatoran bagi saya semakin tampak nyata, setelah menjumpai orang-orang yang berasal dari negeri-negeri yang dikendalikan secara diktatorial, misalnya Panama, Polandia, Cili, Tibet dan Burma. Dari mulai pejuang Tibet yang melawan agresi Cina komunis, orang Rusia yang diganyang oleh kudeta sayap garis-keras di bulan Agustus 1991, dan warga Thailand yang menempuh cara non-kekerasan untuk mencegah kembalinya pemerintahan militer. Dari mereka saya memperoleh sudut pandang —yang seringkali terasa menyesak— tentang watak keji dari kediktatoran.

Rasa ngeri dan amarah akan kekejaman kediktatoran bercampur dengan kekaguman saya akan kepahlawanan dari laki-laki dan perempuan dengan keberanian tiada tara, senantiasa menebal tatkala saya mengunjungi daerah-daerah berbahaya dimana orang-orang pemberani masih terus melawan. Tempat-tempat itu antara lain adalah Panama semasa di bawah Noriega; Vilnius dan Lithuania di mana penindasan Soviet masih berlanjut; Lapangan Tiananmen, di tengah kemeriahan demonstrasi kebebasan dan saat-saat awal masuknya satuan bersenjata di malam yang menentukan itu; dan markas kekuatan demokratis di hutan Manerplaw, di wilayah "Birma Merdeka."

Sesekali saya mengunjungi tempat-tempat seperti menara televisi dan tempat pemakaman di Vilnius, taman umum di Riga, tempat mereka menembaki rakyat; jantung kota Ferrara di Italia Utara, tempat penguasa fasis menjejerkan dan lalu menembaki para pembangkang dan pemakaman sederhana di Manerplaw, tempat jasad pemuda-pemuda yang terlalu muda untuk mati itu dikuburkan. Sungguh menyedihkan, bangkitnya kediktatoran meminta korban nyawa dan kerusakan yang demikian besar.

Seiring dengan keprihatinan dan pengalaman-pengalaman itu, tumbuh pula harapan bahwa tirani dapat dicegah, perlawanan melawan kediktatoran dapat dilakukan tanpa harus jatuh korban massal, kediktatoran dapat diruntuhkan dan dari abu keruntuhannya dapat dicegah munculnya kediktatoran yang baru.

Saya berupaya memikirkan dengan seksama cara-cara paling efektif untuk menghancurkan kediktatoran dengan sedikit mungkin penderitaan dan korban jiwa. Dalam upaya itu saya menelusuri riwayat kediktatoran, gerakan perlawanan, revolusi, pemikiran politik, sistem pemerintahan, dan khususnya perlawanan non-kekerasan yang realistis.

Terbitan ini adalah hasilnya. Saya yakin masih jauh lebih dari sempurna. Namun beberapa pokok pikiran mungkin berguna untuk memandu pemikiran dan perencanaan dalam membangun gerakan pembebasan yang lebih kuat dan efektif.

Dengan alasan kebutuhan, dan ini merupakan pilihan yang sengaja, esai ini memutuskan perhatian pada masalah umum tentang bagaimana mengalahkan kediktatoran dan mencegah lahirnya kediktatoran baru. Saya tidak berkompeten untuk menuliskan analisis umum ini bermanfaat untuk mereka yang berada di banyak negeri, sayangnya terlalu banyak, yang secara nyata menghadapi pemerintahan diktatorial. Merekalah yang mesti memeriksa keabsahan analisis dalam esai ini pada situasi mereka dan menguji hingga mana sasaran pokok dari tulisan ini layak untuk perjuangan mereka.

Ketika menuliskan esai ini saya banyak berhutang budi. Bruce Jenkins asisten khusus saya sudah memberikan bantuan tak ternilai dengan memperlihatkan berbagai masalah menyangkut isi dan penyajian, melalui saran-sarannya yang mengena untuk menuliskan secara lebih ketat dan jernih gagasan-gagasan yang sukar (khususnya tentang

strategi), merancang-ulang batang tubuh tulisan dan memperbaiki penyuntingan. Saya juga ingin berterima kasih atas bantuan penyuntingan dari Stephen Coady. Dari Dr. Christopher Kruegler dan Robert Helvey saya memperoleh kritik dan saran berharga. Dr. Hazel McFerson dan Dr. Patricia Parkman, masing-masing telah mengirim saya informasi mengenai perjuangan yang dilakukan di Afrika dan Amerika Latin. Banyak sumbangan dan dukungan mereka dalam penulisan ini, meski demikian analisis dan kesimpulan yang termuat di dalamnya tetap merupakan tanggung-jawab saya.

Dalam analisis ini tidak sekalipun saya mengatakan bahwa meruntuhkan kediktatoran adalah pekerjaan mudah dan tak makan biaya. Semua jenis perjuangan mengandung kerumitan dan pergorbanan. Melawan kediktatoran tentu akan ada korban. Harapan saya adalah agar analisis ini dapat mengajak para pemimpin perlawanan untuk mempertimbangkan strategi-strategi yang mengefektifkan kekuatan mereka sambil menurunkan tingkat relatif korban.

Tidak semestinya pula analisis ini dimaknakan sebagai: kediktatoran runtuh, tak ada lagi masalah. Kejatuhan suatu rezim tak perlu disambut dengan utopia. Melainkan suatu jalan yang terbuka untuk membangun relasi sosial, ekonomi dan politik yang lebih adil melalui kerja keras dan upaya yang lama, serta membasmi bentuk-bentuk lain dari ketidak-adilan dan penindasan. Harapan saya, kajian pendek tentang bagaimana cara kediktatoran ini bermanfaat bagi siapa saja, di mana pun, yang hidup di bawah penindasan dan mencita-citakan kebebasan.

Gene Sharp
6 Oktober 1993
Albert Einstein Institution
1430 Massachusetts Avenue
Cambridge, Massachusetts 02138 USA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar oleh Abdurrahman Wahid	v
Kata Pengantar oleh Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ.....	xi
Prakata Gene Sharp	xv
BAB I. Menghadapi Kediktatoran Secara Realistis	1
BAB II. Bahaya Perundingan.....	12
BAB III. Dari Mana Datangnya Kekuasaan?	22
BAB IV. Diktator Memiliki Kelemahan	31
BAB V. Menguji Kekuatan	36
BAB VI. Perlunya Perencanaan Strategis	49
BAB VII. Merancang Strategi	59
BAB VIII. Menjalankan Pembangkangan Politik.....	72
BAB IX. Runtuhnya Kediktatoran	80
BAB X. Landasan Bagi Sistem Demokrasi Yang Terandalkan	88
Lampiran	95
Indeks	103

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam rangka menerbitkan buku yang ditulis oleh Dr. Gene Sharp dengan judul: *Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan Kerangka Konseptual Untuk Pembebasan*, Pustaka Sinar Harapan merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) INFID dan RUMPUN atas kerja sama yang baik serta kepada Maria Pakpahan, yang telah bekerja keras untuk tujuan penerbitan buku ini.

Juga kepada Bapak Abdurrahman Wahid dan Romo Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J., yang telah bersedia menuliskan kata pengantar yang padat dan berbobot isinya, kami menghaturkan terima kasih yang berlimpah. Kedua Kata Pengantar tersebut akan dapat mengantar dan membimbing para pembaca untuk memahami ide serta gagasan penulis mengenai DEMOKRASI Tanpa Kekerasan

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut membantu terlaksananya penerbitan buku ini kami menghaturkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juni 1997

Penerbit

BAB I

MENGHADAPI KEDIKTATORAN SECARA REALISTIS

Dalam tahun-tahun belakangan ini sejumlah diktator (baik kediktatoran pendudukan asing maupun kediktatoran oleh bangsa sendiri) ambruk atau jatuh dijungkalkan perlawanan rakyat yang menggalang kekuatannya. Kediktatoran yang semula tampak begitu kuat dan tak terlawankan terbukti tak mampu membendung perlawanan politik, ekonomi dan sosial dari rakyatnya.

Sejak tahun 1980, sejumlah kediktatoran berjatuh oleh perlawanan tanpa-kekerasan dari rakyat di Estonia, Latvia dan Lithuania, Polandia, Jerman Timur, Ceko, Slowakia dan Slovenia, Madagaskar, Mali, Bolivia dan Filipina. Perlawanan tanpa kekerasan mendorong pula gelombang gerakan demokratisasi di Nepal, Zambia, Korea Selatan, Chili, Argentina, Haiti, Brazil, Uruguay, Malawi, Thailand, Bulgaria, Hungaria, Zaire, Nigeria dan sejumlah wilayah bekas Uni Soviet (perlawanan rakyat mengambil peran penting dalam mematahkan percobaan kudeta dari kelompok garis keras, tahun 1991).

Pembangkangan politik rakyat¹ berlangsung pula di Cina, Burma dan Tibet pada tahun-tahun terakhir ini. Meskipun gagal menyudahi kediktatoran atau mengusir pendudukan asing, namun perlawanan itu telah berhasil memampangkan watak keji dari rezim represif ke hadapan mata masyarakat internasional, dan bentuk perjuangan demikian memberikan pengalaman yang berharga bagi masyarakat.

Runtuhnya kediktatoran di negeri-negeri yang disebutkan di atas memang tidak menghapus semua masalah dalam masyarakat, yakni: kemiskinan, kejahatan, kemacetan birokrasi dan kerusakan lingkungan yang diwariskan rezim terdahulu. Namun, kejatuhan diktator paling sedikit mengurangi penderitaan korban penindasan dan membuka jalan untuk membangun masyarakat dengan demokrasi politik yang lebih lapang, menghormati kebebasan pribadi dan berkeadilan sosial.

-
1. Di sini digunakan istilah yang diperkenalkan oleh Robert Helvel. "Pembangkang Politik" adalah perjuangan tanpa kekerasan (protes, non-kooperasi) yang diterapkan dengan teguh dan aktif untuk tujuan politik. Istilah ditelurkan sebagai tanggapan atas kebingungan dan kekaburan yang timbul akibat penyamaan antara perjuangan tanpa kekerasan dengan pasifisme dan gerakan "tanpa kekerasan" yang berpijak pada pandangan moral dan agama. "Pembangkangan" (*defiance*) mengacu kepada tantangan yang dilakukan secara sengaja terhadap kekuasaan dengan jalan *mbalelo*, menolak untuk tunduk. "Pembangkangan Politik" menyatakan lingkungan di mana aksi yang dijalankan dan tujuannya bersifat politik. Istilah ini dipakai pertama-tama untuk menggambarkan tindakan-tindakan warga masyarakat guna merebut kembali lembaga-lembaga pemerintahan dan memperjuangkan kebebasan dari tangan diktatur dengan cara menyerang tanpa henti sumber-sumber kekuasaan dan secara sadar menerapkan serta melaksanakan rencana strategis. Dalam buku ini istilah pembangkangan politik, perlawanan tanpa-kekerasan dan perjuangan tanpa kekerasan digunakan secara bergantian, sekali pun dua istilah yang terakhir mencakup bentuk perjuangan dengan sasaran yang lebih jelas (sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain).

Masalah yang Masih Berlanjut

Pada dekade-dekade yang lalu memang ada kecenderungan menuju demokratisasi dan kebebasan yang lebih luas di dunia. Menurut Freedom House, yang melakukan survei tahunan mengenai status hak-hak politik dan kebebasan sipil, negara yang dikategorikan sebagai "bebas" meningkat secara berarti dalam sepuluh tahun terakhir ini:²

	bebas	bebas sebagian	tidak bebas
1993	55	76	64
199	75	73	38

Namun demikian, kecendrungan positif ini masih dibayang-bayangi kenyataan besarnya jumlah rakyat yang masih hidup di bawah tirani. Sampai Januari 1993, 3% dari 5.45 milyar populasi dunia hidup di negeri atau wilayah yang dirancang sebagai "tidak bebas"³ yaitu daerah-daerah di mana hak-hak politik dan kebebasan sipil sangat dikekang. Tiga puluh delapan negeri dan 12 wilayah dalam kategori tidak bebas dikuasai oleh militer (seperti Burma dan Sudan), monarki tradisional yang represif (seperti Saudi Arabia dan Bhutan), partai politik dominan (seperti Cina, Irak, dan Korea Utara), pendudukan Asing (Timor-timur dan Tibet), atau ada dalam keadaan transisi.

Di banyak negara kini berlangsung perubahan ekonomi, politik, dan sosial yang cepat. Sekalipun jumlah negeri-

-
2. Freedom House, *Freedom in the World : The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties 1992 - 1993* (New York : Freedom House, 1993), hlm. 66 (data sampai Januari 1993).
 3. Freedom House, *Freedom in the World*, hlm.4.

negeri yang "bebas" meningkat dalam sepuluh tahun terakhir ini, ada risiko besar perubahan mendasar yang cepat itu akan berbalik arah dan negara-negara itu akan mengalami bentuk kediktatoran baru. Klik militer, individu yang ambisius, pejabat-pejabat yang ditunjuk, dan partai-partai politik doktriner akan kembali memaksakan kehendaknya. Kudeta lazim terjadi dan akan terus berulang. Hak dasar dan politik sebagian besar rakyat akan terus-menerus diabaikan.

Sayangnya, masa lalu masih bersama kita. Masalah diktator sudah berurat-akar. Rakyat di banyak negeri mengalami berpuluh tahun atau bahkan abad-abad penindasan, baik penindasan dari bangsanya sendiri maupun bangsa asing. Seringkali ketundukan tanpa syarat kepada tokoh pejabat atau penguasa sudah sukar untuk diubah. Pada kasus yang ekstrim, lembaga-lembaga ekonomi, sosial, politik, dan bahkan lembaga agama milik masyarakat - bukan lembaga negara- sudah dikerdilkan, ditundukkan atau diganti oleh lembaga-lembaga baru yang diperalat oleh negara atau partai berkuasa untuk mengendalikan masyarakat. Rakyat seringkali dicerai-berai (menjadi sebuah massa besar yang terdiri dari individu-individu yang terpisah), tak mampu bekerja-sama untuk mencapai kebebasan, tidak saling mempercayai bahkan tidak mampu melakukan sesuatu atas inisiatif mereka sendiri.

Hasilnya, masyarakat menjadi lemah, hilang kepercayaan diri, dan tak mampu melakukan perlawanan. Bahkan di tengah keluarga dan teman sendiri pun orang senantiasa takut berbagi perasaan kebencian mereka terhadap rezim ataupun menyatakan keinginan mendalam mereka akan kebebasan. Orang seringkali terlalu khawatir untuk sungguh-sungguh memikirkan perlawanan bersama. Malah bertanya: untuk apa? Sebaliknya mereka mengalami penderitaan tanpa berketentuan dan masa depan tanpa harapan.

Kondisi di bawah kediktatoran sekarang mungkin lebih buruk ketimbang dahulu. Mungkin di masa silam masih ada sejumlah orang yang berusaha melakukan perlawanan. Protes massa dan demonstrasi berumur pendek mungkin sudah pernah dilakukan. Barangkali untuk sementara waktu semangat pernah berkobar. Pada suatu masa barangkali sejumlah atau sekelompok kecil orang sudah menunjukkan keberanian, meskipun sia-sia, mempertahankan prinsip mereka atau sekedar melakukan perlawanan. Bagaimanapun mulianya niat mereka, aksi-aksi perlawanan yang telah terjadi ternyata tidak cukup untuk menghapus ketakutan dan kebiasaan patuh, sesuatu yang merupakan syarat untuk mengalahkan kediktatoran. Sedihnya tindakan mereka justru membawa lebih banyak penderitaan dan kematian, bukan kemenangan atau bahkan harapan.

Cara Kekerasan?

Apa yang harus dikerjakan dalam situasi seperti itu? Tampaknya tidak ada kemungkinan yang memberi harapan. Rintangan konstitusional dan hukum, keputusan peradilan dan pendapat publik umumnya diabaikan begitu saja oleh para diktator. Berhadapan dengan kekejaman, penyiksaan, penculikan dan pembunuhan, mudah dimengerti bila terdapat mereka yang menyimpulkan bahwa kediktatoran hanya bisa diakhiri melalui jalan kekerasan. Korban yang dibakar kemarahan kadang-kadang memilih menggalang perjuangan dengan cara kekerasan dan kekuatan senjata yang mereka dapat himpun, ketimbang mereka menjadi korban kekerasan. Orang-orang ini biasanya berjuang dengan gagah berani dengan taruhan nyawa dan kesengsaraan. Kadang-kadang mereka meraih kemenangan yang mengagumkan, tapi umumnya jarang berhasil memenangkan kebebasan. Pemberontakan dengan kekerasan bisa memicu represi brutal yang akhirnya membuat penduduk makin tak

berdaya ketimbang sebelumnya.

Apapun kelebihan yang dimiliki perlawanan dengan kekerasan, terdapat satu hal yang jelas. *Dengan meyakini cara-cara kekerasan, seseorang sudah memilih cara yang hampir selalu dimenangkan oleh kaum penindas.* Diktator diperlengkapi untuk memakai kekerasan secara berlebihan. Bagaimanapun panjang atau pendek perlawanan kaum demokrat bisa berlanjut, pada akhirnya kekerasan militer menjadi tak terhindarkan. Diktator selalu lebih unggul dalam peralatan militer, persenjataan, transportasi, dan jumlah satuan militer. Kecuali keberanian, kaum demokrat hampir selalu tidak mampu menandingi mereka.

Jika memang pemberontakan militer konvensional dinilai tidak realistis, maka para pembangkang lalu memilih perang gerilya. Namun perang gerilyanya, jika pernah ada, jarang memberikan keuntungan pada rakyat tertindas atau berguna membangun suatu demokrasi. Perang gerilya jadinya bukan merupakan jalan keluar, khususnya menimbang kecenderungan besarnya kerusakan di pihak rakyat sendiri. Soal teknik bukan penjamin terhindarnya kekalahan sekalipun ada dukungan teori dan analisis strategis dan dukungan internasional. Perang gerilya seringkali berlangsung lama. Penduduk sipil biasanya diusir oleh pemerintah yang berkuasa dengan akibat penderitaan rakyat dan kekacauan sosial.

Seandainya berhasilpun, perjuangan gerilya acapkali memiliki dampak negatif struktural jangka panjang. Biasanya rezim yang diserang akan semakin garang untuk membalas perlawanan gerilya. Jika perjuangan gerilya berhasil rezim baru yang muncul seringkali lebih menindas ketimbang pendahulunya karena dampak sentralisasi dari satuan-satuan militer yang diperluas dan melemahnya atau pupusnya kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga independen masyarakat selama perjuangan – lembaga-lembaga yang vi-

tal dalam membangun dan mempertahankan masyarakat demokratis. Oleh karena itu, mesti dicari cara lain untuk melawan kediktatoran.

Kudeta, Pemilihan Umum, Menunggu Bangsa Asing Juru Selamat?

Kudeta militer nampaknya merupakan jalan paling mudah dan cepat untuk mendongkel rezim yang kejam. Akan tetapi, cara ini mengandung satu masalah serius. Terutama karena cara ini mengabaikan adanya ketimpangan pembagian kekuasaan antara rakyat kebanyakan dan kelompok elite dalam mengendalikan pemerintah beserta kekuatan militernya.

Penyingkiran tokoh dan klik tertentu dari posisi memerintah hanya akan membuka jalan bagi kelompok lain mengambil alih kekuasaan. Secara teoritis, kelompok ini akan bersikap lebih lunak dan hanya terbuka dengan cara-cara terbatas untuk menuju reformasi demokratis. Namun yang biasanya terjadi adalah hal sebaliknya.

Sesudah mengkonsolidasikan kekuasaannya, klik baru akan berbalik menjadi lebih kejam dan rakus kekuasaan ketimbang penguasa sebelumnya. Selanjutnya, klik baru tersebut —yang dahulu mungkin pernah menjadi tumpuan harapan— akan bertindak apa saja yang dikehendaki tanpa memperdulikan demokrasi atau hak-hak azasi manusia. Maka, kudeta bukanlah jawaban terhadap masalah kediktatoran.

Pemilihan-umum tidak pernah menjadi sarana perubahan politik yang bermakna di bawah diktator. Sejumlah rezim diktator seperti negeri-negeri Blok Timur, wilayah pengaruh bekas dominasi Uni Soviet, melangsungkan pemilihan-umum agar terlihat demokratis. Pemilihan-umum itu hanya merupakan pengumpulan suara yang dikontrol ketat guna mem-

peroleh pengesahan bagi calon-calon yang sudah ditunjuk oleh diktator. Diktator yang tengah menghadapi tekanan bisa saja menyepakati untuk menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi dengan tujuan menempatkan boneka-boneka sipil di pemerintahan. Jika calon-calon oposisi pemerintah diizinkan memasuki gelanggang dan akhirnya menang dan terpilih, seperti yang terjadi di Burma 1990 dan Nigeria 1993, hasil pemilihan umum begitu mudah diingkari dan "pemenangnya" bahkan menjadi sasaran intimidasi, penangkapan, bahkan hukuman mati. Diktator tidak berminat menyelenggarakan pemilihan umum yang bisa membuat mereka terpelanting dari kedudukannya.

Banyak mereka yang kini dibuat menderita oleh kediktatoran brutal atau terpaksa mengungsi untuk menghindari tekanan, tidak percaya bahwa rakyat tertindas mampu membebaskan diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa rakyat hanya mungkin terbebaskan melalui pertolongan orang lain. Orang-orang begini lebih menaruh kepercayaan pada kekuatan-kekuatan asing. Mereka percaya bahwa hanya bantuan internasionallah yang cukup kuat untuk mengakhiri kediktatoran.

Pandangan bahwa mereka yang tertindas tidak mampu bertindak tepat, untuk waktu tertentu, ada benarnya. Mereka yang tertindas tidak bersedia dan pada kala tertentu tidak berdaya untuk melawan karena mereka tidak percaya atas kemampuan mereka menghadapi diktator yang keji, tambahan lagi dan mereka tidak paham cara-cara menyelamatkan diri. Karenanya mudah dimengerti jika banyak orang meletakkan harapan akan pembebasan diri kepada pihak luar. Kekuatan luar itu bisa berupa "pendapat umum", tekanan Perserikatan Bangsa Bangsa, atau negeri tertentu, atau sanksi ekonomi dan politik dari masyarakat internasional.

Skenario menunggu juru-selamat kedengarannya menyenangkan. Namun menyandarkan diri pada penyelamat dari luar juga mengandung masalah besar. Kepercayaan semacam itu bisa salah sama sekali. Karena, umumnya penyelamat asing tidak pernah datang, dan jikapun sebuah negeri asing melakukan campur tangan, barangkali tidak harus dipercaya sepenuhnya.

Sebelum mengandalkan diri pada intervensi asing, kenyataan pahit di bawah ini perlu dipertimbangkan:

- Negeri lain acapkali mentolerir atau bahkan secara positif membantu kediktatoran untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka.
- Demi tujuan lain, negeri lain juga akan membiarkan rakyat tertindas menjadi korban ketimbang berjanji membantu pembebasan mereka.
- Terdapat negeri-negeri asing akan bertindak melawan kediktatoran hanya untuk memperoleh kendali ekonomi, politik atau militer.
- Negeri asing bisa saja sangat aktif terlibat dalam tujuan-tujuan positif hanya ketika perlawanan dalam negeri sudah mulai mengancam kedudukan kediktatoran, sesudah perhatian internasional tertuju kepada kebrutalan rezim tersebut.

Kediktatoran lazimnya terbentuk karena timpangnya distribusi kekuasaan di suatu negeri. Kekuatan rakyat dan masyarakat terlalu lemah untuk mengatasi masalah besar kediktatoran, karena kekayaan dan kekuasaan terpusat di tangan segelintir orang. Sekalipun sebuah kediktatoran dapat saja didukung atau ditekan oleh tindakan-tindakan internasional, tetapi kelangsungannya tetaplah tergantung sepenuhnya kepada faktor dalam negeri.

Campur tangan masyarakat internasional akan sangat

bermanfaat apabila hal itu menyokong gerakan perlawanan yang tangguh. Misalnya, melalui boikot ekonomi internasional, embargo, pemutusan hubungan diplomatik, pengucilan dari organisasi internasional, kecaman dari badan-badan PBB dan semacamnya. Namun, tanpa perlawanan yang berarti dari kekuatan di dalam, maka dukungan internasional sukar terjadi.

Menghadapi Kenyataan Pahit

Sungguh kesimpulan yang pahit. Jika seseorang ingin menempuh cara paling efektif dengan korban serendah-rendahnya untuk mengakhiri kediktatoran, maka ada empat tugas yang menunggu untuk dikerjakan:

- Memperkuat keteguhan, keyakinan diri dan kecakapan warga tertindas melakukan perlawanan.
- Memperkuat kelompok dan lembaga-lembaga masyarakat independen.
- Menciptakan kekuatan perlawanan di dalam negeri yang kuat dan tangguh, dan
- Mengembangkan rencana umum strategis yang bijaksana untuk pembebasan dan melaksanakannya secara cakap.

Perjuangan pembebasan merupakan saat-saat penentuan nasib sendiri dan penguatan kelompok-kelompok perlawanan di dalam negeri. Sebagaimana seruan Charles Stewart Parnell pada kampanye pemogokan Irlandia tahun 1879 dan 1880 :

"Sia-sia jika kamu bergantung pada pemerintah...Kamu mesti hanya percaya pada keteguhanmu sendiri...Bantulah dirimu sendiri dengan berdiri bersama...Perkuatlah mereka yang lemah di sekitarmu...ikatlah dirimu bersama-sama, galanglah dirimu...dan kamu mesti menang.."

"Ketika kamu memutuskan bahwa masalah ini harus diatasi, saat itulah akan ada jalan keluar."⁴

Berhadapan dengan kekuatan yang mandiri, dengan strategi yang jitu, dengan aksi-aksi yang berdisiplin dan berani, maka diktator akan oleng. Untuk itu, sekurang-kurangnya keempat syarat di atas harus dipenuhi.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, pembebasan dari kediktatoran pada akhirnya tergantung kepada kemampuan rakyat untuk membebaskan diri mereka sendiri. Pengalaman dari perlawanan politik yang berhasil - atau perjuangan tanpa-kekerasan untuk tujuan politik - yang disebut di depan mengajarkan bahwa warga masyarakat memiliki semua alat untuk membebaskan diri. Namun kemampuan tersebut belum terasah. Kita akan membahas lebih rinci pada bab berikutnya. Tetapi, terlebih dahulu kita akan mengkaji perundingan sebagai sebuah cara untuk menghentikan kediktatoran.

4. Patrick Sarsfield O'Hegarty, *A history of Ireland Under a Union, 1880 - 1922*, (London : Mathuen, 1925), hlm. 490 - 491.

BAB II

BAHAYA PERUNDINGAN

Menghadapi berbagai masalah pelik melawan kediktatoran (sebagaimana digambarkan secara singkat dalam Bab I), sebagian orang merasa hilang akal dan menyerah. Melihat tidak ada harapan mencapai demokrasi, sebagian yang lain berkesimpulan bahwa mereka harus menerima kediktatoran yang nampak tak tergoyahkan dan berharap bahwa "perdamaian", "kesepakatan", dan "perundingan" perlu dilakukan dalam menyelamatkan aspek-aspek positif dan mengakhiri kebrutalan. Karena tidak ada pilihan lain yang realistis, gagasan ini seakan-akan menarik.

Perjuangan melawan kediktatoran brutal prospeknya tidak menarik. Jika demikian, mengapa cara itu harus ditempuh? Tak bisakah semua pihak berbicara dengan kepala dingin, merundingkan jalan untuk mengakhiri kediktatoran secara bertahap? Tidakkah kaum demokrat menyentuh rasa kemanusiaan diktator dan meyakinkannya untuk mengurangi kediktatorannya sedikit demi sedikit, sehingga terbuka peluang untuk pembentukan sebuah sistem yang demokratis?

Kadang-kadang terdengar pendapat bahwa kebenaran tidak seluruhnya milik satu pihak saja. Mungkin kaum demokrat salah paham akan watak diktator, yang bertindak atas motif-motif yang mulia dalam situasi yang sulit? Atau barangkali orang beranggapan bahwa dalam situasi yang sulit, diktator dengan senang hati akan mengundurkan diri bila diberikan semacam dukungan dan jaminan. Mungkin juga dikatakan bahwa diktator bersedia menerima penyelesaian "semua menang, tak ada yang kalah", di mana kedua pihak memperoleh sesuatu, segala risiko dan penderitaan yang tidak perlu dapat dihindari jika oposisi demokrat mau mengupayakan jalan damai (melalui perundingan yang ditengahi seorang tokoh ahli atau pemerintah asing). Bukanlah perjuangan merupakan cara yang sukar, sekalipun itu perjuangan tanpa kekerasan dan bukan perang secara militer.

Perundingan : Kelebihan dan Keterbatasannya

Perundingan adalah sarana yang ampuh untuk memecahkan isu-isu tertentu dalam sebuah konflik, dan sarana ini tidak boleh disepelekan atau disingkirkan manakala ia cocok. Sepanjang tidak menyangkut isu yang mendasar dan oleh karenanya kedua pihak dapat menemukan kata sepakat, maka perundingan dapat menjadi sarana penyelesaian konflik. Pemogokan buruh yang menuntut kenaikan upah adalah contoh bagus bagaimana perundingan dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Melalui perundingan dapat disepakati tingkat upah yang lebih tinggi. Akan tetapi, konflik buruh dengan serikat buruh legal adalah isu yang sama sekali berbeda dengan konflik antara kediktatoran kejam yang ingin terus berkuasa atau dengan kebebasan politik.

Jika isu yang diperjuangkan adalah masalah yang mendasar, yang menyangkut prinsip-prinsip agama, isu-isu

kebebasan manusia atau keseluruhan masa depan masyarakat, perundingan tidak akan menjadi jalan untuk penyelesaian memuaskan kedua pihak. Dalam soal isu-isu mendasar tidak boleh ada tawar menawar. Hanya perubahan kekuasaan yang berpihak ke kaum demokrat yang bisa menjamin terlindungnya isu-isu mendasar. Peralihan kendali kekuasaan tersebut hanya dapat dicapai melalui perlawanan, bukan perundingan. Bukan berarti bahwa perundingan tidak boleh dipakai. Tetapi, perundingan bukanlah jalan yang realistis untuk mengakhiri kediktatoran yang berdiri kokoh di tengah tiadanya oposisi demokrat yang kuat dan tangguh.

Tentu saja ada kalanya perundingan tidak dapat dilakukan. Diktator yang demikian kuat yang merasa dalam posisi aman akan menolak untuk berunding dengan sang demokrat lawan politiknya. Atau, jika perundingan mulai dilakukan, perundingan pihak demokrat hilang dan tidak pernah terdengar lagi beritanya.

Penyerahan Diri melalui Perundingan

Mereka yang melawan kediktatoran, perorangan atau kelompok, dan condong pada cara perundingan seringkali memiliki niat yang mulia. Khususnya manakala perjuangan bersenjata melawan kediktatoran telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kemenangan tuntas, maka dapat dipahami jika semua orang dengan berbagai kecenderungan politik menginginkan perdamaian. Perundingan akan menjadi pokok pembicaraan di kalangan kaum demokrat bila diktator unggul mutlak secara militer, dan kerusakan serta kerugian di kalangan rakyat sudah tak tertanggungkan. Dalam situasi semacam ini akan ada godaan besar untuk mencari jalan lain yang dapat memenuhi tujuan kaum demokrat seraya mengakhiri lingkaran setan kekerasan dan kontra-kekerasan. Tawaran dari pihak kediktatoran untuk "berdamai" melalui perundingan dengan oposisi demokrat

sudah barang tentu merupakan tawaran yang lebih tidak murni lagi. Mengapa demikian? Karena sebenarnya diktator dapat menghentikan kekerasan sesegera mungkin, bila ia memang memiliki keinginan untuk berhenti memusuhi rakyatnya sendiri.

Diktator dapat langsung bertindak atas inisiatifnya sendiri, tanpa tawar menawar, untuk mengembalikan hak dan martabat manusia, membebaskan tahanan politik, menyudahi penyiksaan, menghentikan operasi militer, atau mundur dari pemerintahan dan meminta maaf kepada masyarakat.

Kediktatoran kuat yang merasa terusik oleh perlawanan yang lemah, akan mengajak pihak oposisi berunding agar menyerah dengan selubung "perdamaian". Mereka akan menyiarkan seruan berunding yang sangat menyentuh, tapi bencana bisa sewaktu-waktu datang di ruang perundingan.

Sebaliknya bila oposisi sangat kuat dan gigih, dan diktator benar-benar sangat terancam, maka diktator akan mengupayakan perundingan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin kekuasaan dan kekayaannya. Dalam kedua jenis situasi ini, kaum demokrat tidak seharusnya menolong diktator mencapai tujuannya.

Kaum oposisi demokratis mesti hati-hati akan jebakan lawan dalam proses perundingan. Mungkin saja ajakan untuk merundingkan isu-isu mendasar, seperti kebebasan politik, merupakan upaya untuk mengajak demokrat menyerah secara damai, sementara kekerasan diktator tetap berlangsung. Dalam konflik semacam itu, saat paling tepat untuk melakukan perundingan adalah pada akhir perjuangan yang menentukan, ketika kekuasaan diktator sudah dilucuti, ketika mereka mencari jaminan keselamatan untuk melarikan diri menuju bandara internasional.

Kekuatan dan Keadilan dalam Perundingan

Jika penilaian mengenai perundingan ini terdengar terlalu pedas, agaknya beberapa gagasan romantis yang menyangkut perundingan perlu untuk diluruskan. Perlu pikiran jernih untuk mencermati jalannya perundingan.

"Berunding" tidak berarti bahwa kedua pihak duduk bersama dengan kedudukan setara dan melakukan pembicaraan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang menjadi sumber konflik antara kedua pihak. Ada dua hal yang harus diingat.

Pertama, dalam perundingan, perbedaan pandangan tentang keadilan relatif dan perbedaan tujuan antara pihak yang bertikai tidak menentukan isi kesepakatan. Kedua, isi kesepakatan sebagian besar ditentukan oleh kapasitas kekuatan masing-masing pihak.

Ada beberapa kesulitan yang mesti dipertimbangkan. Apa yang bisa dilakukan kedua pihak di kemudian hari untuk memperoleh tujuan-tujuannya, jika pihak lain gagal menunaikan hal yang menjadi kesepakatan? Apa yang bisa dilakukan oleh satu pihak jika pihak lawan melanggar persetujuan dan memakai kekuatan untuk memperoleh tujuan-tujuannya?

Perundingan yang berdasarkan pada penilaian benar-salah terhadap isu yang dibicarakan tidak akan membuahkan penyelesaian. Dalam pembicaraan antara pihak yang berseberangan, isu tentang benar dan salah memang akan banyak dibahas. Tetapi hasil nyata perundingan adalah hasil penilaian kekuatan (relatif maupun mutlak) dari masing-masing pihak terhadap lawannya. Apa yang bisa dilakukan kaum oposisi demokratis untuk menjamin agar lawan tidak mengingkari tuntutan minimum? Apa yang bisa dilakukan diktator untuk tetap mengontrol dan menjinakkan kaum

oposisi demokratis? Dengan perkataan lain, kesepakatan yang dicapai akan mencerminkan penilaian kedua belah pihak terhadap perimbangan kekuatan kedua pihak yang bertikai, dan dari sana kedua pihak memperhitungkan apa yang akan terjadi bila pecah pertarungan terbuka.

Perhatian mesti diarahkan pada butir-butir usulan yang dapat disetujui kedua pihak. Dalam negosiasi yang efektif sudah tentu ada kompromi, dan perbedaan-perbedaan dikesampingkan. Sehingga, kedua pihak memperoleh apa yang diinginkan, sambil membatalkan sebagian tuntutan-tuntutannya.

Dalam kasus diktator yang ekstrim, apa yang bisa ditawarkan kekuatan oposisi demokratis kepada diktator? Apa saja kemauan diktator layak diterima kekuatan oposisi demokratis? Apakah kaum oposisi demokratis bersedia memberikan peranan permanen yang konstitusional (baik berupa partai politik maupun junta militer) dalam pemerintahan mendatang kepada lawan? Jika jawabannya: ya, demokrasi macam apa itu?

Katakanlah perundingan dengan mulus. Pertanyaan berikutnya adalah, perdamaian macam apa yang diharapkan? Akankah hidup akan menjadi lebih baik atau buruk, jika kaum oposisi demokratis melanjutkan perlawanan ?

Diktator yang "Bisa Kita Terima"

Ada berbagai sebab, motif dan tujuan sehingga diktator memelihara dominasi mereka, mungkin kekuasaan, kedudukan, kekayaan, keinginan membentuk kembali masyarakat dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa kesemua hal itu tidak akan diperoleh jika mereka kehilangan kedudukannya. Karenanya, di meja perundingan mereka akan berupaya melindungi kepentingan-kepentingannya.

Apapun janji yang diucapkan diktator, ingatlah bahwa diktator bisa mengumbar janji apa saja untuk melunakkan perlawanan demokratis, dan mereka bisa mengingkarinya tanpa rasa malu sedikitpun.

Jika kaum oposisi demokratis bersepakat meredakan perlawanan untuk menghindari represi yang lebih keras, maka mereka akan kecewa dengan keputusan itu. Melunakkan perlawanan jarang sekali berbuah berkurangnya represi. Sekali kekuatan-kekuatan internal dan oposisi internasional tersingkir, diktator akan melanjutkan penindasan, lebih brutal ketimbang sebelumnya. Merosotnya perlawanan rakyat seringkali berakibat tergesernya kekuatan tandingan yang semula membatasi kendali dan kebrutalan diktator. Lalu tirani akan maju terus melindas apa saja yang menghalangi mereka. "Tiran hanya bisa merusak di saat kekuatan perlawanan kita melemah," tulis Krisnala Shridharani.⁵

Jika menyangkut isu-isu mendasar, perlawanan, bukan perundingan, adalah hal terpenting untuk menuju perubahan. Pada hampir semua kasus, perlawanan harus dilakukan untuk mengusir diktator. Keberhasilan tidaklah ditentukan oleh kesepakatan yang dicapai melalui perundingan, tetapi melalui perlawanan dengan cara yang tepat, berkesinambungan serta tangguh. Merupakan tugas kita untuk mengurai lebih rinci cara-cara pembangkangan politik atau perlawanan tanpa kekerasan sebagai cara yang paling ampuh bagi mereka yang memperjuangkan kebebasan.

5. Krisnalal Shridharyani, *War Without Violence : A study of Gandhi's Method and Its Accomplishments*. (New York: Harcourt Brace, 1939, dan cetak-ulang New York and London : Garland Publishing, 1972), hlm. 260.

Perdamaian Macam Apa?

Jika diktator dan kaum oposisi demokratis berbicara mengenai perdamaian menyeluruh, maka diperlukan pikiran jernih untuk memeriksa bahaya yang terkandung di dalamnya. Tidak semua orang yang menggunakan kata "perdamaian" menginginkan perdamaian yang disertai kebebasan dan keadilan. Berdamai dengan penindas yang brutal dan patuh terhadap diktator yang kejam, yang sudah melakukan kejahatan kepada ratusan ribu orang, bukanlah perdamaian sejati. Hitler seringkali menyerukan perdamaian, yang ia artikan sebagai penyerahan diri atas kemauannya. Perdamaian model diktator tidak lebih dari perdamaian di penjara atau liang kubur.

Selain masalah itu, masih ada bahaya lain. Juru runding yang baik kadang kala dibuat bingung akan ikhwal tujuan perundingan dan proses perundingan itu sendiri. Terlebih lagi jika penengah luar ikut membantu dalam proses perundingan. Karena keikut-sertaan mereka bisa diartikan sebagai legitimasi, baik dari dalam negeri maupun dari masyarakat internasional, kepada diktator yang semula ditolak karena mereka merampas kekuasaan negara, melanggar hak asasi manusia dan bertindak brutal. Padahal tanpa legitimasi yang itu, tidak mempunyai alasan lagi untuk terus berkuasa. Pejuang perdamaian tidak semestinya memberikan legitimasi itu.

Masih Ada Harapan

Seperti sudah digambarkan di atas, karena tidak melihat adanya harapan dalam perjuangan demokratisasi, pimpinan oposisi merasa terpaksa untuk berunding. Namun, perasaan tak berdaya itu mungkin untuk dapat diubah. Kediktatoran tidak pernah langgeng. Rakyat yang hidup di bawah kediktatoran tidak lemah seterusnya dan membiarkan

diktator terus berkuasa. Lama sebelum ini Aristoteles telah mencatat, ".. Oligarki dan tirani hidupnya lebih pendek ketimbang lembaga-lembaga lainnya ... Seluruhnya, tirani tidak akan berumur panjang."⁶ kediktatoran modern juga rapuh. Kelemahan mereka bisa digerogeti dan kekuasaan mereka bisa diguncang (dalam bab IV kita akan membahas hal ini lebih rinci).

Perjalanan sejarah modern telah menunjukkan kerapuhan diktator, sekaligus memperlihatkan bahwa mereka bisa runtuh hanya dalam waktu yang singkat. Dalam tempo sepuluh tahun, 1980 hingga 1990, kediktatoran komunis di Polandia dan Jerman Timur tumbang. Di Cekoslowakia tahun 1989 bahkan berlangsung hanya dalam beberapa minggu. Di El Salvador dan Guatemala, tahun 1944, perjuangan melawan diktator militer yang brutal membutuhkan waktu hampir dua minggu. Rezim militer Shah Iran yang begitu kuat runtuh hanya dalam beberapa bulan. Demikian juga dengan kediktatoran Marcos di Filipina tahun 1986. Amerika akhirnya mencampakkan Presiden Marcos ketika kekuatan oposisi semakin kuat. Usaha kudeta garis keras di Uni Sovyet, pada bulan Agustus 1991, dihadang oleh pembakang politik. Tak lama kemudian -hanya dalam hitungan hari, minggu atau bulan- negeri-negeri yang semula di bawah dominasinya memperoleh kembali kemerdekaan

Anggapan kuno bahwa kekerasan selalu merupakan jalan cepat, dan perjuangan tanpa-kekerasan menghabiskan banyak waktu, tidaklah benar. Memang dibutuhkan banyak waktu untuk mencapai perubahan situasi dan masyarakat,

6. Aristotle, *The Politics*, diterjemahkan oleh T. A. Sinclair (Harmondsworth, Middlesex, England and Baltimore, Maryland : Penguin Books 1876 [1962], Buku V, Bab 12, hlm. 231 dan 232.

namun pertarungan yang sebenarnya melawan kediktatoran kadang kala berlangsung cepat melalui perjuangan tanpa kekerasan.

Perundingan bukanlah satu-satunya alternatif bagi satu pihak untuk memenangkan pertempuran dan mengalahkan pihak lain. Contoh-contoh yang dikutip dalam Bab I memperlihatkan pilihan yang tersedia bagi mereka yang mencita-citakan perdamaian dan kebebasan melalui pembangkangan politik.

BAB III

DARI MANA DATANGNYA KEKUASAAN?

Menegakkan kebebasan melalui jalan damai sudah tentu tidak mudah. Tugas demikian membutuhkan kemampuan memainkan strategi, organisasi dan perencanaan. Syarat lain, ini yang terpenting, adalah kekuasaan. Mustahil menggulingkan diktator dan menegakkan kebebasan politik jika kaum demokrat tak mampu menggerakkan kekuatannya secara efektif.

Bagaimana caranya? Kekuatan apa sajakah yang mungkin dapat digalang oposisi demokratis untuk dapat menghancurkan kediktatoran beserta jaringan polisi dan militernya? Untuk mengetahui jawabannya kita perlu mengkaji sebuah salah-pendapat tentang kekuasaan politik. Tidak sukar untuk memahaminya. Karena kebenaran seringkali demikian sederhananya.

Kisah "Si Tuan Monyet"

Pendongeng Cina abad ke-14 Liu-Ji dengan amat jelas

menggambarkan⁷ bagaimana orang salah-memahami kekuasaan politik:

"Di negeri feodal Chu, hiduplah seorang tua yang mempertahankan hidup dengan memelihara monyet-monyet sebagai budak. Orang Chu memanggilnya 'ju gong', si Tuan Monyet.

Setiap pagi, orang tua itu mengumpulkan monyet-monyetnya di halaman depan rumah dan memerintahkan monyet tertua memimpin yang lain pergi ke gunung mengumpulkan buah-buahan dari semak-semak dan pepohonan. Sudah ditetapkan aturan agar setiap monyet harus menyerahkan sepersepuluh perolehannya kepada orang tua itu. Yang gagal diganjar hukuman. Semua monyet menderita, tetapi tidak satupun berani mengeluh.

Suatu hari, seekor monyet kecil bertanya kepada monyet-monyet yang lainnya: 'Si tua itu kah yang menanam semua pohon dan semak-semak?' Jawab yang lain: 'Bukan, buah-buahan itu tumbuh dengan sendirinya.' Monyet kecil itu bertanya lebih jauh: 'Tidak bisakah kita mengambil buah tanpa seizin orang tua itu?' Yang lain menyahut: 'Ya, kita bisa.' Monyet kecil itu meneruskan: 'Lantas mengapa kita mesti tergantung kepada orang tua itu, mengapa kita mesti melayani dia?'

Sebelum monyet kecil itu menyelesaikan omongannya, semua monyet yang lainnya tiba-tiba tersadar dan bangkit.

Pada malam itu juga saat si tua tertidur monyet-monyet mulai membongkar pagar-pagar yang mengurung mereka

7. Kisah ini aslinya berjudul "Rule of Tricks" dari Yu-li-Zi yang ditulis Liu Ji (1311-1375) yang diterjemahkan oleh Sidney Tai, hak cipta dilindungi oleh UU. Yu-li-Zi adalah nama samaran Liu Ji. Terjemahan asli terbit dalam *Nonviolent Sanctions : News from the Albert Einstein Institution* (Cambridge, Mass.) Vol. IV, No.3 (Musim semi 1992 - 1993), hlm.3.

dan menghancurkannya. Monyet-monyet itu juga mengambil buah-buahan yang disimpan di gudang dan membawanya ke hutan. Mereka tak pernah kembali. Si Orang Tua akhirnya mati kelaparan.

Yu Li-zi mengatakan, "Banyak penguasa memerintah rakyat dengan tipu muslihat, bukan dengan prinsip-prinsip yang benar. Setali tiga uang dengan si Tuan Monyet. Mereka khilaf dengan kepicikan pikiran mereka sendiri. Ketika rakyatnya tersadarkan, segala tipu-daya mereka tidak berguna lagi."

Sumber-sumber yang Diperlukan untuk Menegakkan Kekuatan Politik

Dari mana datangnya kekuasaan politik? Prinsipnya sederhana saja: diktator membutuhkan dukungan dari rakyat yang diperintah. Tanpa dukungan itu diktator tidak akan sanggup mengamankan dan mempertahankan sumber-sumber politik.

Sumber-sumber kekuasaan politik meliputi :

- Otoritas : yaitu, kepercayaan di kalangan rakyat bahwa rezim ini adalah absah sehingga rakyat berkewajiban moral untuk mematuhi;
- Sumber daya manusia : jumlah dan posisi penting orang atau kelompok yang patuh, bekerjasama atau memberikan dukungan kepada penguasa;
- Keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan rezim guna melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Kebutuhan ini dipasok oleh orang dan kelompok yang bersedia bekerjasama.
- Faktor-faktor tak kasat mata : yakni faktor-faktor psikologis dan ideologis yang mendorong orang untuk patuh dan menyokong penguasa;

- Sumber daya material : sejauh mana penguasa mengendalikan atau memiliki akses terhadap properti, sumber-daya alam, sumber keuangan, sistem ekonomi dan sarana komunikasi, dan transportasi, dan;
- Sanksi, hukuman, ancaman terhadap lawan atau pembangkang dan mereka yang tidak mau bekerjasama untuk memaksakan kepatuhan dan kerja sama yang dibutuhkan rezim untuk tetap hidup dan menjalankan kebijaksanaannya.

Akan tetapi, selain semua sumber di atas, semuanya tetap bergantung pada mandat yang diterima rezim, kepasrahan dan kepatuhan warga negara, kerjasama dari perorangan yang tak terhitung jumlahnya serta lembaga-lembaga masyarakat. Tidak ada jaminan semua hal itu dapat diperoleh.

Kerjasama penuh, kepatuhan dan dukungan rakyat akan semakin menjamin tersedianya sumber-sumber kekuasaan yang dibutuhkan, dan dengan demikian akhirnya memperluas daya kekuasaan pemerintah.

Sebaliknya, penarikan dukungan rakyat dan lembaga-lembaga masyarakat kepada pihak agresor dan diktator, akan mengikis atau memangkas sumber-sumber kekuasaan yang dibutuhkan penguasa. Tanpa sumber-sumber kekuasaan itu, penguasa akan lumpuh dan akhirnya ambruk.

Secara alamiah diktator sangat peka terhadap segala tindakan dan gagasan yang membatasi keleluasaan mereka untuk berbuat sekehendak hati. Oleh karenanya, diktator biasa mengancam dan menghukum mereka yang membangkang, mogok atau tidak sudi bekerjasama. Tetapi cerita tidak berakhir hanya sampai di sini. Represi, bahkan dengan cara-cara brutal tidak selalu berhasil mengembalikan kepatuhan dan kerjasama hingga ke taraf tertentu agar suatu rezim tetap dapat berkuasa.

Apabila –di bawah kondisi represi– sumber-sumber kekuasaan bisa dibatasi atau dipangkas dalam waktu yang cukup lama, akan tampak gejala-gejala awal berupa ketidak-tentuan dan kebingungan dalam tubuh rezim. Biasanya situasi ini diikuti dengan memudarnya kekuasaan kediktatoran. Seiring waktu berjalan, penolakan untuk menyerahkan sumber-sumber kekuasaan ini akan membuat rezim lumpuh, tak berdaya dan – pada keadaan yang parah – runtuh. Kekuasaan politik diktator cepat atau lambat akan punah akibat kebangkrutan politik.

Luas sempitnya ruang kebebasan, kuat lemahnya tirani sebagian besar ditentukan oleh keteguhan dari mereka yang menghendaki kebebasan, ditambah kemauan dan kesanggupan mereka untuk melawan penindasan.

Bertentangan dengan pendapat umum, kediktatoran totaliter sekalipun akan sangat tergantung pada warga negara dan masyarakat yang mereka kuasai. Seperti yang pernah ditulis pakar ilmu politik Karl W. Deutsch tahun 1953.

Kekuasaan totaliter hanya akan menjadi kuat jika ia tidak sering digunakan. Kekuasaan totaliter yang digunakan setiap waktu terhadap semua warga negara mustahil menjadi kuat. Karena dibanding model pemerintahan lainnya, rezim totaliter selalu membutuhkan kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur orang-orangnya. Rezim seperti ini memerlukan dukungan kepatuhan yang meluas dan kuat dari rakyatnya. Lebih dari itu, mereka juga harus meraih dukungan aktif, sekurang-kurangnya dari lapisan-lapisan penting dalam masyarakat.⁸

8. Karl W. Deutsch, "*Cracks in the Monolith*," dalam Carl J. Friedrich, ed., *Totalitarianism* (Cambridge, Mass. : Harvard University press, 1954), hlm. 313-314.

Teoritis hukum Inggris abad 19 John Austin menggambarkan situasi ketika sebuah kediktatoran tengah menghadapi pembelotan rakyat. Austin mengatakan, jika sebagian besar warga negara sudah memutuskan untuk menolak suatu pemerintahan dan mau menanggung represi demi penolakan tersebut, maka seluruh kekuatan pemerintahan -termasuk para pendukungnya- tidak akan mampu mempertahankan pemerintahan yang dibenci rakyat itu, sekalipun mereka mendapat sokongan dari kekuatan asing. Rakyat yang melawan tidak bisa dipaksa untuk patuh dan tunduk selamanya, demikian Austin.⁹

Jauh sebelumnya, Niccolo Machiavelli sudah mengatakan bahwa "sang pangeran" yang memusuhi masyarakat secara keseluruhan tidak akan pernah hidup tenteram; semakin kejam rezim, maka semakin lemah rezim itu.¹⁰

Kebenaran pandangan ini adalah realitas politik dibuktikan para pejuang Norwegia yang menentang pendudukan Nazi, sebagaimana dikutip dalam Bab I, atau dalam perlawanan gagah-berani rakyat Polandia, Jerman, Ceko dan Slowakia, dan banyak lagi contoh perlawanan terhadap agresi komunis dan kediktatoran, yang akhirnya memberi andil bagi runtuhnya komunisme di Eropa. Sebenarnya ini bukanlah fenomena baru. Pengalaman perjuangan tanpa-kekerasan bisa dilacak ke belakang hingga tahun 494 SM, ketika budak-budak Plebia membelot dari majikan Romawinya.¹¹ Per-

9. John Austin, *Lectures on Jurisprudence or the philosophy of Positive Law* (edisi lima, revisi dan penyuntingan oleh Robert Campbell, 2 volume, London : John Murray, 1911 [1861], volume I, hlm. 296.

10. Niccolo Machiavelli, "The Discourses on the First Ten Books of Livy" dalam *Discourses of Niccolo Machiavelli* (London : Routledge and Kegan Paul, 1950), volume I, hlm. 254.

11. Lihat Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action* (Boston : Poster Sargent, 1973), hlm. 75 dan seterusnya untuk contoh-contoh sejarah.

juangan tanpa-kekerasan sudah berlangsung pada berbagai zaman di Asia, Afrika, Amerika, Australia, kepulauan Pasifik dan juga Eropa.

Ada tiga faktor penting yang menentukan apakah kekuasaan pemerintah akan terkendali atau tidak terkendali, yaitu : (1) keinginan warga negara untuk membatasi kekuasaan pemerintah; (2) penolakan organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat untuk menyerahkan sumber-sumber kekuasaan, dan; (3) kemampuan warga masyarakat untuk melakukan pembangkangan.

Pusat-pusat dari Kekuatan Demokratis

Salah satu ciri masyarakat demokratis adalah terdapatnya lembaga-lembaga masyarakat dan kelompok non-pemerintah yang mandiri. Ini meliputi keluarga, organisasi agama, perhimpunan kebudayaan, klub olahraga lembaga ekonomi, serikat buruh, himpunan mahasiswa, partai politik, dusun, rukun tetangga, klub berkebun, organisasi hak azasi manusia, kelompok musik, perkumpulan sastra dan lain-lain. Badan-badan ini sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok itu sendiri dan juga mendorong terpenuhnya kebutuhan sosial.

Badan-badan ini memiliki arti politik yang sangat penting. Badan-badan ini memberikan landasan/basis kelompok dan kelembagaan yang memungkinkan peran warga masyarakat dalam memilih arah yang dituju masyarakat. Juga untuk melawan kelompok-kelompok atau pemerintah yang secara curang berniat ingin menjegal kepentingan, kegiatan atau tujuan-tujuan masyarakat. Perorangan yang terpecah-pecah yang tidak tergalang dalam kelompok-kelompok seperti itu umumnya tidak memiliki dampak besar terhadap masyarakat luas; lebih kecil lagi dampaknya terhadap pemerintahan, apalagi terhadap kediktatoran.

Oleh karenanya, jika kemandirian dan kebebasan badan-badan semacam itu sudah berada dalam genggaman diktator, masyarakat menjadi tidak berdaya. Jika lembaga-lembaga ini dikendalikan pemerintah pusat atau digantikan oleh lembaga baru, maka organisasi atau lembaga masyarakat itu dapat digunakan untuk mengendalikan individu anggotanya juga seluruh anggota masyarakat.

Bila otonomi dan kebebasan lembaga-lembaga sipil ini bisa dipertahankan atau direbut kembali (agar lepas dari kendali pemerintah), lembaga-lembaga sivil tersebut akan sangat penting artinya bagi perlawanan politik. Dari contoh-contoh dapat ditarik gambaran umum bahwa rezim diktator niscaya jatuh atau melemah bila berhasil dibangun perlawanan politik massa yang berani dari lembaga masyarakat berserta warga negaranya.

Sebagaimana sudah diutarakan, pusat-pusat kekuasaan tersebut menyediakan basis kelembagaan bagi warga masyarakat agar dapat melancarkan tekanan atau melawan kontrol rezim. Di kemudian hari, pusat-pusat kekuasaan tersebut akan menjadi landasan struktural yang tak tergantikan untuk membangun masyarakat bebas. Jadi, kemandirian dan pertumbuhan lembaga-lembaga sipil tersebut, merupakan syarat keberhasilan dari perjuangan pembebasan.

Jika kediktatoran berhasil melumpuhkan atau mengendalikan badan-badan independen masyarakat, maka tugas kaum pembangkang adalah membentuk kelompok dan lembaga-lembaga sosial independen yang baru. Atau merebut kembali badan-badan yang telah sepenuhnya atau sebagian dikendalikan pemerintah. Saat revolusi Hungaria 1956-1957, sejumlah dewan demokrasi bermunculan, bahkan mereka dalam beberapa minggu bergabung untuk membentuk lembaga dan pemerintahan dengan sistem federatif. Di Polandia selama akhir tahun 1980 kaum buruh berhasil

mempertahankan serikat buruh bawah tanah Solidaritas, pada sebagian kasus mereka mengambil alih jabatan-jabatan serikat buruh yang didominasi oleh komunis. Pertumbuhan lembaga-lembaga seperti itu memiliki dampak politik yang sangat penting.

Sudah barang tentu tak tersedia satu cara mudah pun untuk melemahkan dan menghancurkan kediktatoran, dan tidak setiap upaya akan berhasil. Demi perjuangan ini jatuhnya korban adalah tak terhindarkan, karena para pendukung kediktatoran tentu akan melancarkan tindakan balasan untuk memaksa segenap masyarakat tetap patuh dan bekerjasama.

Pandangan-pandangan mengenai kekuasaan yang telah digambarkan tadi memperlihatkan bahwa runtuhnya suatu kediktatoran adalah sesuatu yang mungkin. Kediktatoran memiliki suatu ciri khusus, yakni mudah digoyah pembangkang politik yang dirancang dengan cakap. Kita akan mengkaji ciri-ciri hingga ke seluk-beluknya.

BAB IV

DIKTATOR MEMILIKI KELEMAHAN

Kediktatoran seringkali tampak tak tergoyahkan. Segelintir penguasa kuat mengendalikan badan-badan intelijen, polisi, satuan-satuan militer, penjara, kamp konsentrasi dan regu-regu tembak. Mereka mengambil paksa sumber-sumber keuangan, sumber daya alam dan kemampuan produksi untuk menyokong kemauannya.

Sebaliknya dengan kaum oposisi. Umumnya tampak lemah, tidak efektif dan tak berdaya. Anggapan keliru bahwa yang sedang berlangsung adalah pertempuran antara si kuat lawan si lemah menyebabkan oposisi yang tangguh sukar digalang.

Menemukan Tumit Achilles

Ada sebuah mitos Yunani klasik yang dengan gamblang memperlihatkan bahwa sesuatu yang tampaknya kuat selalu memiliki titik lemah. Tak sebuah senjata pun dapat melukai Achilles dan tak sebuah pedangpun mampu menggores kulitnya.

Alkisah, ketika masih bayi Ibu Achilles memandikan bayinya ke dalam air mukjizat sungai Styx hingga seluruh badannya terlindungi. Bayi itu dipegang tumitnya ketika dimandikan. Karenanya tumit Achilles tidak ikut terbasuh, air suci tidak menutupi bagian tersebut. Sesudah Achilles tumbuh dewasa ia kebal terhadap segala macam senjata musuh. Namun demikian dalam suatu pertempuran melawan Troya, seseorang mengetahui kelemahan itu membidikkan panah ke tumit Achilles yang terbuka. Dengan sekali hunjam Achilles terluka. Serangan ternyata itu mematikan. Sampai sekarang istilah tumit Achilles merujuk kepada titik lemah seseorang, atau suatu rencana atau lembaga yang jika diserang maka ia tak terselamatkan lagi.

Prinsip yang sama juga dapat diterapkan untuk menghadapi kediktatoran yang kejam. Jika kelemahan mereka dapat diketahui dan diarahkan serangan ke titik tersebut, melalui cara yang paling cepat dan dengan biaya yang paling minim kediktatoran akan terkalahkan.

Titik Lemah Kediktatoran

Kelemahan-kelemahan kediktatoran antara lain adalah:

1. Kerjasama dengan sedemikian banyak orang, kelompok dan lembaga mutlak diperlukan untuk menjalankan sebuah sistem; sementara kesediaan bekerjasama mungkin berkurang atau ditarik kembali.
2. Syarat-syarat dan dampak-dampak dari kebijakan rezim sebelumnya akan membatasi kemampuan rezim untuk mengambil dan melaksanakan kebijaksanaan yang bertolak-belakang.
3. Sistem akan berjalan rutin, sehingga kurang luwes menyesuaikan diri dengan cepat terhadap situasi baru.
4. Personil dan sumber daya yang telah teralokasikan untuk

- tugas-tugas yang sudah ada sukar dialihkan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan baru.
5. Bawahan takut mengecewakan atasan dan biasanya memberikan laporan yang tidak akurat atau informasi yang tidak lengkap (ABS); padahal laporan yang benar dibutuhkan rezim untuk mengambil keputusan.
 6. Ideologi meluntur, kepercayaan terhadap mitos serta simbol sistem akan menjadi memudar.
 7. Ideologi yang merasuk kuat akan mempengaruhi pandangan seseorang terhadap kenyataan, maka keyakinan yang buta terhadap ideologi berakibat diabaikannya kondisi-kondisi dan kebutuhan-kebutuhan baru.
 8. Efisiensi dan kompetensi birokrasi terus merosot, atau kontrol serta regulasi yang berlebih-lebihan, menyebabkan kebijakan dan pelaksanaannya menjadi tidak efektif.
 9. Konflik internal kelembagaan, persaingan dan permusuhan pribadi akan mengganggu bahkan memperlemah jalannya sistem kediktatoran.
 10. Kaum intelektual dan mahasiswa gusar oleh pembatasan-pembatasan, doktrinalisme, dan represi oleh rezim.
 11. Masyarakat umum menjadi apatis, skeptis dan bahkan membenci serta memusuhi rezim.
 12. Kesenjangan antar klas, budaya, suku dan kawasan makin lebar.
 13. Hirarki kekuasaan kediktatoran senantiasa mudah goyah dan pada saat-saat tertentu sangat rapuh. Terjadi pencopotan dan pengangkatan orang-orang baru dalam jajaran rezim.
 14. Satuan-satuan polisi dan militer berupaya mencapai tujuannya sendiri, seandainya terjadi perbenturan kepentingan dengan diktator, mereka mungkin saja meng-

gunakan cara kudeta.

15. Rezim diktator yang baru berdiri membutuhkan waktu untuk /menyusun kekuatan.
16. Banyak keputusan penting dibuat cuma oleh segelintir orang dalam jajaran kediktatoran; sehingga lazim terjadi salah-penilaian, salah menentukan kebijaksanaan juga salah mengambil tindakan.
17. Jika rezim berusaha menghindari bahaya dan kelemahan-kelemahan ini dan berusaha mendesentralisasikan wewenang dan kendalinya, maka kendali atas kekuasaan pusat akan merosot dengan cepat.

Membidik Titik Lemah Kediktatoran

Dengan mengenali kelemahan-kelemahan yang melekat dalam tubuh rezim, maka oposisi demokrat bisa menyerang "tumit Achilles" untuk mengguncang keras atau meruntuhkannya.

Kesimpulannya jelas: di samping penampakan yang kokoh semua kediktatoran mengidap kelemahan, inefisiensi internal, persaingan pribadi, inefisiensi kelembagaan dan konflik antar departemen atau antar lembaga. Kelemahan-kelemahan ini cenderung membuat rezim kurang efektif, lebih rentan terhadap kondisi yang berubah-ubah serta perlawanan oposisi. Tidak semua rezim mampu mengatasi masalah ini secara tuntas. Hitler misalnya pernah memberi perintah-perintah yang kemudian dipotong bawahan di dalam hirarki yang menolak untuk melaksanakannya. Rezim kediktatorial acap kali runtuh lebih cepat dari yang diduga semula.

Tidak berarti bahwa kediktatoran dapat dikalahkan tanpa risiko dan korban. Setiap tindakan untuk mencapai pembebasan mengandung risiko dan penderitaan juga mem-

butuhkan waktu. Sudah barang tentu, tidak ada cara-cara yang menjamin keberhasilan segera pada semua situasi. Namun demikian, perjuangan yang dibidikkan pada titik-titik kelemahan rezim memiliki peluang lebih besar ketimbang perlawanan yang diarahkan pada titik-titik kekuatan rezim. Pertanyaannya kini: bagaimana cara melancarkan perjuangan seperti itu?

BAB V

MENGUJI KEKUATAN

Pada Bab I kita telah membahas bahwa perlawanan bersenjata melawan kediktatoran adalah perlawanan yang tidak terarah pada titik terlemah, malah titik terkuat lawan. Dengan berada di arena yang mengandalkan satuan-satuan militer, pasokan persenjataan, teknologi persenjataan dan semacamnya, gerakan perlawanan sudah menempatkan diri pada posisi yang tidak menguntungkan. Diktator akan selalu memiliki keunggulan sumberdaya di arena ini. Bahaya menyandarkan diri pada kekuatan asing juga telah dijelaskan di muka. Pada Bab II kita telah mengupas masalah-masalah yang timbul jika kita mengandalkan perundingan sebagai jalan untuk mengakhiri kediktatoran.

Sarana atau cara apa yang paling menguntungkan perlawanan kelompok demokratis dan lebih ampuh untuk menggerus titik kelemahan kediktatoran? Teknik macam apa yang sesuai dengan teori kekuasaan politik yang telah kita diskusikan pada Bab III ? Pilihan yang tersedia adalah pembangkangan politik.

Pembangkangan politik mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut :

- Tidak menggubris penyelesaian yang diambil melalui cara-cara yang dipilih pihak kediktatoran.
- Sulit dibasmi.
- Dengan cara yang unik bisa menggerogoti titik kelemahan kediktatoran dan memangkas sumber-sumber kekuatannya.
- Bisa melakukan aksi tersebar tetapi juga bisa berkonsentrasi pada sasaran tertentu.
- Bisa mengecoh diktator sehingga salah-menilai dan salah-bertindak.
- Efektif menggalang keseluruhan rakyat dan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga masyarakat ikut serta dalam perjuangan mengakhiri dominasi brutal oleh segelintir orang.
- Membantu pemerataan kekuasaan dalam masyarakat dan pada gilirannya membantu membentuk dan memelihara masyarakat demokratis.

Cara Kerja Perjuangan Tanpa Kekerasan

Seperti juga kemampuan militer, pembangkangan politik dapat juga diterapkan untuk bermacam tujuan, mulai dari mempengaruhi musuh agar bertindak lain, menyiapkan keadaan untuk penyelesaian konflik secara damai hingga untuk melumpuhkan musuh. Akan tetapi pembangkangan politik berlainan cara kerjanya dengan metode kekerasan. Sekalipun kedua teknik tersebut sama-sama ditujukan untuk melancarkan perlawanan, tapi keduanya bekerja dengan cara berlainan dan dengan akibat-akibat yang berbeda. Cara dan hasil dari aksi kekerasan sudah banyak kita ketahui. Pada cara itu, senjata fisik digunakan untuk mengintimidasi,

melukai, membunuh dan membinasakan.

Perjuangan tanpa kekerasan bekerja lebih rumit dan beragam daripada perjuangan dengan kekerasan. Ia lebih merupakan perjuangan dengan senjata psikologis, sosial, ekonomi, dan politik yang dilancarkan warga dan lembaga-lembaga masyarakat. Cara-cara begini dikenal dengan berbagai nama seperti protes, pemogokan, non kooperasi, boikot, unjuk-rasa dan perlawanan rakyat.

Sebagaimana sudah dibahas, semua pemerintah hanya bisa tegak berdiri sepanjang mereka menguasai sumber-sumber kekuasaan yang diperlukan, yang diperoleh melalui kooperasi, penyerahan, kepatuhan penduduk dan lembaga masyarakat. Pembangkangan politik, tidak seperti halnya cara kekerasan, uniknyanya sesuai benar untuk menggerogoti sumber-sumber kekuasaan.

Perlawanan Tanpa Kekerasan dan Memelihara Disiplin

Kesalahan umum di masa lalu dalam kampanye perlawanan politik yang sudah-sudah adalah mengandalkan hanya pada satu atau dua metode saja, seperti pemogokan atau demonstrasi massa. Sebenarnya tersedia berbagai metode lain yang memungkinkan para perencana perlawanan untuk menyebarkan atau memusatkan kekuatan mereka sesuai dengan kebutuhan.

Sekitar dua ratus metode khusus aksi-aksi tanpa kekerasan telah diidentifikasi. Jumlah sebenarnya, lebih dari dua ratus. Metode perlawanan ini dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar: protes dan persuasi, non-kooperasi dan intervensi. Metode protes dan persuasi tanpa kekerasan terutama adalah demonstrasi simbolik, termasuk parade, pawai dan apel siaga (54 metode). Non-kooperasi terbagi dalam tiga kelompok : (a) non-kooperasi sosial (16 metode), (b) non-kooperasi ekonomi,

termasuk boikot (26 metode) dan pemogokan (23 metode), dan (c) non-kooperasi politik (38 metode). Intervensi tanpa kekerasan, dengan cara psikologis, fisik, sosial, ekonomi atau politik seperti, puasa, pendudukan tanpa kekerasan dan pemerintahan tandingan (41 metode). Sebuah daftar berisi 198 metode dapat ditemukan pada lampiran buku ini.

Penggunaan berbagai metode tersebut yang dipilih seksama, dilancarkan terus menerus dalam skala besar, dalam kerangka strategi yang benar dan taktik yang jitu, oleh warga sipil yang terlatih akan menyebabkan masalah besar bagi rezim yang kekuasaannya tidak sah. Hal ini berlaku bagi kediktatoran manapun.

Berlawanan dengan cara-cara militer, metode perjuangan tanpa kekerasan bisa langsung memusat pada masalah-masalah mendasar. Misalnya, karena isu kediktatoran tiada lain adalah isu politik maka bentuk-bentuk perjuangan politik tanpa kekerasan menjadi amat penting. Perlawanan ini adalah penolakan keabsahan kekuasaan diktator dan merupakan aksi-aksi non-kooperasi terhadap rezim. Non-kooperasi juga diterapkan terhadap kebijakan-kebijakan khusus. Pada saatnya, penolakan perintah dan memperlambat kerja perlu juga diterapkan secara diam-diam dan rahasia. Sedangkan pada saat yang lain pembangkangan terbuka dan perlawanan demonstrasi publik dan mogok juga bisa dilakukan secara terang-terangan.

Sementara, bila tekanan ekonomi merupakan titik lemah atau jika kegelisahan rakyat terutama menyangkut masalah ekonomi, tindakan-tindakan seperti boikot atau mogok dapat menjadi metode perlawanan yang cocok. Upaya-upaya diktator untuk menyedot sistem ekonomi dapat dihadapi dengan pemogokan umum di tempat-tempat tertentu, aksi bekerja bermalas-malasan yang dilakukan sejumlah ahli yang tak tergantikan. Penerapan secara selektif berbagai tipe pemogokan di sejumlah tempat penting – industri pengolahan,

transportasi, pemasokan bahan baku dan distribusi bahan-bahan pangan pokok — perlu dilakukan.

Beberapa metode perjuangan tanpa-kekerasan mengharuskan rakyat menjalankan aksi yang tak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka seperti menyebarkan pamflet, mengurus pers/penerbitan alternatif, ikut mogok makan, atau aksi duduk-duduk di jalan. Metode seperti ini mungkin sulit bagi sebagian orang kecuali dalam keadaan yang sangat ekstrim.

Masih ada metode-metode lain, meskipun caranya sedikit berbeda, untuk melancarkan perlawanan tanpa-kekerasan sambil tetap menjalankan hidup seperti biasa. Misalnya dengan tetap bekerja, bukan mogok, tetapi lalu dengan sengaja berlambat-lambat dan tidak efisien ketimbang biasanya. Sengaja sering melakukan "kesalahan", atau jatuh "sakit" dan "tak mampu" bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Atau malah sama sekali menolak untuk bekerja. Orang dapat pula mengaitkan ibadah dengan perlawanan politik, bukan hanya untuk alasan keagamaan. Untuk melindungi anak-anak dari propaganda musuh orang tua dapat mendidik anak di rumah atau mengirim mereka ke sekolah gelap. Cara lain adalah menolak kewajiban untuk memasuki organisasi "resmi" tertentu yang tidak disukai. Kesemua tipe aksi ini amat dekat dengan kegiatan sehari-hari, sehingga tanpa banyak mengorbankan kehidupan normal, lebih banyak orang berkesempatan untuk berperan-serta dalam perjuangan pembebasan nasional.

Perjuangan tanpa-kekerasan bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dengan metoda kekerasan, karenanya perlawanan dengan kekerasan dalam pembangkangan politik merupakan tindakan kontra-produktif, karena konflik akan bergeser ke titik yang memberi keuntungan pada diktator

(perang militer). Disiplin adalah kunci keberhasilan dan harus dipertahankan di tengah-tengah provokasi dan kebrutalan diktator dan antek-anteknya.

Memelihara disiplin tanpa-kekerasan melawan musuh-musuh yang menggunakan kekerasan berarti melancarkan jalan bagi bekerjanya empat mekanisme perubahan dalam perjuangan tanpa kekerasan (akan didiskusikan). Disiplin tanpa-kekerasan juga penting dalam proses adu silat politik. Perlawanan tanpa kekerasan niscaya akan memerosotkan posisi politik diktator, menimbulkan kericuhan di jajaran mereka sendiri juga membangkitkan dukungan masyarakat luas, mantan-mantan pendukung rezim serta pihak ketiga.

Namun dalam sejumlah kasus, kekerasan dalam skala terbatas terhadap kediktatoran mungkin tak tertahankan lagi; karena frustrasi dan kebencian terhadap rezim mudah tergelincir menjadi aksi kekerasan. Atau kelompok-kelompok tertentu tak bersedia meninggalkan cara-cara kekerasan sekalipun mereka mengakui pentingnya perjuangan tanpa kekerasan. Pada kasus seperti itu, pembangkangan politik tidak perlu ditanggalkan. Namun adalah perlu memisahkan aksi-aksi kekerasan sejauh mungkin dengan aksi-aksi tanpa kekerasan. Hal itu mesti dikelola dengan mempertimbangkan perbedaan letak geografis, kelompok masyarakat, waktu dan isu-isunya. Jika tidak maka kekerasan akan berdampak merusak pembangkangan politik, cara yang sebenarnya lebih ampuh dan lebih memberikan jaminan kemenangan.

Catatan sejarah memperlihatkan bahwa dalam pembangkangan politik, korban yang mati dan luka parah tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi jumlah korban yang jatuh tetap lebih kecil dibandingkan perang bersenjata. Lebih jauh lagi, tipe perjuangan semacam ini akan memutus lingkaran setan saling melakukan pembunuhan dan kebrutalan.

Perjuangan tanpa-kekerasan memerlukan keberanian dan

cenderung meredakan (atau menjinakkan) perasaan takut kepada pemerintah dan represi kekerasannya. Rasa takut yang sudah terkikis atau terkendali adalah unsur kunci untuk menghancurkan kekuasaan diktator atas warga masyarakat.

Keterbukaan, Kerahasiaan, Menetapkan Standard yang Ketat

Keberhasilan, tipu muslihat dan komplotan bawah tanah merupakan masalah bagi gerakan yang menggunakan aksi-aksi tanpa kekerasan. Seringkali mustahil untuk menyembunyikan maksud dan rencana-rencana gerakan-gerakan perlawanan dari mata polisi politik dan agen dinas rahasia. Dilihat dari perspektif gerakan, kerahasiaan tidak saja berakar pada ketakutan tetapi juga menyuburkan ketakutan sehingga menciutkan semangat perlawanan dan menurunkan jumlah orang yang terlibat dalam aksi. Juga mungkin menimbulkan saling curiga dan saling tuduh, acap kali tanpa bukti, mengenai siapa gerangan yang menjadi informan atau agen musuh. Kerahasiaan juga melemahkan kemampuan suatu gerakan untuk terus mempertahankan perlawanan tanpa kekerasan. Keterbukaan mengenai maksud dan rencana, tidak saja memiliki efek sebaliknya tetapi juga memberikan kesan bahwa gerakan perlawanan ini pada kenyataannya sudah sangat kuat. Masalahnya tentu lebih rumit daripada yang digambarkan di sini dan lagi beberapa aspek penting perlawanan mungkin memang membutuhkan kerahasiaan. Penilaian yang baik dibutuhkan mereka yang mengenal baik dinamika perjuangan tanpa-kekerasan dan memahami bagaimana cara diktator melakukan pengawasan pada situasi-situasi khusus.

Proses menyunting, mencetak dan menyebarkan publikasi bawah tanah, penyiaran radio gelap dari dalam negeri dan pengumpulan data-data intelijen mengenai operasi diktator adalah beberapa jenis kegiatan terbatas yang membutuhkan kerahasiaan tingkat tinggi.

Menjaga standar perilaku yang ketat dalam aksi tanpa kekerasan pada kesemua tahap konflik adalah sangat perlu. Faktor lain yang senantiasa dibutuhkan adalah: tiada rasa takut dan tetap berdisiplin dalam menjalankan aksi tanpa kekerasan. Perlu pula untuk diingat bahwa keikut-sertaan lebih banyak orang dalam aksi-aksi akan menghasilkan perubahan yang khusus pula. Tetapi, jumlah yang besar itu akan menjadi pendukung setia hanya bila disiplin gerakan terpelihara baik.

Pergeseran Hubungan dalam Kekuasaan

Pembangkangan politik berlangsung dalam arena yang terus berubah-ubah, dengan permainan tarik-ulur yang tak henti-hentinya. Tidak ada yang statis, hubungan kekuasaan bisa absolut dan relatif, terus berubah dan perubahan dapat berlangsung cepat. Semuanya mungkin, sepanjang oposisi terus melancarkan perlawanan tanpa kekerasan di tengah represi yang dihadapi.

Dibandingkan konflik dengan kekerasan, dalam konflik seperti ini, kekuatan masing-masing pihak yang bertikai akan lebih beragam. Berlangsung lebih cepat dan lebih beraneka, secara politik pun memiliki akibat-akibat yang lebih berarti. Karena berbagai keragaman itu, aksi-aksi tertentu oleh kaum gerakan memiliki konsekuensi jauh melampaui ruang dan waktu dimana konflik berlangsung. Efek ini akan berdampak memperkuat atau memperlemah satu atau lain kelompok.

Ketimbang dengan cara konflik bersenjata, dampak kelompok-kelompok tanpa-kekerasan dengan aksi-aksinya akan lebih luas terhadap kekuatan relatif kelompok-kelompok musuh. Perlawanan tanpa kekerasan yang berani menentang kebrutalan, misalnya, akan menimbulkan kebingungan, ketidak-percayaan, dan dalam situasi ekstrim, pembelotan di jajaran tentara dan warga negara. Perlawanan ini juga akan

mengundang kecaman internasional yang makin deras terhadap kediktatoran. Pembangkangan politik yang berdisiplin, terlatih dan cakap akan menarik keikut-sertaan lebih banyak orang yang dalam situasi normal mendukung diktator atau mereka yang biasanya di tengah konflik memilih untuk tidak memihak.

Empat Jalan Menuju Perubahan

Perjuangan tanpa-kekerasan akan menghasilkan perubahan melalui empat cara. Mekanisme pertama adalah yang paling kecil kemungkinannya, meskipun pernah terjadi. Mekanisme ini terjadi ketika sebagian kelompok musuh tergerak hatinya oleh penderitaan dari pembangkang tanpa-kekerasan yang bertindak berani, atau kelompok itu secara rasional bisa diyakinkan bahwa hal yang diperjuangkan kelompok oposisi adalah sesuatu yang adil, sehingga mereka menyetujui tujuan-tujuan kelompok oposisi. Mekanisme ini disebut konversi. Kasus konversi dalam aksi-aksi tanpa-kekerasan ada kalanya terjadi meski jarang dan dalam sebagian besar konflik mekanisme ini sama sekali tidak terjadi atau berlangsung dalam skala yang tidak berarti.

Yang lebih sering terjadi, perjuangan tanpa-kekerasan mengubah situasi konflik dan masyarakat sedemikian rupa hingga musuh tidak bisa berbuat sekehendaknya. Perubahan inilah yang menghasilkan tiga mekanisme yang lain: akomodasi, koersi tanpa kekerasan dan keruntuhan. Mekanisme mana yang akan bekerja tergantung kepada derajat kekuatan relatif dan absolut yang beralih ke pihak kaum demokrat.

Jika isu yang dikedepankan bukan isu mendasar, tuntutan oposisi melalui kampanye terbatas tidak akan dianggap sebagai ancaman, adu pengaruh dalam batas tertentu akan mengubah hubungan kekuasaan. Konflik yang ada akan

berujung pada persetujuan, mengesampingkan perbedaan atau kompromi. Mekanisme ini disebut akomodasi. Banyak pemogokan diatasi dengan cara seperti ini, kedua belah pihak sama mencapai sebagian tujuannya tapi kedua-duanya pun tidak mencapai semua yang mereka inginkan. Suatu pemerintah akan menganggap jalan keluar demikian memiliki keuntungan positif, seperti meredakan ketegangan, membangun citra "adil" atau memperbaiki citra rezim di mata internasional. Oleh karena itu pemilihan isu perlawanan memerlukan perhatian khusus. Kekeliruan memilih isu dapat mengarah pada penyelesaian dengan mekanisme akomodasi. Padahal mekanisme bukan cara yang tepat untuk mengakhiri kediktatoran.

Perjuangan tanpa-kekerasan lebih ampuh ketimbang penyelesaian yang ditunjukkan oleh mekanisme konversi atau akomodasi. Massa yang menarik kerja-sama dan melakukan pembangkangan bisa mengubah situasi sosial dan politik, khususnya hubungan kekuasaan, ketika kemampuan diktator untuk mengendalikan proses ekonomi, politik dan sosial pemerintah dan masyarakat sudah merosot. Satuan-satuan militer musuh akan menjadi kurang terandalkan karena mereka tidak lagi mematuhi komando untuk menyapu para pembangkang. Sekalipun pucuk pimpinan musuh masih berada dalam kedudukannya, dan masih melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan-tujuannya, tetapi kemampuan mereka untuk bertindak efektif sudah ompong. Mekanisme ini disebut koersi tanpa kekerasan.

Dalam situasi yang ekstrim, aksi-aksi tanpa-kekerasan bisa berdampak lebih jauh lagi. Pimpinan musuh secara nyata telah kehilangan kemampuan untuk bertindak dan struktur kekuasaan mereka pun sudah berantakan. Kepercayaan diri, perlawanan non kooperasi dan pembangkangan rakyat memuncak karena rezim, bahkan di lapisan permukaan sekalipun, sudah tidak kehilangan kendali. Birokrasi musuh

menolak mematuhi perintah atasannya. Prajurit dan tentara musuh membelot. Para pendukung kekuasaan lama dan warga mulai mengecam bekas pimpinan mereka, menolak hak penguasa untuk memerintah. Mereka menarik kembali kepatuhan dan dukungannya. Itulah mekanisme yang keempat: keruntuhan sistem lawan secara tuntas dan menyeluruh. Demikian tuntasnya, sehingga hanya untuk menyerah sekali pun mereka sudah tidak punya daya lagi.

Dalam merencanakan strategi pembebasan, keempat mekanisme ini harus benar-benar diingat. Mekanisme itu kadang-kadang berlangsung secara kebetulan. Tetapi mempersiapkan dengan sengaja satu atau beberapa mekanisme perubahan akan memudahkan perumusan strategi-strategi yang khusus dan saling menguatkan. Mekanisme mana yang cocok dipakai akan tergantung pada banyak faktor termasuk kekuatan relatif dan absolut dari kelompok-kelompok yang saling berposisi serta sikap dan tujuan kelompok perjuangan tanpa-kekerasan.

Efek Pendemokratisasian dari Pembangkangan Politik

Bertolak belakang dengan sanksi-sanksi kekerasan, penerapan teknik-teknik tanpa kekerasan melalui berbagai cara memiliki dampak mendemokratisasikan masyarakat politik. Dalam satu hal, efek pendemokratisasikan itu bersifat merugikan. Artinya, berlawanan dengan cara-cara militer, pembangkangan politik tidak mengenal cara represi di bawah komando elite pimpinan, cara yang sarannya dapat dialihkan kepada warga masyarakat untuk menegakkan atau memepertahankan suatu kediktatoran. Memang bisa saja para pemimpin gerakan pembangkangan politik melancarkan pengaruh atau tekanan terhadap para pengikutnya. Namun pimpinan pembangkangan politik tidak dapat memenjarakan atau menembak-mati mereka seandainya mereka berpaling

atau menginginkan pimpinan baru.

Dalam segi lainnya, efek pendemokratisasian bersifat positif. Perjuangan tanpa-kekerasan membekali rakyat cara-cara bertahan, yang dapat digunakan untuk merebut atau mempertahankan kemerdekaan dari ancaman calon diktator atau sisa-sisa diktator. Berikut ini beberapa efek positif pendemokratisasian dari perjuangan tanpa-kekerasan :

- Pengalaman melancarkan perjuangan tanpa-kekerasan akan membuat masyarakat lebih memiliki kepercayaan diri menghadapi ancaman represi kekerasan rezim.
- Perjuangan tanpa-kekerasan mengajarkan cara-cara non-kooperasi dan pembangkangan yang bisa dipakai oleh warga masyarakat menghadapi cara-cara pengendalian tidak demokratis yang dijalankan diktator manapun.
- Perjuangan tanpa-kekerasan bisa dipakai untuk menguji-coba menerapkan hak-hak demokratis -seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, membentuk organisasi mandiri, hak memilih wakil- pada situasi di bawah represi.
- Perjuangan tanpa-kekerasan memberikan andil besar untuk kelangsungan, kelahiran kembali dan penguatan kelompok serta lembaga-lembaga masyarakat yang mandiri, sebagaimana dibahas di Bab terdahulu. Kemampuan ini dibutuhkan demokrasi, karena kemampuan menggalang kekuatan masyarakat dan membatasi kekuasaan efektif dari kekuatan yang ingin menjadi diktator baru.
- Perjuangan tanpa-kekerasan memberikan suatu metode sehingga warga masyarakat sanggup menghadapi aksi-aksi represif polisi dan militer dari pemerintahan diktatorial.
- Perjuangan tanpa-kekerasan memberikan suatu metode sehingga warga masyarakat dan lembaga independen

yang berkepentingan dengan demokrasi dapat membatasi atau memangkas sumber-sumber kekuasaan elite berkuasa, dan dengan demikian mengurangi kemampuan mereka untuk terus berkuasa.

Kerumitan dari Perjuangan Tanpa-Kekerasan

Perjuangan tanpa-kekerasan merupakan teknik aksi sosial yang rumit dengan beragam metode, sejumlah mekanisme perubahan dan persyaratan-persyaratan perilaku khusus. Agar pembangkangan politik melawan diktator bekerja efektif, dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang seksama dan cermat. Mereka yang berada atau yang ingin masuk dalam barisan perjuangan mesti memahami apa yang dituntut dari mereka. Sumber daya harus dihimpun. Para perancang strategi perlu menganalisa bagaimana perjuangan tanpa-kekerasan bisa dijalankan secara efektif. Kini kita beralih ke bagian yang menentukan: perencanaan strategis.

BAB VI

PERLUNYA PERENCANAAN STRATEGIS

Kampanye pembangkangan politik melawan kediktaturan dapat dimulai dengan berbagai cara. Di masa lalu perjuangan semacam ini sebagian besar dilakukan hampir tanpa rencana dan pada dasarnya hanya kebetulan. Keresahan-keresahan tertentu memicu tindakan perlawanan yang dilakukan dengan bermacam cara: tetapi kemudian dibalas dengan kebrutalan, penangkapan atau pembunuhan terhadap tokoh terpendang, kebijakan dan aturan baru yang represif, penjataan makanan, penghinaan kepercayaan agama atau peringatan hari-hari penting yang berkaitan dengan itu. Kadang-kadang, tindakan tertentu diktatur memancing kemarahan lalu mendorong rakyat melancarkan aksi, tanpa memikirkan cara bagaimana mengakhiri pergolakan itu. Pada pengalaman yang lain, terdapat sejumlah orang atau kelompok yang berani mengambil tindakan tertentu yang kemudian memperoleh dukungan. Suatu keresahan tertentu bisa saja disambut kelompok lain yang merasa diperlakukan sama tak adilnya. Kelompok ini kemudian bergabung dalam

barisan perjuangan. Kadang-kadang sebuah himbauan perlawanan dari sekelompok kecil atau perorangan secara tak terduga memperoleh sambutan luas.

Spontanitas memang memiliki segi-segi positif, tetapi ada kalanya juga merugikan. Seringkali gerakan demokrasi tidak mempersiapkan diri menghadapi kebrutalan diktatur hingga mereka menderita kekalahan besar dan perlawanan kemudian menyurut. Bahkan seandainya sistem yang menindas itu sudah berhasil digulingkan sekalipun, tidak adanya perencanaan yang mengatur peralihan menuju sistem demokratis sedikitnya membuka kemungkinan munculnya diktatur baru.

Perencanaan yang Realistis

Di tahun-tahun mendatang masih akan terjadi perlawanan massa tanpa perencanaan melawan kediktaturan. Namun, kiranya mungkin untuk memikirkan cara dan jalan yang paling efektif dalam menggulingkan kediktaturan, dengan menilai bilamana situasi politik dan suasana jiwa masyarakat sudah matang serta memilih bagaimana cara memulai kampanye. Pikiran yang masak yang berdasarkan penilaian yang realistis atas situasi dan kemampuan warga masyarakat sangat diperlukan untuk memilih cara-cara efektif merebut kebebasan dalam lingkungan seperti itu.

Bila seseorang ingin menyelesaikan suatu pekerjaan, sungguh bijaksana jika dia merencanakan caranya. Makin penting tujuan atau makin besar akibat ditanggung jika terjadi kegagalan, makin penting perencanaan. Perencanaan strategis memperbesar peluang pengerahan dan pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia secara efektif. Hal ini terutama penting bagi gerakan demokratis – dengan sumberdaya material terbatas dan para pendukungnya terancam bahaya – yang berusaha menumbangkan kediktaturan yang kuat.

"Merancang strategi" di sini berarti memperhitungkan

serangkaian tindakan untuk mendekatkan situasi sekarang ke situasi masa depan yang diinginkan. Artinya, melakukan perombakan dari sistem kediktaturan menjadi sistem demokratis di hari depan. Maka rencana seperti itu umumnya berisi rangkaian kampanye bertahap dan kegiatan-kegiatan lain yang diorganisasikan untuk memperkuat rakyat dan masyarakat tertindas, serta melemahkan kekuatan kediktaturan. Perlu dicatat bahwa tujuannya bukanlah sekedar menghancurkan kediktaturan yang sekarang ada di depan mata, tetapi juga menegakkan sistem demokratis. Strategi umum yang tujuannya terbatas hanya menghancurkan kediktaturan memiliki risiko memberikan peluang munculnya tirani berikutnya.

Hambatan dalam Menyusun Perencanaan

Sejumlah eksponen pembebasan, sayangnya tidak mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk memikirkan cara meraih pembebasan. Hanya satu dua saja yang menyadari penuh arti penting perencanaan strategis sebelum memulai aksi. Perencanaan strategis jarang sekali disusun.

Mengapa orang yang memiliki visi perubahan politik kebebasan rakyatnya jarang menyiapkan rencana strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan-tujuannya? Celakanya, kebanyakan dari kalangan oposisi demokratis tidak menyadari arti penting rencana strategis, tidak terbiasa atau tidak terlatih untuk berpikir strategis. Ini tugas yang sulit. Terus menerus menghadapi tekanan diktatur, beban tugas-tugas rutin, membuat pimpinan perlawanan tidak cukup memiliki jaminan keamanan dan keluangan waktu untuk mengembangkan kemampuan berpikir strategis.

Biasanya apa yang dikerjakan hanyalah sekedar bereaksi terhadap tindakan dan menanggapi inisiatif pihak kediktaturan. Jadilah kalangan oposisi selalu dalam posisi defensif,

sekadar mempertahankan kebebasan yang tersisa atau menjaga benteng kebebasan, atau paling jauh hanya menahan laju kendali diktatur atau mengganggu rezim dengan memperalalahkan kebijakan-kebijakan baru mereka.

Sudah tentu ada sementara orang dan kelompok yang tidak menganggap perlu rencana umum gerakan pembebasan. Dengan keyakinan naif bahwa dengan perlawanan gigih yang dilancarkan terus menerus pada akhirnya berbuah kemenangan juga. Sementara yang lain memilih hanya sekadar menjalani hidup, tinggal diam sebagai penonton dan menghadapi semua kesusahan sambil tetap memegang teguh pada prinsip dan tujuan-tujuan mereka. Dengan pilihan itu, mereka merasa sudah berusaha sekuat tenaga. Keteguhan pada tujuan-tujuan kemanusiaan dan kesetiaan pada cita-cita luhur memang sesuatu yang patut dipujikan, tetapi jelas sama sekali tidak cukup untuk mengakhiri kediktaturan dan merebut kebebasan.

Oposisi lainnya berpikir secara naif bahwa melalui perlawanan yang cukup, kebebasan akan datang. Namun sebagaimana dicatat sebelumnya, kekerasan tidak menjamin kemenangan. Malah bisa membawa kekalahan, tragedi massal atau keduanya. Umumnya diktatur memiliki persenjataan kuat untuk menjinakkan perjuangan dengan kekerasan dan kekuatan militer jikalau pun ada jarang memihak kaum demokrat.

Ada pula aktivis yang mendasarkan aksinya pada apa yang mereka "rasa" perlu dikerjakan. Pendekatan yang tidak saja egosentris tetapi juga sama sekali tidak menawarkan strategi umum untuk pembebasan.

Aksi-aksi yang didasarkan pada "gagasan cemerlang" yang ditelurkan seseorang juga terbatas manfaatnya. Apa yang diperlukan adalah aksi-aksi yang dengan seksama memperhitungkan "langkah berikut" yang perlu diambil

untuk menggulingkan kediktaturan. Tanpa analisis strategis, pimpinan perlawanan tak tahu kemana lagi langkah berikutnya. Sebab mereka tidak memikirkan langkah-langkah berikutnya untuk meraih kemenangan. Kreativitas dan pikiran-pikiran cemerlang memang penting, tetapi perlu didayagunakan untuk mematangkan situasi strategis bagi keuntungan gerakan demokratis.

Menyadari bahwa berbagai macam aksi bisa dilakukan untuk melawan kediktaturan, disertai ketidakmampuan menetapkan titik mulainya, sementara orang mengatakan "lakukan serentak semua cara perlawanan." Cara demikian tentu banyak manfaatnya tapi mustahil dilakukan, terutama pada gerakan yang masih lemah. Tambahan lagi, pendekatan seperti itu juga tidak memberi petunjuk darimana memulai perlawanan, dimana memusatkan upaya perlawanan dan bagaimana menggunakan/mengolah sumberdaya yang seringkali terbatas.

Ada juga orang dan kelompok yang menganggap ada perlunya menyusun semacam perencanaan, tetapi cuma berpikir untuk keperluan jangka pendek atau taktis. Mereka tidak melihat bahwa rencana jangka panjang adalah mungkin dan perlu. Mereka tidak mampu mengkaji dan menganalisis dalam arti strategis, dan dengan demikian membiarkan diri mereka diganggu oleh isu-isu sepele, seringkali hanya menanggapi aksi-aksi musuh ketimbang mengambil inisiatif bagi gerakan demokratis. Akibat mencurahkan banyak energi pada kegiatan-kegiatan jangka pendek, pimpinan perlawanan seringkali gagal untuk menemukan aksi-aksi alternatif yang bisa menuntun keseluruhan usaha agar senantiasa terarah pada tujuan.

Ada kalanya karena alasan tertentu, suatu gerakan demokratis tidak memiliki rencana strategis yang lengkap untuk menggulingkan kediktaturan, dan hanya memusatkan diri pada isu-isu mendesak. Sebenarnya mereka tidak yakin

betul bahwa perlawanan mereka akan mengena sasaran. Karena itu perencanaan strategis mereka nilai sebagai sesuatu yang romantis, membuang-buang waktu atau sia-sia. Mereka yang berjuang melawan kediktaturan brutal senantiasa berhadapan dengan kekuatan sipil dan militer, yang menimbulkan kesan bahwa diktatur bisa berbuat sekehendaknya. Orang-orang putus harapan ini tetap melakukan perlawanan untuk alasan integritas dan barangkali alasan sejarah. Mereka tak akan mengakui, atau mengenali secara sadar, bahwa mereka tidak melihat adanya harapan dari perlawanan itu. Rencana strategis umum yang menyeluruh bagi mereka tidak bermakna.

Kegagalan rencana strategis kerap kali berakibat dramatis: kekuatan dilumpuhkan, perlawanan tidak efektif karena energi dibuang untuk isu-isu tak berarti, kelebihan yang dimiliki tidak dimanfaatkan dan korban jatuh sia-sia. Bila kaum demokrat tidak merencanakan secara strategis kemungkinan mereka akan gagal mencapai tujuannya. Suatu aksi yang kurang terencana dan berantakan tidak akan membawa upaya-upaya perlawanan maju ke depan. Sebaliknya dia justru akan memberi waktu bernapas pada diktatur untuk melipatgandakan kendali dan kekuasaannya.

Malangnya, karena tidak ada, atau jarang ada, rencana strategis yang komprehensif untuk pembebasan, diktatur nampak lebih panjang usianya ketimbang yang sebenarnya. Mereka berkuasa bertahun-tahun lebih lama ketimbang seharusnya.

Empat Kata Kunci dalam Perencanaan Strategis

Untuk membantu kita berpikir strategis, kita perlu mengupas makna empat istilah kunci berikut:

Strategi Umum adalah konsep yang berfungsi untuk menyatukan dan mengarahkan pendayagunaan semua

sumber-sumber yang sesuai dan tersedia (ekonomi, tenaga manusia, moral, politik, organisasi dan lain lain) agar dalam suatu konflik suatu kelompok dapat mencapai tujuan-tujuannya.

Strategi umum memusatkan perhatian pada tujuan kelompok dan sumberdaya yang terlibat dalam suatu konflik, untuk menentukan tehnik aksi yang paling cocok (misalnya menentukan pilihan antara perjuangan bersenjata atau perjuangan tanpa kekerasan). Ketika menyusun strategi umum, pimpinan perlawanan harus menilai dan merencanakan tekanan dan pengaruh mana yang akan dihunjamkan kepada lawan. Lebih jauh lagi strategi umum juga memuat keputusan yang harus diambil pada situasi tertentu dan kapan kampanye awal dan lanjutan perlu dilancarkan.

Strategi umum merupakan pedoman dasar untuk memilih strategi terbatas dalam suatu konflik, yang berjalan dalam suatu strategi umum yang sudah dipilih. Strategi umum juga menyebut tugas dan sumberdaya yang dialokasikan untuk setiap kelompok perjuangan.

Strategi adalah konsep tentang cara paling tepat untuk meraih tujuan tertentu yang tercantum dalam strategi umum. Strategi berkait dengan bilamana, kapan, dan bagaimana melancarkan perlawanan agar mencapai dayaguna yang maksimal untuk mencapai sasaran akhir. Strategi bisa diibaratkan sebagai konsep seorang seniman, sedangkan rencana strategi merupakan cetak-biru seorang arsitek.¹²

Strategi adalah mungkin pula memuat usaha-usaha untuk membangun situasi strategis yang menguntungkan, agar musuh dapat menarik kesimpulan bahwa konflik terbuka

12. Robert Halvey, *Komunikasi Pribadi*, 15 Agustus 1993

niscaya akan membawa mereka pada kekalahan. Dengan begitu, kemenangan dicapai dan konflik terbuka dapat dihindarkan. Strategi dapat pula berisi situasi strategis yang perlu diciptakan untuk memperbesar peluang keberhasilan dari kelompok perlawanan. Strategi juga mencakup cara-cara mengelola kemenangan yang dicapai secara benar.

Pada praktek perjuangan, rencana strategis adalah gagasan dasar mengenai bagaimana sebuah kampanye harus dilakukan dan bagaimana merekatkan bagian-bagian yang terpisah untuk memperkuat posisi dalam mencapai tujuan. Termasuk di dalamnya mengambil keputusan tepat yang mengatur pergerakan kelompok-kelompok tertentu dalam operasi-operasi yang lebih kecil. Penyusunan strategi yang tepat harus mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan tehnik-tehnik perjuangan yang dipilih. Tehnik-tehnik yang berbeda meminta syarat-syarat yang berlainan pula. Dipenuhinya semua syarat tentu belum menjamin keberhasilan. Faktor-faktor tambahan juga perlu dimasukkan dalam perhitungan.

Dalam merancang strategi, kaum demokrat mesti jelas menguraikan tujuan-tujuannya serta menjelaskan bagaimana mengukur efektivitas dari upaya yang dilakukan. Dalam uraian dan analisis tersebut perancang strategis perlu menyebutkan rincian syarat-syarat untuk mencapai tujuan yang dipilih. Kejelasan yang sama juga diperlukan dalam merumuskan taktik.

Taktik dan metode aksi adalah cara-cara untuk menjalankan strategi. Memakai taktik berarti memakai cara cerdik untuk meraup sebanyak mungkin keuntungan pada situasi tertentu. Taktik merupakan aksi terbatas yang diterapkan untuk tujuan terbatas pula. Dari sekian banyak cara perlawanan yang tersedia dipilih taktik terbaik untuk menjalankan strategi dalam satu tahap konflik tertentu. Agar mencapai efektivitas yang maksimal, taktik dan metode mesti dipilih

dan diterapkan dengan senantiasa berpedoman pada pencapaian tujuan strategis. Kemenangan-kemenangan taktis yang tidak memperkuat pencapaian tujuan strategis pada akhirnya akan berarti membuang-buang tenaga.

Taktik berurusan dengan tindakan-tindakan terbatas yang cocok dengan strategi yang lebih luas, sama halnya seperti strategi yang menjadi bagian dari suatu strategi umum. Taktik selalu berbicara tentang perlawanan, sedangkan strategi mencakup pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas. Taktik tertentu harus dipahami sebagai bagian dari strategi pertempuran atau kampanye. Berbeda dengan strategi, taktik diterapkan untuk jangka pendek atau dalam wilayah yang lebih kecil (secara geografis, kelembagaan dan sebagainya) oleh sejumlah kecil orang untuk suatu tujuan yang terbatas pula. Dalam aksi tanpa kekerasan perbedaan antara tujuan taktis dan tujuan strategis sebagian ditandai oleh apakah tujuan aksi yang dipilih yang merupakan hal yang pokok atau tidak

Serangan-serangan taktis dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan strategis. Serangan-serangan taktis adalah sarana ahli strategi guna menciptakan kondisi yang matang untuk melancarkan serangan yang menentukan terhadap musuh. Karena itu mereka yang mengemban tanggung-jawab menyusun dan melaksanakan operasi-operasi taktis harus cakap menilai situasi dan mampu memilih metode yang paling tepat untuk melaksanakan. Mereka yang diharapkan untuk ikut serta mesti dilatih menggunakan teknik-teknik dan metode-metode khusus yang telah dipilih.

Metode merujuk pada senjata atau cara-cara aksi, dalam teknik perjuangan tanpa kekerasan, cara-cara ini meliputi puluhan bentuk aksi (seperti berbagai jenis pemogokan, boikot, non kooperasi politik dan sebagainya) yang tercantum pada Bab V. (Lihat Lampiran)

Pengembangan rencana strategis yang efektif dan bertanggung jawab untuk perjuangan tanpa kekerasan sangat tergantung kepada perumusan dan pemilihan strategi umum, strategi taktik dan metode.

Pelajaran pokok dari diskusi ini adalah bahwa untuk melawan kediktaturan diperlukan kepintaran menyusun perencanaan strategis. Kegagalan menyusun rencana secara cerdas akan mengundang celaka, sementara kemampuan intelektual yang digunakan secara efektif akan, menghasilkan rancangan strategis untuk memanfaatkan secara jeli segala sumberdaya yang tersedia untuk membawa masyarakat menuju kebebasan dan demokrasi.

BAB VII

MERANCANG STRATEGI

Agar memperbesar peluang kemenangan, pimpinan perlawanan perlu merumuskan rencana aksi komprehensif yang mampu memperkuat rakyat tertindas, memperlemah dan akhirnya merobohkan kediktaturan serta membangun demokrasi yang tahan uji. Untuk menyusun rencana aksi yang demikian, diperlukan penilaian seksama terhadap situasi dan pilihan bentuk aksi yang efektif. Melalui analisis yang seksama dan cermat tersebut, dapat diturunkan strategi umum dan strategi kampanye yang lebih spesifik. Sekalipun saling berkaitan, pengembangan strategi umum dan strategi kampanye adalah dua proses atau tahap yang berbeda. Hanya sesudah strategi umum disusun maka strategi kampanye khusus bisa dikerjakan. Strategi kampanye perlu dirancang untuk mencapai dan memperkuat tujuan-tujuan strategi umum.

Pertimbangan Strategis Yang Pokok

Banyak masalah dan tugas yang menanti dalam penyusunan strategi perlawanan. Kita akan mencoba mengidentifikasi beberapa faktor penting yang mesti dipikirkan

masak-masak, baik pada tingkat strategi umum maupun strategi kampanye. Namun demikian, dalam semua perencanaan strategi dibutuhkan perencana perlawanan yang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai situasi konflik termasuk segi-segi fisik, sejarah, pemerintah, militer, budaya, sosial, politik psikologis dan ekonomi dan faktor internasional. Strategi hanya bisa dikembangkan dalam konteks perjuangan setempat beserta latar belakangnya.

Pimpinan dan para perancang terutama harus menilai sasaran dan tujuan dan makna pentingnya. Apakah tujuannya membutuhkan perjuangan yang lebih besar? Mengapa demikian? Adalah penting untuk merumuskan tujuan perjuangan. Kami sudah menegaskan bahwa penggulingan kediktaturan atau penyingkiran diktatur yang sekarang berkuasa tidaklah cukup.

Jalan keluar dari konflik yang ada adalah pembentukan masyarakat bebas dengan sistim pemerintah demokratis. Kejelasan akan hal ini akan sangat mempengaruhi pengembangan strategi umum dan penyusunan strategi khusus.

- Apa hambatan pokok untuk mencapai kebebasan?
- Apa saja faktor yang akan membantu mencapai kebebasan?
- Apa kekuatan utama kediktaturan?
- Apa saja kelemahannya?
- Sampai sejauh mana derajat kerapuhan sumber-sumber kekuatan diktatur?
- Apa kekuatan gerakan/kekuatan demokrasi dan warga negara secara umum?
- Apa kelemahan gerakan demokrasi dan bagaimana cara mengatasinya?
- Bagaimana status pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam konflik, siapa saja pihak yang membantu atau

berniat membantu baik diktatur maupun gerakan demokrasi dengan cara bagaimana?

Memilih Cara

Pada tingkat strategi umum, memilih jalan perjuangan apa yang akan dipakai dalam konflik mendatang. Perlu diukur kelebihan dan kekurangan dari berbagai teknik perjuangan seperti perang militer, perang gerilya, perlawanan politik dan lain-lainnya.

Dalam menentukan pilihan ini maka perlu mempertimbangkan soal-soal berikut : apakah jalan perjuangan yang dipilih sepadan dengan kemampuan kaum demokrat? Apakah teknik yang dipilih merupakan cara yang dapat menggalang warna negara yang didominasi? Apakah cara itu membantu kaum demokrat menjadi mandiri atau mereka tergantung pada pihak ketiga atau pihak asing?

Adakah pencatatan tentang pemakaian cara itu dalam menggulingkan kediktaturan? Apakah cara-cara itu memperbesar atau mengurangi jumlah korban dan kerusakan dalam konflik yang bakal dihadapi? Jika perlawanan berhasil mengakhiri kediktaturan, maka apa dampak dari cara perjuangan yang dipilih terhadap pemerintah yang nantinya berdiri? Segala jenis aksi yang kontra-produktif perlu disingkirkan dari strategi umum.

Dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa pembangkangan politik menawarkan berbagai kelebihan ketimbang teknik perjuangan lainnya. Para perencana perlu memeriksa situasi konflik khusus dan menilai apakah benar pembangkangan politik merupakan jawaban atas pertanyaan di atas.

Merancang Demokrasi

Ingat selalu bahwa dalam melawan kediktaturan, tujuan strategi umum bukan sekadar menggulingkan diktatur tetapi

untuk membentuk sistem demokratis dan mencegah naiknya diktatur baru. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, cara-cara perjuangan harus senantiasa mendorong terjadinya perubahan pada distribusi kekuasaan efektif dalam masyarakat. Di bawah kediktaturan, warga negara dan lembaga-lembaga sipil masyarakat terlalu lemah dan pemerintah terlalu kuat. Bila ketimpangan ini dibiarkan berlanjut, perangkat aturan baru, jika diinginkan akan sama diktatorialnya dengan sebelumnya. Maka dari itu, sebuah "revolusi istana" atau kudeta tidak bisa diterima.

Pembangangan politik memuluskan pembagian kekuasaan efektif secara adil dengan mobilisasi masyarakat melawan kediktaturan, seperti yang sudah dibahas pada Bab Lima. Proses ini dapat berlangsung dengan beberapa cara. Kemajuan dalam perjuangan tanpa kekerasan tercapai ketika represi kekerasan dari kediktaturan tidak lagi ampuh untuk menimbulkan ketakutan dan kepatuhan warga negara. Warga negara sebaliknya sudah memiliki sendiri senjata untuk menolak dan menghadang kemauan diktatur. Lebih jauh, mobilisasi kekuatan rakyat melalui pembangkangan politik akan memperkuat lembaga-lembaga mandiri milik masyarakat. Pengalaman memainkan kekuasaan seperti itu tidak mudah terlupakan. Pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama perjuangan akan membuat warga negara tidak gampang saja ditundukkan oleh calon diktatur. Pergeseran hubungan kekuasaan ini akhirnya akan menghasilkan masyarakat demokratis yang lebih tahan uji.

Bantuan Pihak Luar

Menakar peranan perlawanan dalam negeri dan tekanan pihak luar dalam menjatuhkan kediktaturan adalah salah satu bagian dari perumusan strategi umum. Dalam kerangka analisis ini kita berpendirian bahwa perjuangan mesti lahir di dalam negeri sendiri. Dampak tekanan internasional

bergantung pada perjuangan di dalam negeri.

Usaha-usaha yang wajar bisa saja dilakukan untuk menggalang dukungan masyarakat dunia untuk melakukan tekanan terhadap kediktaturan dengan alasan kemanusiaan, moral, atau agama. Usaha-usaha itu bisa dijalankan untuk membangkitkan sanksi diplomatik, politik, dan ekonomi dari pemerintah dan badan-badan internasional terhadap diktatur. Sanksi tersebut dapat berupa embargo ekonomi atau embargo senjata, penurunan status diplomatik atau pembatalan hubungan diplomatik, atau pelarangan investasi dan bantuan ekonomi kepada negeri-negeri diktatorial, pemecatan pemerintah diktatorial dari berbagai organisasi internasional dan dari badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa. Lebih jauh, bantuan internasional seperti dukungan keuangan dan komunikasi dapat langsung dialamatkan kepada kelompok-kelompok demokratis.

Merumuskan Strategi Umum

Sesudah menilai situasi, pilihan cara dan peranan bantuan pihak luar, para perencana strategi umum perlu membuat rencana garis besar cara terbaik untuk mengatasi konflik. Rencana garis besar ini musti mengulas keadaan sekarang hingga ke masa pembebasan dan pembentukan sistem demokratis di masa depan. Dalam merumuskan sebuah strategi umum perencana perlu mengajukan pelbagai pertanyaan pada diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini adalah hal-hal (lebih spesifik dari sebelumnya) yang perlu dipertimbangkan untuk merancang strategi umum perjuangan melalui pembangkangan politik.

Apa konsep luas dari perjuangan jangka panjang mengalahkan kediktaturan dan membangun demokrasi?

Bagaimana cara memulai perlawanan jangka panjang? Bagaimana warga negara yang tertindas bisa menjadi yakin

diri dan tabah untuk menentang kediktaturan, sekalipun dengan cara yang terbatas? Bagaimana agar seiring dengan waktu dan bertambahnya pengalaman, warga negara mampu terus memperkuat pembangkangan dan pembelotan? Apa tujuan dari kampanye-kampanye terbatas untuk merebut kembali kontrol demokratis dan membatasi kediktaturan?

Adakah lembaga-lembaga mandiri yang masih bertahan dari tangan diktatur yang dapat digunakan kaum perjuangan merebut kebebasan? Lembaga-lembaga masyarakat yang mana yang dapat direbut kembali dari kendali diktatur? Lembaga bagaimana yang perlu diciptakan oleh kaum demokrat untuk memenuhi keperluannya dan membentuk ruang demokrasi, meski kediktaturan belum ditumbangkan.

Bagaimana cara mengembangkan dan memperkuat perlawanan secara organisasional?

Cara melatih para pendukung? Sumberdaya (keuangan, peralatan dan lain lain) apa saja yang dibutuhkan sepanjang perjuangan? Jenis-jenis simbol apa yang efektif untuk menyatukan masyarakat? Jenis aksi bagaimana dan pada tahap apa sumber-sumber kekuasaan diktatur secara bertahap bisa diperlemah dan ditumbangkan? Bagaimana caranya agar warga negara serentak bersiteguh pada pembangkangannya dan mempertahankan disiplin tanpa kekerasan? Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya selama perjuangan? Bagaimana mempertahankan tatanan sosial selama konflik berlangsung? Dan ketika kemenangan sudah dekat, bagaimana cara oposisi demokratis membangun dasar-dasar kelembagaan menuju masyarakat paska-diktatorial agar peralihan berjalan semulus mungkin?

Harus dicatat bahwa tidak ada dan tidak pernah ada rencana kerja tunggal yang dapat berlaku pada setiap gerakan pembebasan melawan kediktaturan. Setiap per-

juangan menggulingkan kediktaturan dan membentuk suatu sistem demokratis tidak pernah sama. Tidak ada dua situasi yang sama persis, karena tiap kediktaturan memiliki ciri-ciri individual dan kapasitas warga negara yang berjuang juga berlainan. Perencana strategi umum untuk pembangkangan politik memerlukan pemahaman yang utuh, tidak saja terhadap situasi konfliknya tetapi juga memahami seluk-beluk dari cara perjuangan yang dipilih.¹³

Pada waktu strategi umum perjuangan selesai disusun secara seksama maka tugas selanjutnya adalah menyebarkan. Jika konsepsi umum –di samping instruksi-instruksi yang lebih rinci –diketahui luas, banyak orang akan ikut serta dan lebih bersemangat. Pengetahuan semacam ini berdampak positif mem bakar semangat dan kemauan mereka untuk turut berjuang serta bertindak. Kerangka strategi umum tentu akan diketahui lawan dan pengetahuan atas ciri-ciri perjuangan itu bisa meredam kebrutalan represinya, karena mereka mengetahui bahwa represi lebih keras justru akan merugikan. Pengetahuan dan pengertian mengenai strategi umum ini bisa menimbulkan perpecahan dan pembelotan di barisan diktatur.

Ketika rencana strategi umum untuk menggulingkan kediktaturan dan pembentukan sistem demokratis sudah tersusun, saatnya kelompok-kelompok demokratis untuk menerapkan rencana strategis tersebut secara konsisten. Hanya dalam keadaan yang luar biasa saja lah perjuangan dibolehkan menyimpang dari strategi umum yang semula. Tetapi, bila ada banyak bukti bahwa strategi umum yang ada ternyata tidak cocok, atau bahwa secara mendasar ling-

13. Kajian lebih lengkap yang dianjurkan adalah *The Politics of Nonviolent Action* dan Peter Ackerman and Christopher Kruegler, *Strategic Nonviolent Conflict* (Wesport, Connecticut, Praeger 1994)

kungan perjuangan sudah berubah, maka perencana perlu mengesampingkan strategi umum itu. Sekalipun demikian, hal itu hanya boleh dilakukan setelah dilakukan penilaian kembali secara menyeluruh, dan disimpulkan bahwa rencana strategis umum yang baru dan lebih memadai perlu disusun dan dikembangkan.

Merencanakan Strategi Kampanye

Sekalipun strategi umum yang sudah dibuat itu sedemikian bagus dan menjanjikan bisa mengakhiri kediktaturan dan melembagakan demokrasi, tapi strategi itu tidak jalan dengan sendirinya. Strategi-strategi lebih rinci perlu disusun untuk menuntun kampanye-kampanye pokok untuk menggoyang kekuasaan rezim. Selanjutnya, strategi ini akan menjadi bagian dan menuntun serangkaian langkah-langkah taktis untuk melancarkan serangan penentuan terhadap rezim diktatur. Taktik-taktik dan metode-metode aksi yang lebih rinci musti disusun secara seksama untuk membantu mencapai tujuan tiap strategi. Berikut ini pembahasan secara khusus pada tingkat strategi.

Aktivis yang merancang kampanye-kampanye pokok, seperti juga mereka yang menyusun strategi umum, harus memahami sifat, ciri-ciri dan cara-cara bekerja teknik-teknik perjuangan yang dipilih. Seperti layaknya perwira militer yang harus paham mengenai susunan kesatuan, taktik-taktik dan logistik, amunisi, faktor geografi dan faktor lainnya guna menyusun plot strategi militer, maka para perencana pembangkangan politik harus memahami ciri-ciri dan prinsip-prinsip strategis dari perjuangan tanpa-kekerasan. Namun demikian, pengetahuan tentang perjuangan tanpa-kekerasan, ditambah rekomendasi dan ulasan di atas tidak dengan sendirinya dapat menghasilkan suatu strategi. Untuk suatu perumusan strategi perjuangan, diperlukan suatu kreativitas.

Masalah-masalah dalam Menyusun Kampanye

Dalam merancang kampanye-kampanye khusus dan jangka panjang untuk memajukan perjuangan pembebasan, penyusun strategi pembangkangan politik perlu memikirkan berbagai masalah dan isu, antara lain adalah:

- Penentuan tujuan-tujuan khusus kampanye dan andilnya dalam mendukung pelaksanaan strategi umum.
- Penghitungan dengan cermat metode-metode aksi atau senjata politik yang paling tepat untuk melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan. Perlu ditentukan ruang lingkup, rencana taktis dan bentuk-bentuk aksi dari tiap rencana kampanye hingga bisa menghasilkan tekanan dan membatasi sumber-sumber kekuasaan diktatur.
- Penetapan tentang bilamana atau bagaimana mengaitkan isu ekonomi dengan keseluruhan perjuangan politik. Jika isu-isu ekonomi merupakan isu pokok perjuangan, maka perhatian mesti diarahkan agar keluhan-keluhan ekonomi itu segera bisa diatasi sesudah kediktaturan berakhir. Kekecewaan dan ketidakpuasan akan menjadi-jadi bila jalan keluar yang segera tidak disediakan selama masa transisi. Ketidakpuasan itu bisa berakibat kebangkitan kembali rezim diktatorial yang menjanjikan diakhirinya kesulitan ekonomi.
- Penentuan sejak dini susunan kepemimpinan dan sistem komunikasi terbaik untuk menggalakkan perlawanan. Cara pengambilan keputusan dan komunikasi seperti apa yang mungkin dilakukan guna memberikan pedoman perjuangan kepada warga negara yang tengah melawan?
- Komunikasi atau pengiriman berita-berita perlawanan kepada masyarakat, pihak lawan, dan pers internasional. Klaim dan laporan-laporan harus selalu faktual. Mem-

besar-besarkan berita dan mengumumkan klaim tanpa fakta akan merongrong kredibilitas kaum perlawanan.

- Rencana-rencana untuk swadaya dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan dan kegiatan politik guna mengatasi kebutuhan pokok orang per orang selama perlawanan. Proyek seperti itu bisa dijalankan oleh orang-orang yang secara tidak langsung terlibat dalam aktivitas gerakan.
- Penentuan bantuan apa yang diinginkan dari pihak luar guna mendukung kampanye tertentu atau perjuangan secara umum. Bagaimana bantuan itu paling baik bisa dihimpun dan digunakan tanpa menjadikan perjuangan dalam negeri tergantung pada faktor luar yang tidak pasti? Perlu juga diperhatikan soal pihak mana yang paling cocok untuk membantu, misalnya seperti LSM (gerakan-gerakan sosial, agama, atau kelompok-kelompok politik, serikat-serikat buruh dan lain-lain) suatu pemerintahan atau Perserikatan Bangsa Bangsa dan badan-badan internasional lainnya.

Lebih jauh, para perencana perlawanan perlu mengambil langkah-langkah guna memelihara tatanan dan memenuhi kebutuhan sosial dengan kemampuan sendiri selama perlawanan terhadap kendali diktatur. Hal ini tidak saja akan menciptakan susunan demokrasi yang mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan nyata, juga akan menggugurkan setiap klaim bahwa represi brutal memang dibutuhkan untuk mengakhiri kekacauan dan huru-hara.

Menyebarkan Gagasan Non-Kooperasi

Untuk pembangkangan politik yang berhasil, diperlukan pemahaman akan gagasan non-koperasi. Seperti yang digambarkan dalam kisah "Si Tuan Monyet" (lihat Bab III), gagasan dasarnya sangatlah sederhana: bila rakyat menarik

kembali kepatuhannya, meskipun ada ancaman represi, maka sistem yang menindas itu akan dilemahkan dan runtuh.

Rakyat yang hidup di bawah kediktaturan barangkali pernah mendengar gagasan yang serupa dari berbagai sumber. Namun demikian, kaum demokrat tetap perlu menyebarluaskan gagasan ini. Kisah tuan monyet atau semacamnya bisa ditebar ke masyarakat luas. Dongeng sangat mudah dipahami. Sekali konsep umum non-kooperasi dipahami, maka rakyat akan mengerti kaitannya dengan himbuan untuk melancarkan perlawanan non-kooperasi terhadap kediktaturan. Mereka juga mampu menemukan caranya sendiri menerapkan demikian banyak bentuk non-kooperasi dalam berbagai situasi baru

Memang ada kesulitan-kesulitan dan bahaya yang mengintai dalam usaha menyebarkan gagasan, berita dan instruksi-instruksi perlawanan di bawah rezim diktatur, namun kaum demokrat sudah membuktikan bahwa kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi. Bahkan di bawah kekuasaan Nazi dan komunis, kaum perlawanan mampu berkomunikasi dengan orang per orang tetapi bahkan dengan khalayak ramai melalui koran gelap, selebaran, buku-buku, dan pada tahun-tahun belakangan dengan kaset audio dan video.

Dengan mengacu kepada rencana strategis yang sudah ada, petunjuk umum untuk perlawanan bisa disiapkan dan disebarkan. Tuntunan ini akan menunjukkan isu-isu apa dan dalam keadaan macam apa warga negara perlu melakukan protes dan pembelotan ditambah pedoman cara melakukannya. Lalu, bila komunikasi dari pimpinan gerakan demokratis terputus dan tidak ada lagi instruksi yang diterima atau dikeluarkan, warga negara akan paham bagaimana mesti menanggapi isu-isu penting. Tuntunan semacam itu bisa menjadi semacam ujian terhadap "instruksi perlawanan" yang sengaja disebarkan oleh musuh untuk mendiskreditkan aksi-aksi demokratis.

Represi dan Langkah-langkah Tandingannya

Para perencana strategi perlu mengukur hingga sejauh mana tanggapan dan represi kekerasan terhadap aksi-aksi perlawanan demokratis. Perlu dirumuskan cara menghadapi, membalas atau mencegah represi yang terus meningkat tanpa harus tunduk. Secara taktis dalam suatu kesempatan, peringatan dini perlu diberikan terhadap kemungkinan adanya represi, sehingga peserta aksi dan warga negara paham risiko yang akan ditanggung. Bila represi diperkirakan terjadi, bantuan medis perlu disiapkan.

Dalam mengantisipasi represi, perencana strategi perlu mempertimbangkan taktik dan metode kampanye yang sejauh mungkin dapat mengelakkan diri dari represi. Demonstrasi di jalan atau suatu pawai jalan kaki misalnya akan terlihat dramatis tetapi berisiko matinya ribuan demonstran. Biaya semahal itu tidak lebih bermanfaat untuk menekan diktatur dibandingkan dengan aksi diam di rumah, mogok atau pembangkangan pegawai negeri yang melibatkan banyak orang.

Bila tadi diulas bahwa aksi-aksi provokatif yang meminta risiko kerugian yang besar memang perlu diambil untuk tujuan-tujuan strategis, maka perlu dipikirkan dengan matang-matang biaya dan hasil-hasil yang diharapkan. Bisakah warga masyarakat menjalankan disiplin tanpa kekerasan dalam aksi itu? Mampukan para peserta pimpinan aksi melawan provokasi untuk memancing aksi kekerasan? Para perencana harus menimbang langkah-langkah yang perlu diambil agar disiplin tanpa kekerasan bisa ditegakkan dan mampu mempertahankan perlawanan di tengah ancaman kekerasan brutal? Apakah cara-cara seperti mengirim himbauan, brosur-brosur, ajakan berdemonstrasi, pernyataan dan ancaman bolikot terhadap orang atau kelompok yang pro kekerasan mungkin untuk dilakukan dan

efektif? Pimpinan harus senantiasa siaga terhadap penyusupan agen-agen provokasi yang bertujuan memancing kerusuhan.

Mentaati Rencana Strategi

Bila sudah terdapat strategi, maka kaum demokrat tidak boleh dikelabui tindakan-tindakan kecil diktatur yang memang sengaja dilakukan untuk mengacaukan strategi dan rencana kampanye tersebut, agar perhatian gerakan oposisi berbelok ke soal-soal yang penting. Emosi sesaat yang timbul akibat kebrutalan rezim tidak boleh menyebabkan perlawanan menyimpang dari strategi umum atau strategi kampanye. Kebrutalan tersebut memang sengaja diciptakan untuk memancing gerakan demokratis melepaskan rencana yang sudah disusun dan menggiring gerakan perlawanan untuk menggunakan cara kekerasan, sehingga memudahkan diktatur untuk memadamkan perlawanan.

Sepanjang analisis utama dianggap memadai, maka tugas berikutnya bagi gerakan prodemokrasi adalah terus menekan selangkah demi selangkah. Sudah barang tentu, perubahan-perubahan dalam taktik dan tujuan jangka pendek akan terjadi. Pimpinan yang baik akan selalu siap memanfaatkan kesempatan. Penyesuaian-penyesuaian ini tidak boleh mengaburkan tujuan strategi kampanye yang cermat sangat penting peranannya untuk mencapai kepentingan.

BAB VIII

MENJALANKAN PEMBANGKANGAN POLITIK

Dalam situasi dimana warga negara merasa tak berdaya dan ketakutan, tugas awal bagi publik hendaknya adalah aksi-aksi berisiko kecil yang lebih ditujukan untuk menguatkan keyakinan diri. Aksi-aksi tipe ini seperti menggunakan pakaian dengan cara yang tidak biasa secara umum akan dianggap sebagai pendapat yang melawan arus. Aksi seperti ini memberi kesempatan bagi publik untuk terlibat tindakan-tindakan perlawanan. Suatu isu kecil yang sepiantas lalu tampak tidak bermuatan politik, seperti menuntut perbaikan pipa PAM misalnya mungkin akan menjadi fokus aksi kelompok. Aktivistis harus memilih isu yang secara umum diterima secara luas dan susah disangkal. Keberhasilan dalam kampanye terbatas ini tidak saja menyalurkan keresahan-keresahan tetapi juga meyakinkan warga masyarakat bahwa mereka benar-benar memiliki kekuatan nyata.

Sebagaimana besar strategi kampanye dalam perjuangan jangka panjang tidak ditujukan untuk langsung dan segera

menjatuhkan kediktaturan, tetapi ditujukan ke sasaran-sasaran terbatas. Tidak semua kampanye harus melibatkan semua sektor masyarakat.

Dalam menyusun rangkaian kampanye dalam usaha-usaha melaksanakan strategi umum, perancang strategi perlu mempertimbangkan bagaimana melakukan kampanye pada tahap permulaan, tahap pertengahan dan tahap akhir perjuangan jangka panjang. Masing-masing tahap akan berbeda satu sama lainnya.

Perlawanan Selektif

Pada tahap perjuangan, kampanye yang terpisah dengan sasaran khusus yang berbeda akan sangat berguna. Kampanye selektif akan dilanjutkan satu. Kadang-kadang satu kampanye dengan lainnya dilakukan pada saat berbarengan.

Pada waktu merencanakan sebuah strategi bagi "perlawanan selektif" perlu diidentifikasi isu-isu atau keluhan-keluhan tertentu yang menyimbolkan penindasan dalam arti yang luas. Isu-isu tersebut dapat memberi pijakan bagi kampanye yang diarahkan pada sasaran strategis jangka menengah, dari keseluruhan strategi umum.

Sasaran strategis harus berada dalam jangkauan kemampuan saat ini atau perkiraan kemampuan perlawanan gerakan demokratis di masa datang. Dengan cara itu, perolehan kemenangan demi kemenangan akan lebih terjamin. Hal itu amat baik untuk memupuk semangat gerakan dan secara berangsur-angsur mendorong pergeseran hubungan kekuasaan dalam kerangka perjuangan jangka panjang.

Strategi perlawanan selektif harus dipusatkan terutama pada isu-isu sosial, ekonomi dan politik yang khusus. Tujuannya adalah agar bagian-bagian tertentu sistem politik atau sosial tetap terlepas dari cengkeraman kendali diktatur,

memperoleh kembali beberapa bagian dikendalikan diktatur atau menolak keinginan tertentu dari diktatur.

Jika dimungkinkan, kampanye perlawanan selektif perlu dibidikkan pada satu dan beberapa kelemahan kediktaturan, sebagaimana sudah didiskusikan. Melalui cara itu kekuatan yang ada pada kaum demokrat akan berdampak lebih besar.

Sejak dini perencana perlu menetapkan setidaknya-tidaknya strategi kampanye tahap permulaan. Apa sasaran pokok tertentu yang ingin dicapai? Apa sumbangannya terhadap strategi umum yang telah dipilih? Bila mungkin, amat bagus jika dirumuskan sekurang-kurangnya kerangka umum strategi kampanye yang kedua atau ketiga. Kesemua strategi itu diperlukan untuk menggerakkan strategi umum dan hendaknya itu sejalan dengan garis-garis besar strategi umum.

Tantangan Simbolik

Pada awalnya, kampanye cuma bertujuan menggoyang kediktaturan, aksi politik yang dilakukan mungkin akan memiliki ruang lingkup yang terbatas. Rencana aksi disusun atau dirancang sebagian untuk menguji dan mempengaruhi pendapat warga negara, dan menyiapkan mereka dalam perjuangan yang berkelanjutan melalui aksi non-koperasi dan pembangkangan politik.

Aksi-aksi pada permulaan mungkin akan mengambil bentuk protes-protes simbolik atau non-koperasi yang terbatas dan bersifat sementara. Bila jumlah orang yang terlibat masih sedikit, maka aksi yang dilakukan bisa saja hanya berupa menaruh karangan bunga di tempat yang memiliki makna penting. Di pihak lain, bila jumlah anggota yang bersedia ikut jumlahnya besar, dapat dilakukan aksi berhenti beraktivitas selama lima menit atau aksi bungkam beberapa menit. Dalam situasi yang berlainan, beberapa orang mungkin dapat melakukan mogok makan, apel siaga di

tempat yang penting atau boikot sekolah atau aksi duduk-duduk di kantor-kantor penting. Di bawah kediktaturan aksi-aksi yang lebih agresif akan mengundang reaksi lebih keras lagi. Aksi-aksi simbolik tertentu seperti pendudukan halaman depan istana diktatur atau markas besar kepolisian akan menimbulkan risiko besar dan karenanya tidak cocok untuk kampanye permulaan.

Aksi-aksi protes pada suatu ketika akan menarik perhatian nasional dan internasional seperti demonstrasi jalanan di Burma tahun 1988 atau pendudukan dan mogok makan oleh mahasiswa dilapangan Tiananmen di Beijing tahun 1989. Kerusakan yang besar dalam kasus ini pihak demonstran memberikan pelajaran pentingnya strategi dalam menyusun rencana kampanye yang lebih seksama. Sekalipun memberikan dampak moral dan psikologis yang luar biasa, aksi itu sendiri tidak berhasil merobohkan kediktaturan, karena aksi semacam itu hampir sepenuhnya hanya bermakna simbolik dan tidak mengubah kedudukan kekuasaan kediktaturan.

Biasanya, mustahil memotong sumber-sumber kekuasaan kediktaturan dengan sekali pukul saja pada awal perjuangan. Diperlukan keikutsertaan seluruh warga negara dan hampir semua lembaga-lembaga masyarakat yang selama ini tunduk dan patuh untuk menolak rezim secara tegas dan langsung menolaknya dengan cara non-koperasi massal yang kuat. Pada tahap awal, perlawanan massa belum dimungkinkan dan memang sulit dicapai. Oleh karena itu, kampanye tahap awal yang terburu-buru dengan ajakan non-koperasi dan pembangkangan penuh merupakan strategi yang tidak realistis.

Membagi-bagi Tanggung Jawab

Selama kampanye perlawanan selektif, api perjuangan biasanya dilahirkan oleh satu atau beberapa kelompok

masyarakat. Dalam kampanye selanjutnya, dengan sasaran yang berbeda beban perjuangan akan bergeser ke kelompok lainnya. Misalnya, mahasiswa dapat melakukan mogok pada isu-isu pendidikan, kaum agamawan dan pengikutnya mungkin mengangkat isu kebebasan agama, para buruh kereta api dapat memperlambat sistem transportasi, kaum wartawan menantang sensor dengan menerbitkan halaman hitam sebagai tanda sensor atau polisi "gagal" menemukan dan menangkap tokoh oposisi demokratis. Pentahapan kampanye perlawanan berdasarkan isu dan kelompok masyarakat akan memungkinkan kelompok yang satu beristirahat sementara perlawanan lainnya terus bergerak.

Perlawanan selektif khususnya penting untuk mempertahankan keberadaan dan otonomi kelompok-kelompok sosial, ekonomi dan politik di luar kendali kediktatoran. Pusat-pusat kekuasaan ini memberikan dasar-dasar kelembagaan dari mana nanti warga masyarakat dapat melakukan tekanan atau melawan kontrol kediktatoran. Dari pengalaman perjuangan, lembaga-lembaga itu biasanya merupakan sasaran-sasaran utama represi oleh kediktatoran.

Darahkan ke Kekuasaan Diktator

Ketika perjuangan jangka panjang sudah bergerak melampaui strategiawal menuju tahap yang lebih ambisius dan maju, ahli strategi perlu menghitung bagaimana sumber-sumber kediktatoran itu bisa dibatasi lebih jauh lagi. Tujuan dari rencana ini adalah menggunakan cara non-koperasi rakyat untuk menciptakan situasi strategis yang lebih menguntungkan bagi gerakan demokrasi. Berbareng dengan makin luasnya gerakan demokrasi maka perlu dibuat rencana non-koperasi dan perlawanan yang lebih ambisius untuk memangkas sumber-sumber kekuasaan diktator guna secara politis melumpuhkan dan kemudian mengakhiri kediktatoran.

Adalah perlu untuk merencanakan secara hati-hati bagaimana memperlemah dukungan rakyat dan kelompok-kelompok yang selama ini mendukung rezim. Adakah sokongannya akan melemah bila kita tunjukkan kebrutalan yang dilakukan oleh rezim, dengan memperlihatkan kemerosotan ekonomi yang timbul akibat kebijakan yang diambil kediktaturan atau dengan memberikan pengertian baru pada mereka bahwa kediktaturan dapat diakhiri. Para penyokong kediktaturan sekurang-kurangnya harus dibujuk untuk bersikap netral atau bahkan menjadi penyokong aktif bagi gerakan demokrasi.

Selama perencanaan dan pelaksanaan pembangkangan politik dan non-koperasi, adalah penting untuk memperhatikan siapa saja pendukung dan pembantu utama rezim termasuk kliknya, partai politik, polisi dan birokrasi, dan khususnya tentara.

Tingkat loyalitas militer baik prajurit maupun perwira kepada diktatur harus dinilai secara seksama untuk mengetahui apakah mungkin mereka dapat dipengaruhi gerakan demokratis. Apakah banyak prajurit biasa yang merasa tidak senang atau ketakutan karena terkena wajib militer? Mungkinkah untuk menjauhkan prajurit dan perwira militer dari rezim dengan alasan pribadi, keluarga atau pandangan politik? Faktor apa saja yang membuat prajurit dan perwira mudah dipengaruhi gerakan demokratis?

Pada masa-masa awal perjuangan pembebasan, strategi khusus harus dikembangkan untuk berkomunikasi dengan tentara dan kelompok fungsionaris. Dengan kata-kata, simbol dan aksi-aksi, gerakan demokrasi bisa mengirim pesan kepada tentara bahwa gerakan akan kuat, tegas dan teguh. Tentara harus belajar bahwa perjuangan memiliki watak khusus. Perlawanan ini ditujukan untuk menghentikan kediktaturan, bukan untuk melawan tentara. Usaha-usaha seperti itu ditujukan untuk memerosotkan moral pasukan

diktatur dan akhirnya mengalihkan loyalitas dan kepatuhan mereka ke pihak gerakan demokratis. Strategi yang sama juga ditujukan pada polisi dan pegawai negeri.

Upaya-upaya untuk menarik simpati dan akhirnya pembangkangan di jajaran rezim diktatur tidak boleh ditafsirkan dorongan kepada militer untuk mengambil jalan pintas melalui tindakan militer. Skenario seperti tidak layak untuk menciptakan demokrasi yang tahan uji karena sebuah kudeta tidak menjawab ketimpangan hubungan kekuasaan antara warga negara dan penguasa. Karenanya, perlu untuk merencanakan bagaimana perwira militer yang simpatik dapat dibuat mengerti bahwa baik kudeta militer maupun perang saudara melawan diktatur tidak diperlukan dan juga tidak diinginkan.

Perwira-perwira yang simpatik bisa memainkan peranan kunci dalam perjuangan demokrasi seperti menyebarluaskan ketidakpuasan dan non-koperasi di kalangan perwira militer, mendorong inefisiensi dan mengabaikan perintah dan menolak untuk melakukan represi. Mungkin pula mereka menawarkan bermacam bantuan kepada gerakan demokrasi, seperti menyediakan jalur aman untuk melarikan diri, memasok informasi, makanan, obat-obatan dan sebagainya.

Tentara merupakan suatu sumber kekuasaan diktatur karena ia mampu menggerakkan unit-unit militer yang berdisiplin dan menghukum pembangkang. Perencana perlawanan harus juga ingat bahwa sangat sulit atau mustahil untuk merobohkan kediktaturan jika polisi, birokrat dan satuan-satuan militer tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada kediktaturan dan tetap mematuhi perintah-perintahnya. Maka dari itu, strategi yang ditujukan untuk membalikkan loyalitas militer perlu didahulukan.

Gerakan demokrasi tidak dibenarkan meminta prajurit dan perwira agar mereka seketika melakukan boikot. Bila

komunikasi dengan mereka dimungkinkan, hendaknya dijelaskan kepada mereka bahwa terdapat banyak cara "pembangangan terselubung" yang relatif lebih aman untuk dilakukan. Polisi dan tentara misalnya dapat melakukan sesuatu agar represi tidak berjalan sebaik yang diinstruksikan, dengan tidak berhasil menemukan orang yang dicari, atau membocorkan rencana represi, penangkapan atas deportasi, dan tidak melaporkan informasi penting kepada atasan. Perwira-perwira yang merasa tidak puas juga dapat mengabaikan perintah dengan tidak meneruskan perintah untuk melakukan represi ke garis komando di bawahnya. Cara yang serupa dapat dilakukan para pegawai negeri, dengan menghilangkan berkas dan mengabaikan perintah, bekerja tidak efisien, dan menjadi "sakit" sehingga perlu tinggal di rumah untuk penyembuhan.

Pergeseran Dalam Strategi

Para perencana strategi perlawanan akan perlu terus menerus menilai bagaimana strategi umum dan strategi kampanye khusus dilaksanakan. Perjuangan yang dilakukan mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam keadaan demikian, perlu dipikirkan cara untuk memperbaiki strategi, mungkinkah pergeseran tanggungjawab pada berbagai kelompok dilakukan masyarakat yang berlainan, menggalang sumber-sumber kekuatan tambahan dan membangun aksi-aksi alternatif. Bila itu sudah dikerjakan, rencana baru harus dilaksanakan dengan segera.

Sebaliknya, bila perjuangan berjalan lebih baik ketimbang yang diharapkan, dan kediktaturan runtuh lebih awal ketimbang pertimbangan sebelumnya, lalu bagaimana kekuatan demokrasi bisa mengumpulkan kemenangan tak terduga itu dan bergerak lebih jauh untuk melumpuhkan kediktaturan ? Kita akan menjelaskan pada bab berikutnya.

BAB IX

RUNTUHNYA KEDIKTATORAN

Efek berlanjut dari kampanye pembangkangan politik yang dijalankan dengan tepat dan membawa hasil akan mendorong perlawanan dan menciptakan serta memperluas perlawanan di tengah masyarakat. Kendali efektif kediktatoran dipersempit. Kampanye ini menanamkan pengalaman penting bagaimana cara menarik kerjasama dan melancarkan pembangkangan politik. Pengalaman itu akan sangat bermanfaat bila tiba waktunya untuk melakukan aksi non koperasi dan pembangkangan secara massal.

Sebagaimana telah dibahas pada Bab III, kepatuhan, kerjasama dan penyerahan adalah hal yang amat dibutuhkan kediktatoran untuk menegakkan kekuatannya. Tanpa akses pada sumber-sumber kekuasaan politik, kekuasaan diktatur akan merosot dan akhirnya runtuh. Usaha-usaha mengikis atau menarik dukungan merupakan tindakan terpenting untuk merubuhkan sebuah kediktaturan. Adalah penting untuk mempelajari bagaimana pengaruh pembangkangan politik terhadap sumber-sumber kekuasaan.

Penolakan dan pembangkangan simbolik sebagian ditujukan untuk menggugat otoritas moral dan politik rezim yakni legitimasinya. Makin besar kekuasaan rezim makin meluas dan kuat pula kepatuhan dan kerjasama yang akan diterimanya. Gugatan moral perlu diwujudkan dalam tindakan untuk secara sungguh-sungguh menentang eksistensi kediktaturan. Penarikan dukungan dan kerjasama diperlukan untuk memotong sumber-sumber kekuasaan rezim.

Sumber kekuasaan terpenting yang kedua adalah **sumber daya manusia**. Untuk itu perlu diketahui jumlah dan kedudukan orang-orang dan kelompok-kelompok yang tunduk, bekerjasama atau membantu penguasa. Jika tindakan non-kooperasi dilakukan sejumlah besar penduduk, rezim dihadapkan pada masalah serius. Jika para pegawai negeri tak bekerja efisien seperti biasanya, atau bahkan cuma duduk-duduk di rumah, maka lumpuhlah aparat administratif rezim.

Jika orang-orang dan kelompok-kelompok yang menjalankan non-kooperasi meliputi mereka yang sebelumnya memasok **keterampilan dan pengetahuan khusus**, kemampuan rezim untuk berbuat sekehendaknya, terus diperlemah. Kemampuannya untuk mengambil keputusan-keputusan yang didasarkan informasi yang cukup, dan kemampuan membuat kebijakan yang efektif akan sangat berkurang. Jika pengaruh-pengaruh psikologis dan ideologis (**faktor-faktor tak kasat mata**), yang biasanya mendorong orang untuk patuh menyokong penguasa, dapat dilunturkan atau dialihkan, warga negara akan semakin condong menarik dukungan dan kerjasamanya.

Akses diktatur terhadap **sumberdaya material** adalah penopang utama kekuasaannya. Bila kendali terhadap sumberdaya keuangan, sistem ekonomi, properti, sumber daya alam, transportasi dan sarana-sarana komunikasi

berada di tangan musuh, baik yang nyata maupun yang potensial, maka sumber kekuasaan mereka yang lain juga dilemahkan atau bahkan terebut. Pemogokan, boikot, dan otonomi yang makin besar dalam ekonomi, komunikasi dan transportasi akan melemahkan rezim.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, kemampuan diktatur untuk mengancam atau memberlakukan sanksi – hukuman terhadap pembangkang dan lawan politik – juga merupakan sumber kekuasaan diktatur. Ada beberapa cara untuk melemahkan sumber kekuasaan ini. Pertama, jika warga negara dipersiapkan sebagaimana layaknya akan menghadapi perang, menerima apapun akibat pembangkangan sebagai harga yang harus dibayar, maka efektifitas sanksi-sanksi akan tidak lagi ampuh (represi diktatur tidak lagi menjamin tumbuhnya kepatuhan). Kedua, polisi dan satuan-satuan militer melakukan pembelotan, secara individu maupun kelompok menolak perintah penangkapan, pemukulan atau penembakan terhadap kaum pembangkang. Jika diktatur tidak lagi bisa mengendalikan polisi atau militer untuk melakukan represi, diktatur sudah berada dalam keadaan tersudut.

Ringkas kata, keberhasilan melawan diktatur memerlukan sikap non-kooperasi, dan perlawanan harus dapat melemahkan dan menyingkirkan sumber-sumber kekuasaan rezim. Bila sumber-sumber kekuasaan tidak diperbaharui, kekuatan sang diktatur akan melemah, merosot dan akhirnya runtuh. Perencanaan pembangkangan politik melawan diktatur harus terarah pada titik sasarannya, yaitu sumber-sumber kekuasaan diktatur yang terpenting.

Memperluas Ruang Kebebasan

Melakukan pembangkangan politik dalam tahap perlawanan politik selektif disertai dengan membangun lembaga-

lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik berarti memperluas "ruang demokrasi" dalam masyarakat dan melonggarkan kendali kediktaturan. Semakin kuat lembaga-lembaga masyarakat berhadap-hadapan dengan kediktaturan, maka apapun kehendak diktatur tidak akan digubris warga negara yang setahap demi setahap membangun masyarakat yang bebas dari kendali diktatur. Jika diktatur berniat ikut campur dan berusaha menghentikan "kebebasan yang sedang meluas" ini, maka perjuangan tanpa-kekerasan dapat dijalankan guna mempertahankan "ruang demokrasi" yang telah berhasil direbut. Seterusnya, kediktaturan akan berhadapan dengan "front" perjuangan yang lain.

Paduan antara perlawanan ini dengan pembangunan lembaga-lembaga akan membawa masyarakat pada kebebasan *de facto*; keruntuhan kediktaturan dan pengukuhan resmi sistem demokratis tidak terelakkan lagi, karena hubungan kekuasaan dalam masyarakat telah berubah secara mendasar.

Polandia pada tahun 1970-an dan 1980-an memberikan contoh yang gamblang, bagaimana kaum oposisi berjuang untuk menghidupkan kembali fungsi lembaga-lembaga masyarakat. Gereja Katolik ketika itu memang sudah diperlemah, tetapi tidak pernah menyerah sepenuhnya pada kendali komunisme. Pada tahun 1976, sejumlah intelektual dan buruh membentuk kelompok kecil, seperti KOR (Komite Pembelaan Buruh), untuk memperjuangkan gagasan-gagasan politik mereka. Organisasi Solidaritas melancarkan pemogokan-pemogokan yang efektif memaksa pemerintah mengumumkan pengakuannya pada tahun 1980. Petani, mahasiswa dan banyak lagi kelompok lainnya membentuk kelompok independennya. Ketika kaum komunis menyadari bahwa kelompok-kelompok ini dapat mengubah perimbangan kekuasaan, sekali lagi Solidaritas diberangus. Komunis kembali menerapkan kekuasaan militer.

Di bawah undang-undang darurat perang, banyak terjadi pemenjaraan dan tindakan-tindakan kekerasan, lembaga-lembaga independen masyarakat mampu terus bertahan. Puluhan koran dan majalah alternatif masih diterbitkan. Penerbit-penerbit buku mengeluarkan ratusan buku tiap tahunnya, sementara penulis-penulis terkemuka memboikot publikasi berhaluan komunis dan balai-balai penerbitan pemerintah. Perlawanan serupa juga berlangsung di berbagai sektor dalam masyarakat.

Di bawah rezim militer Jaruselski, pemerintahan komunis militer berada di puncak piramida masyarakat. Pejabat-pejabat menguasai kantor dan gedung-gedung pemerintah. Rezim masih memiliki kekuatan menekan, dengan menjatuhkan hukuman, melakukan penangkapan, pemenjaraan, menyita percetakan dan sebagainya. Namun demikian, kediktatoran tidak mampu mengendalikan masyarakat sepenuhnya. Waktu belaka yang akan membuktikan bahwa masyarakat memiliki kesanggupan menggulingkan rezim ini.

Sekalipun diktator bercokol di kedudukannya, dimungkinkan untuk mendirikan "pemerintah tandingan" demokratis. Akan semakin kuat pula peran "Pemerintah bayangan" sebagai penantang dari pemerintah (diktator), ke pihak mana kesetiaan, kerjasama dan sokongan warga negara dan lembaga-lembaga masyarakat diberikan. Dari waktu ke waktu, kediktatoran akan semakin terdesak oleh pemerintahan "tandingan". Akan tiba saatnya, dalam proses peralihan menuju sistem demokratis, pemerintahan tandingan demokratis sepenuhnya menggantikan rezim diktator. Lalu susul dengan pengesahan konstitusi baru dan dilangsungkannya pemilihan umum, sebagai bagian dari masa peralihan.

Runtuhnya Kediktatoran

Sementara perubahan institusional masyarakat sedang berlangsung, perlawanan dan tindakan non-kooperasi terus

memuncak. Para ahli strategi gerakan demokratis sejak awal perlu memperhitungkan akan tiba waktu ketika kekuatan demokratik telah melampaui tahap perlawanan selektif dan menginjak tahap perlawanan massa. Banyak kasus memperlihatkan bahwa dibutuhkan waktu beberapa tahun saja untuk menciptakan, membangun atau memperbesar kapasitas perlawanan selektif dan mengembangkan perlawanan massa. Inilah saat untuk meningkatkan kampanye perlawanan selektif pada sasaran-sasaran politik yang lebih penting lagi. Bagian terbesar warga masyarakat dari segala lapisan harus terlibat. Terus ditekan pembangkangan politik yang terarah dan berdisiplin, dengan sendirinya kelemahan-kelemahan internal kediktaturan akan semakin terkuak.

Pembangkangan politik ditambah penguatan lembaga-lembaga mandiri akan segera mengundang perhatian masyarakat internasional yang menguntungkan kekuatan demokratis. Biasanya kemudian ditimpali dengan kecaman internasional, boikot dan bahkan embargo dalam rangka mendukung kekuatan demokratis (seperti yang terjadi di Polandia).

Perencana strategis harus menyadari bahwa pada banyak contoh keruntuhan kediktaturan, di Jerman Timur pada tahun 1989 misalnya, berlangsung sangat cepat. Hal ini terjadi karena sumber-sumber kekuasaannya secara massif merosot, dilucuti perlawanan segenap rakyat. Namun pola-pola yang demikian ini tidak senantiasa terjadi. Maka sungguh bijak rencana strategis bagi perjuangan jangka panjang dipersiapkan (dengan tetap mencermati proses yang mungkin akan bergerak sangat cepat).

Dalam perjalanan menuju kebebasan, kemenangan kecil sekalipun harus dirayakan. Berikan penghargaan pada mereka yang sudah bekerja keras. Perayaan kemenangan, tanpa mengendurkan kewaspadaan, amat diperlukan untuk

memelihara semangat perlawanan untuk maju terus ke tahap berikutnya.

Mempertanggung-jawabkan Kemenangan

Jauh sebelumnya perencana strategi umum harus melalui cara penyelesaian yang paling mungkin dan yang diinginkan untuk mencegah naiknya diktatur baru, dan menjamin pembentukan secara bertahap sistem demokratis yang terandalkan.

Kaum demokrat harus merancang peralihan transisi dari kediktaturan ke pemerintahan sementara. Pemerintahan baru harus segera berfungsi. Bukan sekedar mendudukkan orang baru yang menggantikan diktatur lama. Beberapa bagian dari struktur pemerintahan lama (seperti polisi politik) harus sepenuhnya dihapuskan karena watak anti-demokrasi yang melekat pada mereka. Beberapa bagian lain perlu dipertahankan untuk membangun demokrasi. Tanpa kehadiran pemerintah yang berfungsi, akan timbul kekacauan atau kediktaturan baru.

Perlu dipikirkan jauh hari sebelumnya keputusan yang akan diambil terhadap pejabat-pejabat tinggi dari kediktaturan lama. Diajukan ke pengadilan? Diusir ke luar-negeri untuk selama-lamanya? Adakah pilihan keputusan lain yang sejalan dengan semangat pembangkangan politik? Setelah kemenangan dicapai, apa yang harus dilakukan untuk menata kembali negara ini, lalu membangun demokrasi? Banjir darah harus dicegah karena yang demikian ini dapat menimbulkan akibat-akibat yang sangat buruk bagi kelangsungan sistem demokrasi di masa depan.

Rencana-rencana khusus dalam peralihan menuju demokrasi mesti sudah dimatangkan pada saat diktatur sudah di ambang keruntuhannya. Rencana yang matang akan menghadang kelompok-kelompok lain mengambil alih

kekuasaan melalui kudeta. Rancangan undang-undang yang demokratis, menjunjung tinggi kebebasan politik dan kebebasan pribadi, harus disiapkan. Segala kerja keras dan pengorbanan tidak semestinya hilang begitu saja hanya karena kelemahan perencanaan.

Berhadapan dengan rakyat yang makin kuat dan pertumbuhan pesat lembaga-lembaga demokratis yang mandiri – bebas dari kendali pemerintah diktatur – maka diktatur akan menghadapi kenyataan bahwa kejatuhan sudah di depan mata.

Aksi rakyat yang semakin meluas, pemogokan umum, aksi boikot tinggal di rumah, pawai-pawai perlawanan dan aktivitas lainnya akan menyurutkan fungsi lembaga dan organisasi milik diktatur. Perlawanan dan aksi non-koperasi semacam itu, yang digarap dengan cakap dan bijak dengan partisipasi massa dari waktu ke waktu, akan melumpuhkan kediktaturan. Pejuang demokrasi akan memetik kemenangan, tanpa kekerasan. Kediktaturan bertekuk-lutut di hadapan rakyat.

Bagaimanapun tidak semua usaha niscaya membuahkan hasil, sekurang-kurangnya tidak semua mudah dilakukan dan menampakkan hasil yang segera. Ingatlah bahwa dalam pertempuran bersenjata, kita mungkin kalah tapi juga mungkin menang. Sementara pembangkangan politik menawarkan kemungkinan nyata untuk menang. Sebagaimana dinyatakan di depan, peluang untuk menang dapat diperbesar melalui pengembangan strategi umum, perencanaan strategis yang teliti, kerja keras, dan perjuangan yang berani dan berdisiplin.

BAB X

LANDASAN BAGI SISTEM DEMOKRASI YANG TERANDALKAN

Ambruknya kediktaturan sudah barang-tentu menimbulkan sukacita yang luar biasa. Rakyat yang demikian lama hidup sengsara dan berjuang dengan pengorbanan tak terhingga layak menikmati saat-saat menggembirakan, terlepas dari beban dan memperoleh pengakuan. Mereka tentu bangga akan dirinya dan sesama teman seperjuangan yang telah berjuang untuk kebebasan politik. Mereka yang hidup maupun yang terbunuh layak dikenang sebagai pahlawan pembuat sejarah perjuangan pembebasan negeri mereka.

Namun saat-saat seperti itu, mengendorkan kesiagaan adalah tindakan keliru. Di tengah-tengah keruntuhan kediktaturan oleh pembangkangan, mesti segera diambil langkah-langkah untuk menghadang kemungkinan munculnya rezim penindas baru. Pimpinan gerakan pro-demokrasi harus pula terlebih dahulu menciptakan tradisi yang teratur untuk menegakkan demokrasi. Struktur yang diktatorial harus segera dihapuskan. Dasar-dasar konstitusional dan

hukum serta standar demokrasi tangguh harus cepat-cepat disusun.

Tak seorang pun percaya bahwa keruntuhan kediktaturan akan langsung mewujudkan masyarakat ideal. Keruntuhan kediktaturan sekadar menyediakan ayunan langkah permulaan, di bawah kebebasan yang makin diperluas untuk memudahkan usaha-usaha jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan agar rakyat dapat hidup lebih layak. Masalah-masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius akan terus berlanjut untuk beberapa tahun, dan karenanya memerlukan kerjasama banyak orang dan kelompok guna mengupayakan jalan keluar. Sistem politik baru harus menyediakan kesempatan bagi rakyat dengan aneka ragam pandangan dan langkah-langkah untuk melanjutkan kerja-kerja penataan kembali dan pembangunan politik untuk menghadapi masalah di hari depan.

Ancaman Kediktatoran Baru

Berabad-abad yang lampau Aristoteles telah mengingatkan "tirani juga bisa berubah menjadi tirani..."¹⁴ Sejarah Perancis (Jakobins dan Napoleon), Rusia (Bolshevik), Iran (Ayatollah), Burma (SLORC) dan negeri-negeri lain memperlihatkan bahwa ambuknya rezim yang opresif akan dibaca sementara orang dan kelompok sebagai kesempatan untuk mendaki tangga kekuasaan dan menjadi tuan baru. Memang mereka mempunyai motif yang beragam, tetapi akibat yang ditimbulkan seringkali sama saja. Kediktaturan yang baru bisa jadi akan lebih kejam, dan kontrolnya lebih ketat ketimbang rezim lama.

14. Aristotles, *The Politics*, Buku V Bab 12, hlm. 233

Menghadang kudeta

Selalu ada cara untuk mematahkan upaya kudeta dalam masyarakat yang baru terbebaskan. Pemahaman dan pengalaman mengenai cara-cara pertahanan mungkin memadai untuk menangkal kudeta. Langkah-langkah pencegahan yang baik akan dapat menangkal kudeta.

Biasanya, segera sesudah kudeta diletuskan, kaum petualang membutuhkan legitimasi yaitu mandat atas hak moral dan politik mereka untuk mengambil-alih kekuasaan. Maka prinsip dasar pertama untuk menjawab kudeta adalah menolak memberikan legitimasi kepada kelompok petualang itu.

Kaum petualang juga membutuhkan dukungan dari pimpinan sipil dan warga masyarakat. Juga diperlukan bantuan para ahli dan penasehat, para birokrat dan pegawai negeri, penata administrasi dan hakim untuk memuluskan usaha mengendalikan masyarakat. Pelaku kudeta itu juga memerlukan banyak orang untuk menjalankan sistem politik, lembaga-lembaga masyarakat, ekonomi. Sementara polisi dan militer akan mundur ke peranan mereka yang biasa, tunduk pada ketentuan dan kebijakan yang diambil pelaku kudeta.

Prinsip dasar kedua untuk menghadapi kudeta adalah melawan dengan non-koperasi dan pembangkangan. Kerjasama dan bantuan yang mereka tawarkan harus ditolak. Semua saran yang dulu digunakan untuk melawan kediktaturan lama harus segera didaya gunakan untuk melawan ancaman baru. Jika rakyat menolak memberikan kerjasama dan legitimasi, maka kudeta itu akan mati karena gagal memperoleh dukungan politik, dan tugas selanjutnya adalah memulihkan proses pembangunan masyarakat yang demokrastis.

Merancang Konstitusi

Sistem demokrasi yang baru memerlukan konstitusi untuk menegakkan kerangka pemerintahan demokratis yang dicita-citakan. Konstitusi harus menyatakan tujuan pemerintahan, batas-batas kekuasaan pemerintah, cara dan waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk menentukan pejabat dan wakil rakyat, hak-hak dasar yang melekat pada rakyat, hubungan pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat yang rendah.

Pada tingkat pemerintahan pusat, jika ingin bersetia pada prinsip demokrasi, harus ditegaskan pemisahan wewenang antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan badan-badan kehakiman. Harus pula dibuat pembatasan-pembatasan ketat terhadap kepolisian, dinas intelijen dan militer untuk mencegah campur tangan mereka dalam politik.

Demi memelihara sistem demokratis dan menghalangi gerak dan langkah-langkah diktatorial, konstitusi haruslah menyatakan sistem federal dengan hak-hak prerogatif yang sangat berarti diberikan bagi pemerintahan pada tingkat regional, negara dan lokal. Dalam keadaan tertentu, sistem Swiss mungkin bisa menjadi pertimbangan dimana sejumlah kecil wilayah memiliki hak khusus, sementara wilayah selebihnya memiliki kedudukan yang setara.

Jika konstitusi dengan ciri-ciri tersebut sudah pernah ada dalam sejarah negeri-negeri yang baru terbebaskan, hal yang sebaiknya dilakukan adalah menghidupkan konstitusi itu, dengan penambahan seperlunya sesuai kebutuhan dan keinginan bersama. Bila tidak ada konstitusi lama yang sesuai, perlu segera disusun yang baru. Menyiapkan konstitusi baru memang membutuhkan waktu dan pikiran. Proses ini membutuhkan dan menuntut partisipasi rakyat dalam tahap ratifikasi naskah atau amandemen. Hindarilah untuk memasukkan janji-janji yang kelak tidak mungkin dilak-

sanakan atau ketentuan-ketentuan yang akan membutuhkan pemerintahan yang sangat terpusat, karena kedua-duanya hanya akan membantu lahirnya diktatur baru.

Naskah konstitusi harus mudah dipahami oleh rakyat biasa. Tidak ada yang berpendapat bahwa konstitusi tidak harus ditulis dalam kalimat-kalimat yang rumit, pelik atau meragukan, sehingga hanya bisa dimengerti oleh kaum elite atau pengacara saja.

Kebijakan Pertahanan Demokratis

Negeri yang baru saja dibebaskan mungkin harus menghadapi ancaman kekuatan asing oleh karenanya kemampuan pertahanan keamanan juga diperlukan. Negeri itu mungkin juga diancam oleh usaha-usaha asing untuk mengukuhkan dominasi ekonomi, politik dan militer mereka.

Untuk mempertahankan demokrasi di dalam negeri, pertimbangan masak harus dipakai untuk menerapkan prinsip-prinsip pokok pembangkangan politik bagi kepentingan pertahanan nasional. Dengan meletakkan kapasitas perlawanan secara langsung di tangan rakyat, negeri-negeri yang baru bebas bisa mencegah gagasan membangun kemampuan militer yang kuat, yang dengan sendirinya dapat mengancam demokrasi atau harus ditukar dengan sumberdaya ekonomi yang besar, yang sesungguhnya sangat diperlukan untuk program-program lainnya.

Harus diingat bahwa sebagian kelompok akan mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, guna mencari jalan untuk menjadi diktatur baru. Oleh karena itu rakyat perlu diberi peranan tetap untuk melaksanakan perlawanan politik dan non-koperasi terhadap calon-calon diktatur, serta mempertahankan struktur, hak dan tata-cara yang demokratis.

Tanggung Jawab Mulia

Perjuangan tanpa kekerasan sanggup menggoyah dan menyingkirkan kediktaturan juga memperkuat kaum tertindas. Cara perjuangan ini memungkinkan rakyat, yang sebelumnya hanya diperalat atau menjadi korban langsung kekuasaan, untuk meraih kebebasan dan keadilan yang lebih besar melalui usaha-usahanya sendiri. Pengalaman perjuangan ini juga memiliki konsekuensi psikologis yang besar, yakni mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri bagi rakyat yang sebelumnya tak berdaya.

Manfaat jangka panjang dari penggunaan perjuangan tanpa-kekerasan sebagai usaha menciptakan pemerintahan demokratis adalah membuat masyarakat lebih mampu memecahkan masalah-masalah di kemudian hari. Masalah-masalah tersebut meliputi, kesewenang-wenangan pemerintahan, salah urus, ketidakadilan ekonomi dan pembatasan-pembatasan kualitas demokratis sistem politik. Rakyat yang sudah mengenal baik pembangkangan politik tidak mudah dikuasai kediktaturan.

Sesudah masa-masa pembebasan, kebiasaan dan kemampuan dengan perjuangan tanpa-kekerasan akan bermanfaat untuk melindungi demokrasi, kebebasan sipil, hak-hak minoritas, hak-hak prerogatif pemerintahan setempat dan regional dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Cara perjuangan seperti itu juga membuat semua orang dan kelompok berhak menyatakan perbedaan pendapat secara damai pada isu-isu penting yang bisa dimanfaatkan sebagai dalih bagi kelompok-kelompok oposisi untuk beralih ke cara-cara teror atau perang gerilya.

Gagasan pembangkangan politik atau perjuangan tanpa-kekerasan dimaksudkan untuk membantu semua orang dan kelompok, yang berjuang membebaskan rakyatnya dari penindasan diktatur, membentuk sistem demokratis tangguh

yang menghargai kebebasan manusia dan inisiatif rakyat demi kemajuan bersama.

Ini adalah tiga kesimpulan utama dari perlawanan anti-kekerasan:

- Pembebasan dari kediktatoran adalah sesuatu yang mungkin
- Diperlukan perencanaan yang matang dan strategis untuk mencapainya, dan
- Dibutuhkan juga kewaspadaan, kerja keras dan disiplin, serta pengorbanan yang tidak sedikit

Benar pepatah lama yang mengatakan "tidak ada kebebasan cuma-cuma". Tiada pernah pihak lain memberikan kebebasan bagi rakyat tertindas. Kebebasan harus direbut dan rakyat harus belajar bagaimana merebut kebebasan itu. Upaya yang tidak mudah.

Manakala rakyat paham apa dituntut dari mereka untuk pembebasan, mereka akan maju terus, sekalipun harus menempuh jalan panjang dan berliku, untuk akhirnya meraih kebebasan. Dengan suatu ketekunan mereka membangun kembali tatanan yang demokratis dan menyiapkan cara mempertahankannya. Kebebasan yang diraih dengan cara demikian akan berumur panjang. Terpelihara di tangan rakyat yang membaktikan diri untuk demi kelangsungan dan kemajuan kebebasan.

LAMPIRAN

Metode Perlawanan Tanpa Kekerasan¹⁵:

Pernyataan Resmi

1. Pidato umum
2. Surat dukungan atau oposisi
3. Deklarasi oleh Organisasi atau lembaga masyarakat
4. Pernyataan yang ditandatangani publik
5. Surat Kecamatan
6. Petisi massa atau kelompok

Komunikasi publik.

7. Slogan, karikatur dan simbol-simbol
8. Bendera, poster dan spanduk
9. Selebaran, pamflet dan brosur
10. Koran dan jurnal
11. Radio, TV, dan media elektronik
12. Umbul-umbul, balon bertulisan atau coret-coret di jalanan

Perwakilan kelompok

13. Perutusan khusus

15. Daftar ini lengkap dengan penjelasan dan contoh dalam sejarah dapat dilihat pada Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action*, bagian kedua, *The Method of Nonviolent Action*.

14. Piagam penghargaan yang dimaksudkan untuk lelucon
15. Lobi kelompok
16. Pagar betis
17. Pemilu tidak sungguhan

Aksi-aksi simbolik

18. Pengibaran bendera dan umbul-umbul
19. Mengenakkan simbol-simbol khusus
20. Berdoa dan beribadah
21. Mengirimkan benda yang memiliki simbol perlawanan tertentu
22. Aksi protes
23. Merusak harta benda sendiri
24. Membuat cahaya-cahaya simbolik
25. Memamerkan foto-foto
26. Protes corat-coret
27. Memakai tanda dan memberi nama atau julukan baru
28. Bunyi-bunyian simbolik
29. Pendudukan suatu tempat secara simbolik
30. Aba-aba tubuh yang kasar

Tekanan terhadap individu

31. "Membidik" pejabat
32. Mengejek pejabat
33. Berlagak bersahabat
34. Apel siaga

Drama dan musik

35. Lawak atau drama pendek
36. Sandiwara dan musik
37. Menyanyi

Prosesi/upacara

38. Pawai jalan kaki
39. Parade
40. Prosesi agama
41. Ziarah
42. Pawai motor

Perkabungan

43. Perkabungan politik
44. Penguburan sindiran
45. Layatan demonstratif
46. Ziarah dan penghormatan pada tempat pemakaman

Rapat umum

47. Rapat umum atau memprotes
48. Pertemuan protes
49. Pertemuan protes terselubung
50. Diskusi terbuka

Penarikan dukungan

51. Menarik diri (walk-out)
52. Aksi diam
53. Pembatalan penghargaan
54. Menarik pengakuan

METODE NON-KOOPERASI SOSIAL

Mengucilkan orang

55. Boikot
56. Boikot sosial selektif
57. Pengacuhan orang
58. Pemecatan dari keanggotaan lembaga keagamaan
59. Menghentikan kegiatan

Nonkooperasi dengan peristiwa, adat atau lembaga

60. Penundaan kegiatan sosial dan olahraga
61. Boikot kegiatan sosial
62. Pemogokan mahasiswa
63. Pembangkangan sosial
64. Keluar dari lembaga sosial

Pengunduran diri dari sistem sosial

65. Tinggal di rumah
66. Non-kooperasi total
67. Buruh-buruh kabur

68. Menyepi
69. Menyingkir bersama-sama
70. Hijrah

METODE-METODE NONKOOPERASI EKONOMI

Aksi oleh konsumen

71. Boikot konsumen
72. Tidak mengkonsumsi makanan yang diboikot
73. Kebijakan penghematan
74. Tidak membayar sewa
75. Menolak untuk menyewa
76. Boikot konsumen nasional
77. Boikot konsumen internasional

Aksi oleh buruh dan produsen

78. Boikot pekerja
79. Boikot produsen

Aksi oleh pihak perantara

80. Boikot pemasok dan pengecer

Aksi oleh pemilik dan manajemen

81. Boikot pedagang
82. Menolak menjual properti
83. Menutup pabrik
84. Menolak bantuan industri
85. Mogok umum pedagang

Aksi oleh pemegang sumber daya keuangan

86. Penarikan deposito bank
87. Menolak membayar bea, dan pungutan
88. Menolak membayar utang dan bunga
89. Penciutan, pemotongan kredit dan dana
90. Menolak membayar pajak
91. Menolak bantuan pemerintah

Aksi pemerintah

92. Embargo dalam negeri

93. Daftar hitam pedagang
94. Embargo para pembeli internasional
95. Embargo para penjual internasional
96. Embargo perdagangan internasional

METODE NONKOOPERASI EKONOMI

Pemogokan simbolis

97. Mogok protes
98. Mogok seketika di tempat

Pemogokan kaum desa

99. Pemogokan petani
100. Pemogokan buruh perkebunan

Pemogokan oleh masyarakat tertentu

101. Pemogokan buruh yang masih ditekan
102. Pemogokan para tahanan
103. Pemogokan industri sejenis
104. Pemogokan kaum profesional

Pemogokan industri biasa

105. Pemogokan seluruh perusahaan
106. Pemogokan industri
107. Pemogokan simpatik

Pemogokan terbatas

108. Pemogokan di bagian tertentu
109. Pemogokan sebagai tameng
110. Berlambat-lambat
111. Pemogokan sebagai kerja
112. Aksi sakit
113. Aksi mundur/keluar
114. Aksi terbatas
115. Aksi di tempat-tempat/bagian tertentu

Pemogokan multi industri

116. Pemogokan yang diumumkan
117. Pemogokan umum

Kombinasi mogok dan penghentian kegiatan ekonomi

118. Penghentian kegiatan produksi

119. Tutup tempat kerja

METODE NON- KOOPERASI POLITIK

120. Tidak memberi atau menolak sokongan

121. Menolak dukungan publik

122. Pidato-pidato dan karya sastra yang menganjurkan perlawanan

Penolakan kerjasama warga negara kepada pemerintah

123. Boikot badan-badan legislatif

124. Boikot pemilu

125. Boikot kedudukan dan pekerjaan pemerintah

126. Boikot badan-badan, kantor dan departemen pemerintah

127. Menarik diri dari lembaga pendidikan pemerintah

128. Boikot terhadap organisasi dukungan pemerintah

129. Menolak memberi dukungan ke badan-badan pelaksana

130. Menghapus tanda diri dan tanda-tanda tempat

131. Menolak pengangkatan sebagai pejabat

132. Menolak membubarkan yang ada

Alternatif warga negara

133. Pernyataan keberatan

134. Pembangkangan ketika tidak diawasi

135. Pembangkangan umum

136. Pembangkangan terselubung

137. Menolak untuk berkumpul atau bubar

138. Aksi duduk

139. Non kooperasi dengan konkripsi dan deportasi

140. Sembunyi, melarikan diri atau identitas palsu

141. Pembangkangan warga terhadap aturan yang "tidak sah"

Aksi oleh personil pemerintah

142. Penolakan pembantuan selektif oleh pembantu pemerintah

143. Menutup arus komando dan informasi
144. Mengelak perintah dan berlambat-lambat
145. Non-kooperasi administrasi umum
146. Inefisiensi yang disengaja oleh badan-badan pelaksana
147. Pembelotan

Aksi pemerintah dalam negeri

149. Penundaan dan pembatasan kuasa legal
150. Non-kooperasi oleh unit-unit pemerintah

Aksi oleh pemerintah /lembaga international

151. Mengubah status hubungan diplomatik dan wujud lainnya
152. Penundaan dan pembatalan hubungan diplomatik
153. Tidak memberi pengakuan diplomatik
154. Penciutan hubungan diplomatik
155. Penarikan diri dari organisasi international
156. Penolakan keanggotaan di badan-badan internasional
157. Pemecatan dari organisasi

METODE INTERVENSI TANPA KEKERASAN

Intervensi psikologis

158. Pemakluman diri untuk melawan tanpa kekerasan
159. Puasa :
 - (a) Puasa sebagai tekanan moral
 - (b) Mogok makan
 - (c) Puasa ala styagraha
160. Mengganggu pengadilan
161. Pelecehan tanpa kekerasan

Intervensi fisik

162. Mogok duduk
163. Mogok berdiri
164. Mogok jalan
165. Mogok menyeberang
166. Mogok kerja
167. Mogok kerja (pray-in)
168. Razia tanpa kekerasan

169. Pengepungan tanpa kekerasan
170. Pendudukan tanpa kekerasan
171. Pencegatan tanpa kekerasan
172. Penghadangan tanpa kekerasan
173. Pendudukan tanpa kekerasan

Intervensi sosial

174. Mengajukan pola-pola sosial baru
175. Membanjiri fasilitas-fasilitas
176. Mengulur waktu
177. Mogok omong
178. Teater gerilya
179. Lembaga sosial alternatif
180. Sistem komunikasi alternatif

Intervensi ekonomi

181. Mogok sekedar mengganggu
182. Mogok tinggal
183. Pengambilan tanah tanpa kekerasan
184. Blokade perlawanan
185. Pemalsuan untuk tujuan politik
186. Pembelian secara gelap
187. Pengakuan kekayaan
188. Banting harga
189. Mengikuti kegiatan secara selektif
190. Pasar alternatif
191. Sistem transportasi alternatif
192. Lembaga ekonomi alternatif

Intervensi politik

193. Membanjiri sistem administrasi
194. Pembeberan agen-agen dinas rahasia
195. Meminta dipenjara
196. Pembangkangan massa atas undang-undang yang tidak adil
197. Menolak uluran kerja sama atau bantuan
198. Dua kedaulatan dan pemerintahan bayangan

INDEKS

A

Achilles, 31
Afrika, xiii, xviii, 28; -- Selatan, xiii
agen provokasi, 71; penyusupan, 71
akomodasi, 45; mekanisme, 45
aksi kontra produktif, 61; penyingkiran dari strategi umum, 61
aksi simbolik, 75
aksitanpa kekerasan, 38, 43, 93; metode khusus, 38; standar perilaku dalam, 43
Aljazair, xiii
amandemen, 91
Amerika, xviii, 28; -- Latin, xviii
Amerika Serikat, 20
ancaman represi, 69
Apartheid, xiii; -- rezim, xiii
apel siaga, 74
Arabia, 3
Argentina, 1
Aristoteles, xv, 20, 89; pemikiran, xv
Asia, xiv, 28
Austin, John, 27
Australia, 28

B

Beijing, 75
Bhutan, 3
Blok Timur, negeri-negeri, 7
Bolivia, 1
Brazil, 1
Bulgaria, 1
Burma, xvi, 3, 8, 89
buruh, 13; konflik, 13; serikat, 13

C

Cekoslowakia, 1, 20, 27
Chu, negeri feodal, 23
Cili, xvi, 1
Cina, vii, xvi, 3, 22; -- Komunis, xvi
Coady, Stephem, xviii
Cracks in the Monolith, 26^c

D

dampak tekanan internasional, 63
demokrasi, 78, 79, 86, 87, 91, 92; ancaman, 92; gerakan pro, 88; kekuatan, 79; pejuang, 87; peralihan menuju --, 86; prinsip, 91; sistem, 91; standar, 89; -- yang tahan uji, 78
Deutsch, Karl W., 26
diktator, xiv, 1, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 60, 61, 64, 67, 71, 74, 78, 82, 84, 86, 92, 93; Amerika Latin, viii, ancaman calon, 47; -- baru 47, 50, 62, 86, 92; dominasi, 17; kasus ekstrim, 17; kekerasan, 15; kekuasaan politik, 26; kerapuhan, 20, 60; -- lama, 86; operasi, 42; pembangkang dan lawan politik, 82; penindasan, 93; penyingkiran, 60; posisi politik, 41; rezim, 29, 34; sumber-sumber kekuasaan, 64, 67, 78, 82

Discourses on the First Ten Books of Livy, The, 27^c

distribusi kekuasaan, 62
dominasi, 92; -- ekonomi, 92; -- militer, 92; -- politik, 92

E

El Salvador, 20
Eropa, 27, 28; runtuhnya komunisme, 27
Estonia, 1

F

Ferrara, xvi
Filipina, viii, 1, 20
Freedom in the World, 3^c
Friedrich, Carl J., 26^c

G

gagasan nonkooperasi, 68, 69, 74, 75, 78, 81; konsep umum, 69
gerakan demokratis, 76, 77, 85; ahli strategi, 85
Gestapu, v
Guatemala, 20

H

Haiti, 1
hak prerogatif, 91, 93; -- pemertintahan setempat, 93
Helvey, Robert, xviii, 2^c, 55^c
History of Ireland under a Union, 1880-1992, A, 11^c
Hitler, v, 34
House, Freedom, 3
Hungaria, 1, 29; revolusi, 29

I

Inggris, 27; teoretisi hukum, 27
"instruksi perlawanan", 69; penyerbaran, 69
Irak, 3

Italia, xvi; -- Utara, xviii

J

Jaruselski, 84; rezim militer, 84
Jerman, 27
Jerman Timur, 1, 20, 85; kediktatoran, 85

K

Kaishek, Chiang, xv
kamp konsentrasi, xv
kampanye perlawanan, 75, 76, 85; pentahapan, 76; -- selektif, 85
kampanye pembangkangan, 80
Katolik, 83; lembaga gereja, 83
kaum demokrat, 74, 86; semangat perlawanan, 86
kediktatoran, xvi, xvii, 1, 5, 6, 9, 12, 14, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 46, 50, 51, 53, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 88, 89, 93, 94; ancaman -- baru, 89; ciri khusus, 30; hirarki kekuasaan, 33, 75, 76; kejatuhan, 1, 2, 30;

kekuatan utama, 60; kendali efektif, 80, 83; keruntuhan, 80, 84, 85, 89; komunis, 20; langkah untuk menggulingkan, 53; masalah, 9; -- modern, 20; pembebasan dari, 94; pendukung, 30; penggulingan, 60; perlawanan bersenjata melawan, 36; perombakan sistem, 51; represi kekerasan dari, 62; strategi kampanye melawan, 66, 77; sumber kekuasaan, 75, 76; titik kelemahan, 32, 34; tekanan terhadap, 63; -- totaliter, 26; usaha melawan, 58; wajah, xvi; Komite Pembelaan Buruh (KOR), 83

Komunikasi Pribadi, 55^c

Komunis, 69, 83, 84; kekuasaan, 69, 83; pemerintah, 84; publikasi berhaluan, 84

kondisi represi, 26
konflik, 33, 43; -- bersenjata, 43; -- internal kelembagaan, 33

konstitusi, 92; naskah, 92
konversi, 44, 45; kasus, 44; mekanisme, 44, 45

Korea, 3; -- Utara, 3

Kruegler, Dr. Christoper, xviii
kudeta, 78, 86, 90; langkah pencegahan, 90; legitimasi, 90; upaya menghadang, 90

L

Latvia, 1
Lectures on Jurisprudence on the philosophy of Positive Law, 27^c

Lithuania, xvi, 1

Liu-Ji, 22

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 68

loyalitas dan kepatuhan militer, 78

M

Machiavelli, Niccolo, 27

Madagaskar, 1

Malawi, 1

Mali, 1

Marcos, Presiden, viii, 20; kediktatoran, 20

Mcfersson, Dr. Hazel, xviii

militer, 78; strategi membalikkan loyalitas, 78
mobilisasi rakyat, 62

N

Napoleon Bonaparte, 89
Nazi, xv, 69; kekuasaan, 69; rezim, xv
Nigeria, 1, 8
nookooperasi, 87, 90, 92; aksi, 87; -- dan pembangkangan, 90
Noriega, Jenderal, xvi
Norwegia, xv, 27; pendudukan Nazi, 27

O

O'Hegarty, Patrick Sarsfield, 11^c
oposisi; 18, 51, 52; -- demokratis, 18, 22; kaum, 18; posisi defensif kalangan --, 51
otonomi, 76; -- kelompok sosial, 76; - politik, 76
otoritas, 24

P

Panama, xvi
Parkman, Dr. Patricia, xviii
Parnell, Charles Stewart, 10
Pasifik, Kepulauan, 28
Pasukan SS, v
pembangkangan, 78, 79, 80; -- di jajaran rezim diktator, 78; -- massal, 80; -- simbolik, 81; -- terselubung, 79
pemerintah(an), xi, 29, 84, 93; -- bayangan, 84; demokratis, 93; -- diktatoris, xi; sistem federatif, 29; - tandingan, 84
People's Power, viii
pendekatan ideologis, xii
Perancis, 89; kaum Jakobins, 89; sejarah, 89
Perang Troya, 32
perjuangan tanpa kekerasan, 47, 48; - sebagai teknik aksi sosial, 48
Perlawanan selektif, 73, 74, 76; kampanye, 74; sasaran, 73; strategi, 73
Perlawanan massa, 85
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 8, 63, 68

Pinochet, Jenderal, xiii
Plebeia, 27; budak-budak, 27
Polandia, xvi, 20, 27, 29, 85; kekuatan demokratisa, 85
politik, 2^c, 22, 24, 28, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 61, 62, 63, 67, 72, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 93; campur tangan militer dalam --, 91; dukungan, 90; kebebasan, 22; muatan, 72; partai, 28; pembangkangan 2^c, 41, 43, 46, 49, 61, 62, 63, 72, 77, 80, 82, 85, 87, 92, 93; polisi, 42; proses adu silat, 41; salah pendapat tentang kekuasaan, 22; sistem, 89; sumber kekuasaan, 24; tahap perlawanan, 82; visi perubahan, 51

Politics of Nonviolent Action, The, 27^c

Politics, The, 20^c, 89^c

Portugal, v

Q

R

rancangan undang-undang, 87
rencana strategis (komprehensif), 51, 54, 56, 58, 59, 69; pengembangan, 58
represi, 47, 78, 79; langkah tandingan, 70; situasi di bawah, 47
"revolusi istana", 62
rezim, 45, 46, 77, 81, 82, 84, 88, 89; ancaman represi kekerasan, 47; aparat administratif, 81; citra -- di mata internasional, 45; -- opresif, 89; otoritas moral dan politik, 81; penindas baru, 88; sumber-sumber kekuasaan, 81, 82

Riga, xvi

"ruang demokrasi", 83

Rule of Tricks, 23^c

Rusia, xvi, 89; kaum Bolshevik, 89

S

Salzar, kediktatoran, v
sanksi diplomatik, 63
Shah Iran, 20; rezim militer, 20
Sharp, Gene, xi, 27^c; kerangka pemikiran, xiii

Shridharani, Krisnala, 18
sikap nonkooperasi, 82
sistem demokratis, 84, 86, 91, 93;
 usaha memelihara, 91
situasi konflik, 60
Slowakia, 27
Solidaritas, Serikat Buruh, 30, 83; aksi
 mogok, 83
Stalin, xv
strategi kampanye, 71, 72, 74, 75, 76;
 keberhasilan, 72; dampak moral
 dan psikologis, 75
strategi pembebasan, 46
strategi perlawanan, 59, 79;
 penyusunan, 59; perbaikan, 79
Styx, Sungai, 32
sumber daya manusia, 81
sumber daya material, 81

T

tahanan politik, 15
tantangan simbolik, 74
Tibet, xvi, 2, 3
Tiananmen, Lapangan, xvi, 75
Timor Timur, 3
tingkat loyalitas militer, 77
tiran, 18
tirani, 20

Tito, Marsekal, viii
tokoh oposisi demokratis, 76
Totalitarianism, 26^c

U

Uni Soviet, xvi, 1, 7, 20; usaha kudeta
 garis keras, 20; wilayah bekas, 1
undang-undang darurat perang, 84

V

Vilnius, xvi

W

*War without Violence: A Study of
 Gandhi's Method and its Accom-
 plishments*, 18^c

X

Y

Yugoslavia, xiv
Yu-li-Zi, 23^c, 24
Yunani, 31; motos klasik, 31, 32

Z

Zaire, 1
Zedong, Mao, vii

BAHAN BACAAN TENTANG TINDAKAN TANPA KEKERASAN

oleh Gene Sharp

Civilian-based Defense: A Post-military Weapons System, by Gene Sharp with the assistance of Bruce Jenkins. Princeton: Princeton University Press, 1990

Gandhi as a Political Strategist by Gene Sharp. Boston: Porter Sargent, 1979.

Making Europe Unconquerable: The Potential of Civilian-based Deterrence and Defense, by Gene Sharp. New York: Ballinger Publishing, 1995.

National Security Through Civilian-based Defense, by Gene Sharp. Omaha: Civilian-Based Defense Association, 1985.

Nonviolent Action: A Research Guide, by Ronald McCarthy, Gene Sharp, with the assistance of Brad Bennett. (An annotated bibliography of English language books on nonviolent struggle.) New York: Garland Publishing Inc., 1994 (forthcoming).

The Politics of Nonviolent Action (3 Vols.), by Gene Sharp. Boston: Porter Sargent, 1973.

Resistance, Politics, and the American Struggle for Independence, 1765-1775, by Walter Conser, Ronald McCarthy, David Toscano, and Gene Sharp, editors. Boulder: Lynne Rienner, 1986.

The Role of Power in Nonviolent Struggle (pamphlet), by Gene Sharp Cambridge, Mass.: Albert Einstein Institution, 1990.

Social Power and Political Freedom by Gene Sharp. Boston: Porter Sargent, 1980.

BAHAN PUBLIKASI DALAM BAHASA BELANDA

Naar een onveroverbaar Europa: De kracht van civiele afschrikking en sociale verdediging, (Translation of *Making Europe Unconquerable.*) by Gene Sharp. Translated by Peter Kruijt, Wim Robben and Mark Hierman. Antwerp: International Vredesinformatiedienst, 1988.

Macht en strijd: Theorie en praktijk van geweldloze actie [Power and Struggle: Theory and practice of nonviolent action]. (Excerpts from *The Politics of Nonviolent Action.*) Introduction by Professor Peter Kooijmans. Translated by Jenny de Graaf. Utrecht and Antwerp: Het Spectrum, 1982.

"Progressieve politiek en geweldloze politieke techniek." (Translation of "The Problem of Political Technique in Radical Politics," in *Social Power and Political Freedom.*) Zwolle: Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, 1989.

"Burgerlijke ongehoorzaamheid in een democratie?" (Translation of "Civil Disobedience in a Democracy," in *Social Power and Political Freedom.*) Zwolle: Stichting Voorlichting Geweldloosheid, 1985.

"Sociale verdediging: Afschrikking en verdediging door burgers." [Civilian-based defense: deterrence and defence by citizens.] Introduction by Professor J.S. van Hessen. Monographie no. 1, Winter 81/82. 's-Gravenhage: Stichting Maatschappij en Krijgsmacht, 1982.

"Sociale verdediging: Optie voor West Europa," [Civilian-based defense: option for Western Europe, reprinted from *Jason-magazine*] and "Het politieke equivalent van oorlog: Sociale verdediging," (From "The Political Equivalent of War -- Civilian Defense") in Hylke Tromp, ed., *Sociale Verdediging* Groningen: Xeno, and Antwerp: Pax Christi, pp. 27-52;87-110, 1979.